PENDIDIKAN BERETIKA & BERBUDAYA

Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.
Dr. Samijo
Sutopo, MT.
Apri Nuryanto, MT.

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN BERETIKA DAN BERBUDAYA

Penulis:

Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.
Dr. Samijo
Sutopo, MT.
Apri Nuryanto, MT.

Diterbitkan oleh:

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pentingnya Pendidikan karakter yang berwawasan etika dan budaya 6

BAB II KONSEP DASAR PENDIDIKAN YANG BERETIKA DAN BERBUDAYA 10
A. Pendidikan 10
B. Etika 12
C. Kebudayaan 22
D. Pendidikan Berbudaya dan Beretika 26
E. Hubungan Etika-pendidikan-kebudayaan 38

BAB III MODEL PENDIDIKAN 41
A. Pengertian Model 41
B. Struktur Model 43

BAB IV PENJENJANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN KEWARGANEGARAAN 49
A. Peran Keluarga 52
B. Peran Pemerintah 53
C. Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum) 54
D. Materi Kurikulum Bidang Kognitif 56

BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN 58
A. Arti Pentingnya/Fungsi Kurikulum 61
B. Pengertian Kurikulum 63

C. Pembaharuan/Penggantian Kurikulum 65
1. Kegagalan/Keberhasilan Lulusan 66
2. Disiplin 67
3. Nilai Standar atau Nilai Acuan 67
4. Tuntutan Masyarakat 68
D. Falsafah Pancasila sebagai Rujukan dalam Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Berbudaya dan Beretika 69
E. Materi Kurikulum Pendidikan Berwawasan Budaya Etika.....73
1. Permainan/Bermain 73
2. Pendidikan Budi Pekerti/Karakter/Watak 76
3. Materi Pendidikan Karakter 82
4. Pendidikan Etika Sebagai Bagian Pendidikan Karakter 85
5. Materi Kurikulum Bidang Seni/Budaya 89
6. Materi Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Olah Raga/Seni Tari/Olah Raga Daerah/Pencak Silat 94
7. Pendidikan Kepanduan/Kepramukaan/Bela Negara.....98
F. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan 101

BAB VI MODEL PEMBELAJARAN.....103
A. Model Pembelajaran Konstruktivistik.....104
B. Model Pendekatan Konstruktivistik.....108
C. Sistem Among dalam Pembelajaran.....114
D. Pembelajaran Tematik Dan Integratif 116
E. Beberapa model dalam pembelajaran 118
1. Anak usia antara 5-8 tahun (oleh Ki Hajar disebut taman anak).....124
2. Anak usia 9-12 tahun (disebut taman muda) 124
3. Anak usia 13-16 tahun (dinamakan taman muda) ...124
4. Anak usia 17-20 tahun (dinamakan taman – madya).....125

BAB VII SISTEM EVALUASI 126
A. Evaluasi Pendidikan 126
1. Pengertian Evaluasi Pendidikan 126
2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi 127
3. Prinsip-Prinsip Evaluasi 129
4. Jenis Evaluasi.....130

B. Instrumen Evaluasi 131
1. Bentuk Instrumen.....131
2. Jenis Tagihan 132
C. Acuan Norma dan Kriteria 132
1. Acuan Norma.....133
2. Acuan Kriteria.....133
D. Validitas dan Reliabilitas Soal.....134
1. Validitas Soal.....134
2. Reliabilitas Soal 135

Daftar pustaka 137

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sangat berkaitan erat dengan pembentukan mental yang berkarakter kuat. Sebagaimana digariskan oleh kaum eksperimentalis, bahwa pendidikan itu tidak hanya berarti memberikan pelajaran kepada subjek didik agar dapat menyesuaikan diri terhadap situasi kehidupan nyata, tetapi lebih dari itu adalah tempat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mempertinggi pengalaman moral (Imam Barnadib, 1996). Demikian pula, aliran esensialisme dan perenialisme menyatakan, bahwa di samping proses pendidikan bertujuan untuk pembentukan kecerdasan, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat membentuk tingkah laku yang cerdas sebagai tujuan utama. Mereka tidak memungkiri kenyataan bahwa pendidikan itu adalah sarana tempat pembentukan watak atas nilai-nilai budaya yang luhur. Sementara itu, terbentuknya watak, kepribadian, dan kualitas manusia yang lain tidak dapat dilepaskan dari kecerdasan tingkah laku seseorang (Imam Barnadib, 1996).

Keunggulan suatu bangsa di era global sangat ditentukan oleh karakter penduduknya. Bangsa yang memiliki karakter (watak) kuat terbukti unggul dan mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini sesuai dengan pendapat Trilling & Hood (1999), dan Wen, (2003) bahwa faktor kunci penentu daya saing bangsa dalam era global adalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. Analisis tersebut didukung oleh penelitian Bank Dunia (Samani, 2008) yang menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam era global ditentukan oleh faktor-faktor: (1) inovasi dan kreatifitas (45%), jaringan kerjasama/*networking* (25%), teknologi/*technology* (20%), dan sumberdaya alam/*natural resources* (10%). Argumentasi tersebut menunjukkan adanya indikasi

bahwa suatu bangsa yang memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam, tidak akan mampu banyak berbuat dalam kancah persaingan global tanpa didukung oleh keunggulan sumber daya manusia (SDM).

Pada kenyataannya, Indonesia mengalami penurunan karakter yang sudah sampai pada ambang yang memprihatinkan. Setiap hari dipertontonkan suasana kekerasan yang terjadi di keluarga, masyarakat, dan ironisnya juga terjadi di sekolah. Perilaku peserta didik yang mencontek atau berbuat curang, *bullying* di sekolah terhadap teman sekelas, tawuran antar kelompok pemuda baik di kampung atau di kota saat menonton event olahraga atau kesenian, sampai dengan perilaku korupsi oleh penyelenggara negara ataupun pihak swasta yang merajalela. Hal tersebut adalah bukti bahwa pendidikan kita belum mampu membentuk watak atau karakter unggul peserta didik.

Krisis nilai-nilai moral yang dialami bangsa Indonesia hingga saat ini masih terus berlangsung dan bahkan kian marak. Derasnya budaya dari luar negeri yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia terus masuk dan banyak diikuti oleh generasi muda Indonesia. Maraknya penyimpangan sosial di kalangan generasi muda khususnya remaja cenderung mencapai titik kritis. Banyak generasi muda yang terjerumus dalam pergaulan yang merusak kehidupan masa depan. Degradasi moral saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini terindikasi dengan merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, dan hal-hal negatif lainnya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat masih belum tercapai. Kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam hal menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter atau berakhlak mulia dikarenakan apa yang diajarkan di sekolah tentang pengetahuan agama dan pendidikan moral Pancasila, belum berhasil membentuk manusia Indonesia yang berkarakter unggul. Padahal apabila dilihat dari isi pelajaran agama dan Pancasila, semuanya

bagus, dan bahkan kita bisa memahami dan menghafal apa maksudnya (Ratna Megawangi, 2010).

Sejak dahulu, pendidikan pada hakekatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas *(smart)*, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik *(good)*. Melihat fakta-fakta di atas tampaknya pendidikan di Indonesia hanya mampu menjadikan manusia Indonesia yang cerdas, tetapi belum mampu membentuk manusia Indonesia yang baik dan bijak. Membentuk manusia yang baik dan bijak tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Dengan demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa problem moral merupakan persoalan akut atau penyakit kronis yang harus di atasi oleh pendidikan Indonesia saat ini

Menurut teori perkembangan moral (Jean Piaget atau Lawrence Kohlberg), perkembangan kepribadian peserta didik sebagai anggota masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial yakni berhubungan dengan orang lain *(ethics)*. Perkembangan ini berlangsung sejak masa bayi sampai dengan dewasa bahkan akhir hayat. Perkembangan tersebut membentuk *social self* (pribadi dalam masyarakat) yang mempengaruhi pembentukan pribadi dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan sosial peserta didik dipastikan merupakan perkembangan moral, sebab perilaku moral adalah unsur fundamental dalam bertingkah laku secara sosial. Peserta didik akan berperilaku sosial tertentu apabila menguasai pemikiran norma perilaku moral yang diperlukan dalam kehidupan sosial.

Proses perkembangan sosial dan moral peserta didik senantiasa berkaitan erat dengan pendidikan (proses belajar). Artinya perkembangan sosial dan moral peserta didik sangat dipengaruhi oleh kualitas proses belajar di sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan dalam lingkup negara. Maknanya proses belajar sangat menentukan kemampuan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan nilai-nilai moralitas yang diyakini kebenarannya secara universal maupun agama, norma masyarakat, tradisi, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, proses

belajar perkembangan moral dan sosial peserta didik harus dilaksanakan melalui budaya *(culture)* Indonesia sebagai keutuhan yang komplek yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat.

Secara proses, hubungan pendidikan dengan kebudayaan adalah hubungan antara aktvitas dan isinya. Pendidikan adalah cara atau usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kebudayaan adalah isi dari proses atau aktivitas pendidikan tersebut. Sehingga fungsi dari pendidikan adalah melakukan transformasi kebudayaan dari manusia yang berkebudayaan kepada peserta didik yang belum memiliki kebudayaan.

Manusia berkebudayaan Indonesia adalah manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan sebagai proses transformasi kebudayaan memiliki fungsi rangkap yang tidak hanya sebagai wahana pembentuk kepribadian peserta didik, tetapi juga sebagai pencipta kebudayaan bagi generasi berikutnya.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran budaya manusia. Upaya kebudayaan (pendidikan) dapat ditempuh dengan sikap (laku) yang dikenal dengan teori Trikon, yaitu:

1. **Kontinuitas** yang berarti bahwa garis hidup kita sekarang harus merupakan lanjutan dari kehidupan kita pada zaman lampau berikut penguasaan unsur tiruan dari kehidupan dan kebudayaan bangsa lain.
2. **Konvergensi** yang berarti kita harus menghindari hidup menyendiri, terisolasi dan mampu menuju kearah pertemuan antar bangsa dan komunikasi antar negara menuju kemakmuran bersama atas dasar

saling menghormati, persamaam hak, dan kemerdekaan masing-masing.

3. **Konsentris** yang berarti setelah kita bersatu dan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita jangan kehilangan kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia adalah masyarakat merdeka yang memiliki adat istiadat dan kepribadian sendiri. Meskipun kita bertitik pusat satu, namun dalam lingkaran yang konsentris itu kita masih tetap memiliki lingkaran sendiri yang khas yang membedakan negara kita dengan negara lain.

Pembudayaan nilai-nilai moral, sosial dan intelektual yang sesuai kepribadian (jatidiri) Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan etika atau adat kebiasaan yang berlaku dan diyakini kebenarannya. Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Jadi etika berkaitan dengan moralitas tindakan manusia atau perilaku. Hal-hal yang menjadi kendala dalam menerapkan etika adalah amoralism dan egoism. Seseorang yang amoralis tidak melihat alasan mengapa dia harus melakukan sesuatu yang secara moral benar atau menghindari sesuatu yang salah secara moral. Berbagai literatur memberikan gambaran bahwa antara moral dan etika saling berkaitan tetapi tetap memiliki perbedaan. Moral merujuk pada *individual belief* yang bersifat konsisten, sedangkan etika dipengaruhi oleh konteks sosial dan bersifat eksternal.

Pada saat ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa hampir tidak lagi digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pemerintah, dan penuntun perilaku kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang agamis telah mengalami pergeseran nilai-nilai budaya dan etika Pancasila. Oleh sebab itu proses pendidikan masa lalu yang telah membentuk manusia Indonesia terjerumus dalam kondisi terpuruk harus diluruskan kembali. Pendidikan Indonesia harus dikembalikan kepada rel yang benar. Peserta didik harus diedukasi bagaimana berkebudayaan Indonesia, mampu melaksanakan nilai-nilai

moral, sosial dan intelektual secara harmoni. Output pendidikan masa depan harus memiliki etika dan budaya Indonesia (memiliki jati diri dan berkepribadian Indonesia) sehingga degradasi moral bangsa pada saat ini dapat diatasi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu menghadapi permasalahan global saat ini, tanpa kehilangan jatidiri sebagai bangsa besar, yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, perlu dikembangkan suatu model pendidikan di Indonesia. Model pendidikan yang dimaksud dinamakan model pendidikan karakter yang berwawasan etika dan budaya Indonesia.

B. Pentingnya Pendidikan karakter yang berwawasan etika dan budaya

Sebagaimana disampaikan di depan bahwa menjadikan manusia cerdas dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Artinya sangat wajar apabila dikatakan bahwa problem moral merupakan persoalan akut yang mengiringi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan tentang akutnya problem moral inilah yang kemudian menempatkan pentingnya penyelenggaraan pendidikan karakter.

Di Indonesia, pembangunan karakter bangsa *(character building)* pernah diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keresahan Presiden dilatarbelakangi oleh penyelewengan terhadap nilai-nilai karakter bangsa membuat bangsa Indonesia kehilangan jati diri yang sebenarnya. Lunturnya kebudayaan asli Indonesia yang telah digantikan oleh kebudayaan baru sebagai dampak globalisasi seperti tak terbendung. Hilangnya jati diri bangsa disebabkan oleh memudarnya nilai-nilai karakter yang dimiliki bangsa Indonesia. Membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), manusia

Indoensia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Thomas Lickona (1991) mengemukakan 7 (tujuh alasan) mengapa Pendidikan karakter penting untuk diselenggarakan karena:

1. Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya,
2. Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik,
3. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain,
4. Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam,
5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah,
6. Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja,
7. Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.

Pemikiran Thomas Lickona tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter memperlihatkan proses perkembangan peserta didik yang melibatkan pengetahuan yang baik (*knowing the good),* keinginan yang baik *(desiring the good),* dan tindakan yang baik *(doing the good)*. Dengan kata lain pendidikan karakter melatih peserta didik untuk memiliki perilaku yang menyeimbangkan antara otak *(habits of the mind)*, hati *(habits of the heart)*, dan tindakan *(habits of action)*. Pendapat Lickona tersebut didukung oleh Narvaest dan Rest (1995) yang menambahkan bahwa pengembangan karakter peserta didik lebih fokus pada proses internal dan perilaku dengan mempertimbangkan 4 (empat) komponen psikologis:

1. *Ethical Sensitivity*: yakni persepsi situasi moral dan sosial, termasuk kemampuan untuk mempertimbangkan tindakan yang mungkin dan dampaknya terhadap orang-orang yang terlibat

2. *Ethical Judgment*: yakni pertimbangan tindakan alternatif yang mungkin dan rasionalnya untuk memilih satu atau lebih sebagai yang terbaik;
3. *Ethical Motivation*: yaitu pemilihan nilai-nilai moral yang paling relevan dalam situasi dan memiliki komitmen untuk bertindak atas pilihan tersebut;
4. *Ethical Action*: yakni kekuatan ego yang dikombinasikan dengan keterampilan psikologis dan sosial untuk melaksanakan alternatif tindakan yang dipilih.

Pada hakekatnya pendidikan karakter diselenggarakan dengan 3 (tiga) fungsi yakni membentuk:

1. Manusia yang baik *(good people)*: yang artinya kita perlu karakter yang baik untuk menjadi manusia sepenuhnya. Kita perlu kekuatan pikiran, hati, dan kemauan dan kualitas seperti penilaian yang baik, kejujuran, empati, peduli, ketekunan, dan disiplin diri untuk menjadi manusia unggul.
2. Sekolah yang baik *(good school)*: artinya kita membutuhkan sekolah untuk membentuk dan mewujudkan karakter yang baik. Sekolah adalah tempat yang tepat dan lebih kondusif untuk belajar dan mengajar sehingga peserta didik terlatih untuk menegakkan standar perilaku yang tinggi dalam semua tahap kehidupan di sekolah. Seperti halnya keluarga, sekolah adalah salah satu tempat yang cocok untuk persemaian potensi kebajikan bagi seluruh peserta didik.
3. Masyarakat yang baik *(good society)*: artinya pendidikan karakter sangat penting untuk tugas membangun moral masyarakat. Permasalahan sosial, seperti kekerasan, ketidakjujuran, keserakahan, perpecahan dalam keluarga, meningkatnya jumlah anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, memiliki akar masalah yang dalam dan membutuhkan solusi yang sistemik. Namun mustahil kita mampu membangun masyarakat berbudi pekerti

luhur jika kebajikan tidak ada dalam pikiran, hati, dan jiwa individu manusia Indonesia.

BAB II KONSEP DASAR PENDIDIKAN

A. Pendidikan

Pendidikan menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) adalah 'usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, anak didik dapat aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jika potensi anak didik berkembang dengan baik, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan menurut KHD adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budipekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak. Menurut paham Tamansisiwa, ketiga bagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak didik yang selaras dengan dunianya.

Carter V. Good dalam *Dictionary of Education* menyatakan bahwa pendidikan adalah: keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup; proses

sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal

Hakekat pendidikan menurut organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang pendidikan, UNESCO, (1998) adalah: belajar mengetahui (*learning to know*); belajar melakukan (*learning to do*); belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*); dan belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*).

Pendidikan nasional, menurut KHD, dan yang menjadi acuan Tamansiswa dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai perjuangan, adalah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya. Pendidikan nasional ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia (untuk kemuliaan umat manusia), sebagaimana sila ke dua Pancasila, yaitu 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UU SPN dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan.

B. Etika

Filsafat merupakan ilmu kritis, sering disebut juga sebagai seni berpikir kritis. Sebagai ilmu kritis filsafat selalu mencari jawaban atas masalah-masalah, dan jawaban-jawaban atas masalah-masalah tersebut tidak pernah final. Filsafat tidak pernah puas diri, tidak pernah membiarkan sesuatu sebagai selesai, tidak pernah memotong perbincangan, selalu bersedia bahkan senang untuk membuka kembali perdebatan, selalu dan secara hakiki bersifat dialektis, setiap kebenaran akan menjadi lebih benar dengan setiap dialektika tesis-antitesis dan antitesisnya antitesis (Franz-Magnis Suseno, 1992: 20).

Obyek kajian filsafat adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia, baik manusia yang tetap sebagai manusia maupun manusia yang terus berkembang dan berubah. Masalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh individu atau kelompok individu, yang suatu saat dianggap 'benar' dalam suatu konteks dan periode tertentu, akan diperbincangkan lagi pada masa yang lain, atau konteks yang lain (Franz-Magnis Suseso, 1992: 20). Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, sekaligus harus ikut mencari jawaban-jawaban yang benar.

Filsafat kadang-kadang dianggap sebagai sekuleristik, ateis dan anarkis. Filsafat sering kali dituduh mengawang-awang saja, karena membahas yang abstrak, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak uraian filsafat yang dianggap jauh dari kenyataan kehidupan (Bertens, 2007: 29). Dinyatakan filsafat justru harus demikian karena pada dasarnya filsafat merupakan ilmu kritis, dan karena sifat filsafat yang harus kritis itulah maka beberapa filsuf mengalami perlakuan yang tidak baik, terutama ahli filsafat yang mengutamakan kajiannnya pada masalah etika. Sokrates dihukum mati, Aristoleles harus mengungsi dari Athena, Thomas Aquinas dianggap kafir, Hobbes dituduh ateis, Marx dianggapp subversif dan Freud dilarang dibaca oleh kalangan agama. Filsafat adalah usaha manusia dalam menggunakan penalaran dalam mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi, maka sikap-sikap yang semi-religius tidak

ada di dalam filsafat. Dalam usaha mencari jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang paling mendasar, filsafat senang bertengkar, bercorak nakal, duniawi dan sering sinis (Franz-Magnis Suseno, 1992: 21). Para ahli etika yang mendapatkan perlakuakn tidak baik ini mendekati masalah-masalah norma moral secara rasional. Etika (filsafat moral/etika) dianggap kambing yang merusak taman norma-norma tradisional yang tertata indah, padahal seharusnya etika menjadi tukang kebun yang berkepentingan membersihkan taman norma-norma dari rumput-rumput pengganggu.

Etika adalah bagian ilmu filsafat atau cabang filsafat yang kajiannya menyangkut masalah-masalah nilai-nilai dan norma-norma, dan ajaran-ajaran moral yang berlaku dalam masyarakat. Kata etika secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani kuno '*ethos*' yang mempunyai beberapa pengertian. Etika bisa berarti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamak kata '*ethos*' adalah '*ta etha'* yang memiliki arti: adat kebiasaan, dan arti inilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menunjuk sebagai etika sebagai 'filsafat moral'. Kajian filsafat etika pada umumnya adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut oleh individu-individu, kelompok individu atau masyarakat. Sedangkan kata 'moral' secara etimologis berasal dari Bahasa Latin '*mos,*' dalam bentuk jamak menjadi '*mores*', yang berarti 'adat, kebiasaan. Dengan demikian maka secara etimologis kata 'etika' dan kata 'moral' sama artinya, tetapi bahasa asalnya berbeda, yaitu kata '*ethos*' dari Bahasa Yunani, sedangkan kata '*mos*' berasal dari Bahasa Latin (Bertens, 2007: 4).

Jika di muka telah ditelusur dari asal-usul katanya, dari arti kata etika (*ethics*) mempunyai beberapa pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) menyebutkan arti etika adalah (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan

dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Mendasarkan pada arti kata etika menurut KBBI, Bertens menyusun urutan pengertian kata etika dengan memilih arti yang paling mendasar sebagai makna pertama, dan dengan urutan sebagai berikut, yaitu yang pertama: etika adalah seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perilakunya. Arti etika ini misalnya digunakan dalam pengertian 'etika suku indian', 'etika agama tertentu', dan contoh-contoh lain. Dalam pengertian ini etika dimaknai sebagai 'sistem nilai' yang dapat berlaku bagi perseorangan ataupun sekelompok orang.

Kedua, etika berarti juga sebagai 'kumpulan asas atau nilai moral'. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah 'kode etik', sebagai mana digunakan dalam pengertian 'kode etik kedokteran', 'kode etik pengacara', 'kode etik bisnis', dan seterusnya yang menyangkut 'kode etik profesi tertentu', dan contoh-contoh lainnya. Dalam pengertian ini, etika kedokteran misalnya, merupakan sekumpulan asas atau nilai-nilai moral dalam bidang kedokteran yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh para dokter yang terikat dengan asas-asas atau nilai-nilai moral tersebut. Jika gagal dalam mengikuti asas-asas yang telah disepakati, maka akan terjadi pelanggaran moral atau melanggar kode etik kedokteran, demikian juga dengan kode etik profesi-profesi yang lain.

Ketiga, etika mempunyai pengertian ilmu tentang yang 'baik' atau 'buruk'. Etika bisa menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap 'baik' dan 'buruk') yang begitu saja diterima dalam masyarakat menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Dalam hal ini etika disamakan dengan 'filsafat moral' (Bertens, 2007: 6). Etika dalam pengertian ini merupakan cabang ilmu filsafat yang kajiannya berhubungan dengan bahasan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang berkaitan dengan perilaku manusia, '**baik' atau 'buruk',** benar atau tidak benar. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa etika merupakan ilmu yang membahas mengenai moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral.

Ada tiga pendekatan untuk melakukan kajian tentang etika, yaitu etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Etika deskriptif merupakan pendekatan etika yang menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya tentang adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik atau buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika dekriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, kebudayaan tertentu, dalam waktu atau periode tertentu. Etika deskriptif hanya berkepentingan untuk menggambarkan atau melukiskan, atau menjelaskan perilaku moralitas individu atau masyarakat seperti apa adanya, dan tidak memberikan penilaian.

Etika deskriptif kadang juga disebut etika fenomenologis, yaitu etika yang menggali fenomena atau fakta kesadaran moral sebagaimana fakta atau fenomena yang muncul. Etika fenomenologis tidak memasang sendiri norma-norma, tidak menilainya juga, serta tidak membuktikan sifat mutlak kesadaran moral. Dalam etika fenomenologis, individu menyadari bahwa norma-norma resmi tidak dengan sendirinya mengikat, tetapi individu sendiri yang berhak, bahkan wajib untuk menentukan apa yang merupakan kewajibannya, jadi individu harus mengikuti suara hatinya. Etika fenomenologis menunjukkan adanya kesadaran bahwa tidak ada otoritas masyarakat apapun yang berhak untuk mewajibkan secara mutlak.

Namun demikian juga perlu disadari bahwa tidak semua suara hati, sebagaimana yang menjadi sandaran dalam etika fenomenologis, selalu betul adanya. Fakta bahwa individu menyadari sesuatu sebagai kewajiban, misalnya seorang individu berkewajiban untuk melaporkan pencurian di kantor saya, belum menjamin bahwa kesadaran itu memang betul, bahwa itulah kewajiban individu tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa ‘suara hati’ dapat keliru dan menyadari sendiri tentang kemungkinan itu, misalnya

diindikasikan dengan fenomena keragu-raguan seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan. Padahal kesadaran moral juga mengandung kesadaran untuk senantiasa mencari norma-norma yang betul secara obyektif.

Perdekatan yang kedua adalah etika normatif. Dalam pendekatan etika normatif, etikawan atau ahli etika tidak saja menggambarkan atau melukiskan norma-norma perilaku moral pada individu-individu tertentu, budaya-budaya tertentu, kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti pada etika deskriptif, tetapi ahli etika melibatkan diri dengan memberikan penilaian tentang perilaku manusia. Dalam pendekatan ini ahli etika dapat mempertanyakan norma-norma atau nilai-nilai moral yang dikajinya baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Tujuan etika normatif adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat digunakan dalam pratek.

Etika normatif adalah yang memuat kesadaran akan kewajiban untuk senantiasa mencari norma-norma yang betul secara obyektif. Etika normatif berkepentingan melakukan penelitian/pencermatan secara kritis norma-norma yang dirumuskan sebagai kewajiban moral, baik yang diwajibkan oleh lembaga-lembaga, organisasi-organisasi tertentu, orang tua, sekolah, atau oleh suara hati itu sendiri. Dengan demikian tugas etika normatif juga menelaah atau meneliti kewajiban-kewajiban moral yang secara dogmatis diajukan oleh lembaga-lembaga. Metode dalam memerika kesadaran moral yang berupa kewajiban-kewajiban moral, baik dari lembaga-lembaga, atau bahkan yang berasal dari suara hati, dinamakan metode kritis negatif. Disebut kritis karena tidak menerima norma konkrit apapun tanpa penelaahan/pencermatan, dinamakan juga metode negatif karena etika tidak menentukan norma-norma mana yang harus diikuti, melainkan dari norma-norma yang ada disingkirkan norma-norma yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ketiga etika sebagai ilmu adalah metaetika. Metaetika bergerak pada taraf yang lebih tinggi dari pada perilaku etis, yaitu pada taraf

‘bahasa etis’ atau bahasa yang dipergunakan di bidang moral. Dicontohkan yang dilakukan oleh filsuf Inggris, George Moore, yang menganalisis kata ‘baik’. Moore tidak bertanya apakah perilaku tertentu ‘baik’ atau ‘tidak baik’, dan secara konkrit Moore tidak bertanya apakah menjadi donor organ tubuh itu baik, atau tidak baik. Kata ‘baik’, menurut Moore, tidak dapat didefinisikan, ‘baik’ adalah ‘baik’, tidak lebih dari itu. Tidak ada penjelasan atau definisi tentang kata ‘baik’, karena kata ‘baik’ dari bahasa Inggris ‘*good*’ yang merupakan kata sifat, adalah merupakan konsep primer (*a simple notion*), seperti dalam kata ‘kuning’.

‘Kuning’ tidak dapat didefinisikan, tidak dapat diurai lebih lanjut sehingga tidak dapat dianalisis, karena ‘kuning’ merupakan sifat dasar atau konsep primer. Menurut Moore, banyak macam-macan benda yang berwarna kuning, tetapi benda apapun yang berwarna kuning tetap tidak dapat dianalisis, dan apa yang tidak dapat dianalisis juga tidak dapat diberi definisi. Yang dapat diberi definisi adalah sesuatu yang komplek, yang majemuk, yang terdiri dari bagian-bagian. Lain halnya dengan kata dalam Bahasa Inggris ‘*the* good’ yang diterjemahkan dengan kata ‘yang baik’, merupakan kata benda, dan kata ini dapat didefinisikan sesuai dengan konteksnya, seperti misalnya ‘*sesuatu yang baik*’, ‘*realitas yang baik*’, ‘*apa yang baik*’, dan masih banyak contoh yang lain.

Etika merupakan ilmu yang membahas tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran-ajaran moral. Etika tidak mau menjawab ‘bagaimana manusia harus hidup?’, melainkan tentang **cara rasional** untuk menjawab pertanyaan ‘bagaimana manusia harus hidup’ itu. Pada sisi lain, ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup. Ajaran moral adalah rumusan sistematik terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Ajaran moral misalnya mengajarkan bahwa manusia selalu harus berlaku jujur, sedangkan pada sisi lain etika akan mempertanyakan ‘apa artinya jujur itu’. Apakah tuntutan kejujuran dapat diganti oleh tuntutan moral lain, misalnya kebaikan hati yang untuk menutupi keburukan orang lain dengan sedikit bohong.

Ada kesepakatan yang luas diantara para ahli etika (etikawan) bahwa penilaian masalah-masalah moral harus melibatkan unsur kognitif. Suatu nilai moral, misalnya 'benar' atau 'salah', harus dapat diberlakukan secara universal yang mengimplikasikan kesediaan untuk memberlakukannya bagi siapa saja. (Franz-Magnis, 1992: 46). .

Pada awal perkembangannya pendidikan etika mula-mula berkembang dalam bidang keperawatan/kedokteran. Yang menjadi pemicu berkembangnya etika dalam profesi keperawatan/ kedokteran adalah adanya perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat, yang kemudian diprediksi akan dapat memunculkan potensi masalah bagi para profesional/pekerja yang menyediakan layanan bidang kesehatan. Metode utama untuk menyelesaikan isu-isu etika dalam bidang keperawatan/kedokteran adalah dengan menerapkan asas-asas kemandirian, kedermawanan, tidak merugikan, dan keadilan distributif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik. Sedangkan jika terjadi penilaian dalam pengambilan keputusan etis, metode yang digunakan adalah analisis argumen tertulis, seperti dalam perkuliahan filsafat. Pendidikan etika profesi dimotori oleh pendidik yang berlandaskan filsafat moral dan etika, sedangkan pendidikan etika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dimotori oleh psikolog moral.

Dalam bidang hukum, pendidikan etika untuk profesi hukum kemunculannya didorong/dipicu oleh adanya perilaku tak terpuji pengacara dalam skandal Watergate (hal: 815). Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran etika dalam bidang hukum pada awal mulanya adalah dengan membaca opini-opini kasus-kasus banding, putusan dari pertimbangan komite etika, dan mempelajari aturan-aturan negara bagian mengenai pertanggung jawaban profesi atau kode etik perilaku (kode etik/*rule of professional conduct)*. Kuliah dirancang untuk mengajarkan aturan-aturan hukum, bukan etika hukum. Kelemahan model ini adalah, sering sekali berbasis aturan, jarang berani melakukan analisis etika yang sebenarnya, dan sering tidak dianggp serius oleh mahasiswa.

Etika adalah ilmu yang bermaksud untuk membuat manusia mengerti bagaimana dapat beralih dari keadaan sebagai ‘manusia seadanya’ (secara kodrat) ke keadaan manusia–yang-mungkin-seandainya-ia-merealisasikan-kodrat-hakikinya, yang oleh FMS di sebut sebagai ‘manusia utama’. Dinyatakan bahwa kehidupan seseorang memperoleh maknanya sejauh orang tersebut maju dari keadaan sebagai ‘manusia seadanya’ menuju keadaan yang kedua, yaitu ‘manusia utama’, suatu keadaan manusia yang semakin merealisasikan tujuan hakikinya sebagai manusia. Menurut MacIntyre, etika adalah ajaran tentang bagaimana manusia harus hidup agar ia mencapai dirinya secara utuh, agar dia dari keadaan ‘seadanya’ yang masih belum memadai beralih ke keadan manusia yang ‘utuh-sempurna’.

Menurut Richard Rorty, kalau mau bersikap moral, jangan dicari dasar-dasar filosofis, religius atau ideologis. Kriteria moralitas hanyalah satu: tekat untuk tidak bersikap kejam. Kata ‘liberal’ bagi Rorty hanya memiliki satu makna, yaitu: tak ada hal yang lebih buruk dari pada kekejaman. Orang loberal membela kebebasan dalam segala-galanya, dengan satu batas: jangan bersikap kejam terhadap siapapun dan apapun. Ini artinya: jangan membuat makhluk lain menderita dan jangan membuat orang merasa terhina. Yang mendasari untuk tidak bersikap kejam adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan bukan sebuah pandangan dogmatis. Karena itu menurut Rorty, bukan filsafatlah yang membuat manusia peka, melainkan sastra, laporan etnografis tentang kebiasaan bangsa-bangsa dan para wartawan yang melaporkan tentang penderitaan orang lain.

Pandangan Rorty ini merupakan tantangan bagi banyak etika tradisional. Manusia bersikap moral apabila ia peka terhadap penderitaan makhluk lain, apabila ia bertekad untuk tidak menghina atau melukai manusia lain/sesama. Segala ketaqwaan terhadap Tuhan, rasionalitas dan martabat kemanusiaan universal hanyalah kemunafikan belaka, tanpa dengan tegas di manapun, terhadap siapapun, menolak untuk bersikap

kejam. Sikap solider, menurut Rorty, muncul bukan karena percaya terhadap sebuah teori filosofis, melinkan karena manusia bersedia untuk bersikap peka terhadap orang lain. (260-262).

Jika memperhatikan situasi etis dalam dunia/masyarakat modern ada beberapa ciri yang menonjol. Yang pertama, adalah munculnya 'pluralisme moral'. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada jaman sekarang ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya 'pluralime moral'. Dengan masuknya informasi yang masif secara cepat, hampir tidak ada seleksi/edit, dalam waktu yang bersamaan juga masuklah norma dan nilai dari masyarakat lain yang tidak selalu cocok atau sesuai dengan nilai dan norma yang dianut suatu masyarakat. Interaksi dengan masyarakat lain yang masuk melalui pariwisata, tranportasi, dan kegiatan usaha perdagangan, pengiriman mahasiswa atau siswa untuk studi ke negara-negara lain, dan kegiatan-kegiatan yang lain lagi dapat membawa pengaruh terhadap nilai-nilai dan norma-norma moral masyarakat.

Ciri yang kedua adalah munculnya masalah etis baru sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil olah pikir manusia semula ditujukan untuk mempermudah dan lebih mengefisienkan kerja-kerja manusia, namun tidak jarang kemajuan dalam bidang ini diikuti oleh masalah-masalah etis yang menuntut penyelesaian dengan acuan-acuan moral yang baru pula. Penemuan obat-obat psikotropika pada awalnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit saat dilakukan operasi pasien rumah sakit, kini banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain dari tujuan awalnya. Lembaga-lembaga berwewenang harus menentukan batasan-batsan yang dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah seorang dokter melanggar etika profesinya dalam penggunaan obat psikotropika. Masalah bayi tabung yang sesungguhnya merupakan prestasi bidang kedokteran, juga mengundang perdebatan mengenai etika atau moral mengingat agama-agama selau mengajarkan bahwa penciptaan manusia adalah kewenangan Yang Maha Kuasa. Demikian juga pernyataan bahwa setiap manusia

memiliki hak untuk menentukan nasibnya, bagaimana bagi orang-orang yang merasa hidupnya tidak berguna lagi, atau menderita sakit yang dinyatakan tidak dapat disembuhkan, kemudian menuntut hak untuk '*euthanasia*'. Dalam kasus-kasus ini nampaknya norma-norma moral lama tidak dapat menjangkaunya, sehingga masyarakat harus merumuskan norma-norma baru untuk menangani masalah-masalah ini.

Sayangnya kebutuhan norma-norma moral baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya disadari setelah masalah-masalah tersebut menjadi masalah etika yang riil dalam kehidupan masyarkat. Idealnya, sebelum muncul masalah-masalah etis dari suatu penemuan ilmiah/teknologis harus diantisipasi dan dirumuskan/disiapkan norma-norma etis untuk menangani mana kala permasalahan muncul dikemudian hari. Sebagai pedoman, tidak pernah boleh ada kemajuan ilmu dan teknologi yang mengorbankan martabat/kemanusiaan, sebagaimana dikatakan oleh William David Ross, 'menurut penilaian moral yang umum, saya tidak perlu dan barangkali malah tidak boleh membiarkan konsekuensi jelek dari perbuatan yang sebenarnya baik, jika saya mempunyai kemungkinan untuk mencegahnya (Bertens, 2007: 259).

Ciri yang ketiga adalah munculnya kepedulian etis yang dapat melewati batas-batas wilayah negara. Globalisasi melanda negara-negara di dunia bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang moral. Banyak muncul gerakan-gerakan kemanusiaan yang menuntut hak-hak bagi sekelompok masyarakat tertentu, misalnya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan universal, hak untuk hidup sejajar bagi kelompok minoritas, misalnya kaum kulit hitam, persamaan hak penduduk asli Aborigin/suku Indian dan sebagainya. Gerakan-gerakan demikian biasanya dikemas dalam bentuk gerakan untuk menuntut hak-hak asasi manusia, yang secara internasional diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The Declaration of Human Right* pada 10 Desember 1948. Semua negara

anggota PBB yang telah meratifikasi piagam tersebut mengakui hak-hak warganya sebagai hak yang asasi. Gejala-gejala kepedulian etis yang demikian dikatakan sebagai kepedulian yang menguniversal, yang dapat diterima dan berlaku di banyak negara, berlaku bagi siapa saja, dan melintas batas-batas wilayah dan otoritas negara.

C. Kebudayaan

Menelusuri literatur yang tentang kebudayaan menghasilkan banyak definisi tentang kebudayaan itu sendiri, namun dalam naskah ini hanya akan disajikan beberapa definisi diantaranya yang berhasil dikumpulkan.

Dalam pemahaman klasik, kebudayaan dipandang berasal dari bahasa Sansekerta *'buddhayah*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata 'budi' dan 'daya'. Kata 'budi' memiliki makna akal, pikiran, pengertian, paham, pendapat, perasaan, sedangkan kata 'daya' mempunyai makna sebagai kumpulan kemampuan dan segala usaha yang dilakukan dengan menggunakan 'budi' dalam upaya memperbaiki sesuatu untuk mencapai kesempurnaan. Selanjutnya kebudayaan dipahami sebagai pernik-pernik hasil 'akal budi' dan hasil karya kesenian, keseluruhan kebiasaan dan tradisi serta pola-pola perilaku dalam setiap kelompok orang yang membentuk masyarakat atau suku.

Pendapat lain menyatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa latin '*cultura'* yang berarti pengolahan tanah, perawatan dan pengembangan tanaman, kehalusan perilaku, pola berhias, penghormatan, pemujaan. Pengertian ini kemudian berubah menjadi pandangan tentang keunikan suatu adat kebiasaan suatu masyarakat (Simon, 2006: 2). Karena kelompok-kelompok masyarakat memiliki keunikan-keunikan adat kebiasaan masing-masing, yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, maka menjadi sulit untuk memperoleh pemahaman secara konkrit mengenai arti kebudayaan.

Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya tetang kebudayaan menyatakan bahwa 'kultur' atau kebudayaan berasal dari bahasa latin

'colere' atau '*cultivare*' yang berarti 'mengusahakan', yaitu mengusahakan kemajuan hidup. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 'kultur' itu artinya sama dengan pengertian usaha memperbaiki hidupnya tanaman, memperbaiki tumbuhnya dan hasilnya tanaman, dan dalam ilmu adab, yaitu ilmu tentang 'kemanusiaan', berarti perbaikan hidupnya manusia (KHD, 2013: 23).

Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan yang berarti 'buah budi' manusia, merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat pada diri manusia, yaitu alam (kodrat) dan jaman (masyarakat). Kebudayaan dapat menunjukkan bukti 'kejayaan hidup manusia' dalam mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran yang dihadapi dalam hidup dan penghidupan manusia untuk mencapai 'keselamatan dan kebahagiaan' (salam dan bahagia). Keadaan yang diupayakan sebagai hasil perjuangan manusia dalam mencapai keadaan 'salam dan bahagia' dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud dalam kehidupan yang bersifat 'tertib dan damai'.

Perjuangan hidup manusia berada dalam suatu alam dan jaman/masyarakat, maka dari itu kebudayaan selalu bersifat 'kebangsaan' dan mewujud dalam 'kepribadian bangsa'. Oleh karena itu kebudayaan menunjukkan 'tinggi-rendahnya keadaban' bangsa yang memiliki kebudayaan itu dengan selalu menggunakan ukuran 'keluhuran dan kehalusan' hidup manusia. Sebagai 'buah budi' manusia, maka kebudayaan selalu bersifat baik, indah, dan bermanfaat untuk memudahkan dan memajukan hidup dan penghidupan manusia.

Menurut Bakker, kebudayaan tidak cukup hanya dipahami berdasarkan etimologinya, tetapi harus diselami makna dari kata tersebut sampai ranah empiris masyarakat yang menggunakannya. Kebudayaan merupakan proses mencipta, menertibkan, dan mengolah nilai-nilai insani oleh manusia. Dinyatakan oleh Bakker: 'kebudayaan, singkatnya, adalah penciptaan, penertiban, dan pengolahan nilai-nilai insani, dan tercakup di dalamnya usaha memanusiakan bahan alam mentah serta hasilnya. Dalam bahan alam, alam diri dan alam lingkungan, baik fisik maupun sosial, nilai-

nilai diidentifikasikan dan dikembangkan sehingga sempurna. Membudayakan alam, memanusiakan hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan kesatuan tak terpisahkan.

Kuntjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu totalitas dari suatu sistem gagasan dan rasa; kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan, dalam pandangan Kuntjaraningrat, merupakan segala bentuk perilaku atau tindakan yang terjadi dalam kebudayaan dan **dibentuk dalam proses pembelajaran**.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kebudayaan memiliki unsur-unsur yang bersifat universaal seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian, dan lain-lain (Simon, 2006: 13). Dalam memahami suatu kebudayaaan secara keseluruhan hendaknya dilakukan klasifikasi dan analisis secara tajam mengenai komponen-komponen yang tercakup di dalam kebudayaan, yaitu sistem budaya yang bersifat abstrak yang terdiri dari berbagai gagasan, pikiran, konsep, tema berpikir serta keyakinan; sistem sosial yang terdiri dari aktivitas dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat, yang dapat dilihat dan diobservasi, yang kemudian menjadi pranata dan dikelola oleh nilai dan norma; sistem kepribadian yang terdiri atas watak individu yang dirangsang dan dipengaruhi oleh nilai dan norma yang terbentuk melalui sosialisasi dan proses pembudayaan; dan sistem organik yang melibatkan proses biologi dan biokimia.

Radhar Panca Dahana menyatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah kerja idea(listik) dari satu kelompok (manusia) memusyawarahkan sebuah mufakat (konsensus) hal-hal fundamental yang dapat dijadikan acuan utama (*main references*) bagi pemuliaan sub-species mamalia bernama manusia. Hasil pokok dari pemufakatan tersebut tidak bersifat material atau *tangible*, melainkan berupa ide-ide abstrak yang kemudian

diformasi menjadi nilai, norma-norma, moralitas, etika dan akhirnya menjadi estetika. Dengan acuan-acuan tersebut maka manusia berbudaya menciptakan produk-produknya dalam semua dimensi kehidupan, dan ketika sudah menjadi lengkap, bertahan (*sustainable)*, teruji, dan mapan (*established*) kemudian dapat menjadi landasan sebuah peradaban (Kompas, 13 November 2014: hal 6).

Beberapa pemikir barat, seperti Matthew Arnold, memberikan makna atau arti kebudayaan sebagai suatu proses penyempurnaan *(the study of perfection)* terutama yang berhubungan dengan kondisi batin, intelektual dan spirit manusia. Kebudayaan adalah suatu proses peningkatan kualitas untuk menjadi lebih bermutu. Kebudayaan dapat dibaca sebagai kemampuan untuk mengetahui yang terbaik, apa itu yang terbaik, aplikasi mental dan spiritual dari apa yang terbaik, dan buah dari apa yang terbaik. Dinyatakan oleh Arnold bahwa kebudayaan adalah segala proses dan bentuk peningkatan taraf pemaknaan hidup dan aplikasinya secara konkret dan horisontal dalam konstelasi antropo-sosial.

Dalam pandangan Raymond Williams, kebudayaan utamanya dipandang sebagai proses umum intelektual, spiritual dan perkembangan estetik, yang dalam perkembangan Eropa barat dapat disaksikan melalui figur-figur para filsuf, seniman dan penyair-penyair besar. Kebudayaan juga dipandang dalam bentuk yang khusus cara hidup sekelompok manusia atau suatu masyarakat tertentu dalam suatu periode tertentu pula. Pemikir barat yang lain, Immanuel Kant, menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu proses pendewasaan persepsi nilai dan makna berdasarkan prinsip yang makin berlaku universal. Sementara menurut Francois Guizot, peradaban dan kebudayaan memiliki makna sebagai proses penghalusan perilaku ala kaum aristokrat dan kehidupan urban yang diperoleh melalui modernisasi yang menjunjung penalaran dan penghalusan menuju kesempurnaan universal.

Menurut van Peursen kebudayaan adalah siasat atau strategi manusia untuk menghadapi masa depan. Dalam pandangan Peursen,

kebudayaan merupakan suatu proses belajar yang berkelanjutan, yang selalu mengandung unsur-unsur kreativitas dan inventivitas dalam diri manusia/masyarakat menuju masa depan (menjalani hari esok dan seterusnya), sehingga dikatakan kebudayaan bersifat sinambung. Kebudayaan dikatakannya sebagai manifestasi kehidupan setiap orang/kelompok orang yang berupaya mentransformasi natur menjadi kultur. Dari inilah maka menurut Peursen bahwa kebudayaan hendaknya dipandang sebagai 'kata kerja', kegiatan atau proses manusia yang membuat, tentang penceritaan manusia tentang perubahan-perubahan riwayat manusia yang secara terus menerus memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada, ketegangan antara segala sesuatu yang imanensi dan yang transedensi.

A.L. Kroeber dan Kluckhohn dalam memahami kebudayaan mengelompokkan secara garis besar dalam beberapa sudut kajian, antara lain dari sisi sosiologis kebudayaan dinalar sebagai keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dll.) yang dimiliki manusia sebagai subyek masyarakat. Dari kajian historis, kebudayaan merupakan warisan sosial atau tradisi, sedangkan menurut kajian filsafat kebudayaan mengutamakan penekanannya pada unsur normatifnya, kaidah kebudayaan dan terutama pembinaan nilai serta realisasi cita-cita. Dari kajian antropologi, kebudayaan dilihat sebagai tata dan cara hidup serta kelakuan, sedangkan dari kajian psikologi kebudayaan dipandang sebagai bentuk penyesuaian manusia terhadap alam, sementara dari kajian ilmu bangsa-bangsa kebudayaan dipandang sebagai hasil artifak dan kesenian (Simon, 2006: 21).

D. Pendidikan Berbudaya dan Beretika

Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu (KHD, buku 1: 3). Jika setiap anggota rakyat kuat, maka rakyat itu secara kelompok akan kuat, dan sebaliknya jika setiap anggota rakyat merupakan orang-orang yang lemah, maka secara kelompok rakyat itu akan lemah.

Oleh karena itu menjadi penting bangsa yang ingin memiliki rakyat/masyarakat yang kuat, maka setiap warga/anggota rakyat/masyarakat itu harus dibuat menjadi kuat.

Pembangunan bangsa/rakyat agar menjadi kuat secara individu/tiap-tiap warga/anggota masyarakat maupun sebagai bangsa diyakini dapat terlaksana dengan baik melalui pendidikan yang berkualitas bagi warga bangsa itu. Pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh setiap warga/anggota masyarakat. Rob Vos (1996) menyatakan.

> *"Education is a basic human need and a key factor in development. Investment in education will directly raise the well-being of individuals, but it will also raise their `human capital' and capacity to acquire means for the satisfaction of other basic needs. Education is also seen as a means of reducing inequality, as a mechanism of making other investments more productive and as an avenue for social and political development. These positive `externalities' make educational investment also highly profitable for society".*

Berbeda dengan konsep hierarkhi kebutuhan dari Maslow yang menyebutkan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan phisik mencakup sandang (pakaian), pangan (makan) dan papan (tempat tinggal), Rob Vos mengkategorikan pendidikan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, dan merupakan faktor kunci untuk pembangunan. Investasi dalam pendidikan tidak saja secara langsung meningkatan kehidupan individu, tetapi juga akan meningkatkan "modal manusia" dan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Pendidikan juga dapat dilihat sebagai sarana untuk mengurangi ketidakadilan, sebagai sarana untuk membuat investasi lebih produktif, dan sebagai penggerak dalam pembangunan sosial dan politik. Investasi pendidikan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Sekalipun demikian perlu memperhatikan pandangan lain yang menyatakan bahwa pendidikan justru menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat, (Gidens,). Dengan mengabil dari perpektif

lain diharapkan dapat meningkatkan kehati-hatian dalam menentukan strategi dalam menyusun kebijakan pembangunan bidang pendidikan.

Tony Blair ketika berkampanye untuk memperoleh masa pemerintahan ke dua sebagai perdana menteri Inggris yang dikenal sebagai salah satu negara maju/modern di dunia itu memaparkan program yang akan menjadi diprioritaskan dalam pemerintahannya, yaitu 'pendidikan, pendidikan dan pendidikan' (Giddens, 2000: 126) Blair akan membangun bangsanya agar menjadi lebih maju, karena bangsa itu memang sudah maju, melalui pendidikan, dan ternyata masyarakat Inggris setuju dengan program itu, dan memberikan kepercayaan kepada Blair untuk memerintah yang kedua kalinya.

Dengan memiliki pendidikan yang baik, warga negara dapat mencapai hidup sejahtera lahir dan batin, dengan kesejahteraan yang disandangnya warga negara dapat menjadi warga negara yang berbudaya, dan pada akhirnya akan menjadi warga masyarakat yang bermartabat/beradab.

Dengan ide dasar bahwa kekuatan rakyat adalah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota masyarakat itu sendiri, maka pendidikan yang baik/berkualitas haruslah dapat diakses oleh setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status sosial, latar belakang suku, ras , agama, dan latar belakang yang lain. Pendidikan yang dapat dijangkau dalam pengertaian ini mencakup pembiayaan, ini yang biasanya memberatkan masyarakat kecil, tetapi juga terjangkau dalam pengertian lokasi-lokasi sekolah/lembaga pendidikan dapat dijangkau/didekatkan pada daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan kota propinsi, kabupaten, kota, yang dikenal dengan daerah-daerah terpencil, terisolasi, terdepan terluar (3T). Pendidikan yang berkualitas juga harus dapat diakses oleh warga yang mengalami hambatan-hambatan phisik dan psikologis, dan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang disandangnya, mereka harus dapat memperoleh layanan yang diperlukan.

Pendidikan merupakan laku kodrat *(insticnt*) bagi semua makhluk, dan dalam hidup manusia yang beradab pendidikan adalah bersifat usaha kebudayaan. Sebagai laku kodrat, sesungguhnya binatang juga melakukan pendidikan kepada keturunannya, walaupun masih bersifat naluriah, untuk dapat hidup dalam dunianya dan meneruskan keturunan dari induknya. Dalam hidup manusia beradab pendidikan merupakan usaha kebudayaan dengan maksud memberikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya jiwa dan raga anak didik untuk memperoleh kemajuan hidup lahir dan batin, menuju arah adab kemanusiaan.

Yang dimaksud adab kemanusiaan adalah 'keluhuran' serta 'kehalusan' budi manusia, yaitu kesanggupan dan kemampuan serta kesadaran untuk mengembangkan kecerdasannya serta keluhuran dan kehalusan budi pekerti bagi dirinya. Manusia beradab bersama-sama manusia lain (individu lain) dalam masyarakat membentuk kebudayaan bersama yang bercorak khusus dan tetap berdasarkan adab-kemanusiaan, untuk mewujudkan 'alam-diri' (dunianya manusia itu secara individu), 'alam-kebangsaan' (dunianya manusia yang berkelompok membentuk masyarakat yang besar sebagai bangsa) dan 'alam-kemanusiaan' (sifat-sifat yang memuliakan kemanusiaan yang berlaku secara universal bagi seluruh umat manusia di muka bumi). Ketiganya dunia (alam) yang dialami manusia ini saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pembangunan/ pengembangan manusia secara individu akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa, dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan/ perikemanusiaan.

Pendidikan, menurut KHD, merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Ketiga dimensi, budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak, tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mencapai kesempurnaan hidup yang selaras dengan dunia anak didik. Oleh karena itu disarankan oleh KHD, segala alat, usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan

kodratnya keadaan, dan kodratnya keadaan tersebut tersimpan dalam adat-istiadat setiap kelompok masyarakat.

Pendidikan/pegajaran budi pekerti harus mempergunakan syarat-syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan menuju kepada kesucian, ketertiban dan kedamaian lahir dan batin. Pendidikan budipekerti harus memperoleh penekanan dalam pendidikan, karena pendidikan jika hanya menekankan pada kemajuan otak (kecerdasan/olah pikir), dan jika tidak diimbangi dengan karakter yang kuat, maka akan menimbulkan gejala intelektualisme, yaitu suatu paham yang mendewa-dewakan kecerdasan otak, yang akan berujung pada keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, individualisme, dan hanya akan mementingkan kehidupan duniawi. Kemajuan dalam pengembangan intelektual harus dibarengi dengan penanaman nilai-nilai karakter/budi pekerti yang luhur supaya anak didik tidak terjerumus ke dalam gejala intelektualisme yang menyesatkan.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan dimaknai sebagai turunan dari bahasa Belanda *'opvoeding'* dan terjemahan yang pas untuk bahasa Indonesia tidak diperolehnya. Oleh karena itu hanya ditemukan kata yang hampir sama maknanya, tetapi berasal dari Bahasa Jawa, yaitu '*momong', 'among'* atau '*ngemong*'. Kata '*among*' atau '*momong*' atau '*ngemong*' dalam bahasa Indonesia pengertiannya dekat dengan kata 'mengasuh', dan kata inilah yang ditetapkan sebagai dasar pendidikan di Tamansiswa.

Dari penggunaan kata '*among', 'momong'* dan '*ngemong*' inilah muncul istilah '*pamong*', yaitu sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan '*ngemong*' atau 'mengasuh' yang selanjutnya kata '*pamong'* digunakan untuk menyebut pendidik/guru. *Pamong* adalah orang yang melakukan pekerjaan *'momong*' (mengasuh) anak, dalam dunia pendidikan pamong adalah orang-orang yang mengasuh 'anak didik' (murid/siswa). Dengan menggunakan istilah pamong untuk mengganti istilah 'guru', Taman siswa mendasarkan pada pemikiran bahwa anak didik harus diasuh dengan cara yang menghindarkan dari paksaan, sekalipun hanya

memimpin dianggap tidak diperlukan. Pamong hanya harus mencampuri kehidupan anak didik mana kala dalam perjalanan kepengasuhannya anak didik sudah dapat dianggap menyimpang atau berada pada jalan yang salah, membahayakan dirinya.

Pendidikan mengandung maksud untuk mendidik anak menjadi merdeka batinnya, merdeka fikirannya dan merdeka tenaganya. Untuk menjadikan anak didik manusia yang merdeka batinnya, fikirannya dan tenaganya, tidak dapat dilakukan dengan model pendidikan yang menerapkan paksaan dari pendidik. Pendidikan yang dilakukan dengan paksaan, indoktrinasi, hanya akan menghasilkan pembalasan manakala ada kesempatan. Tugas guru bukan hanya memberikan pengetahuan yang diperlukan dan baik bagi anak didik, tetapi juga mendidik untuk mencari sendiri pengetahuan tersebut yang diperlukan bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Dengan metode '*among*' itulah guru dalam kepengasuhannya memberikan keleluasaan kepada anak didik untuk berkembang sesuai keinginannya, dan mencari sendiri ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan metode among di lapangan adalah dengan menerapkan 'trilogi' kepemimpinan, yaitu '*Ing ngarso sung tulodo', 'ing madyo mangun karso*' dan '*tut wuri handayani'*. '*Ing ngarso sung tulodo*' yang berarti di depan pamong/pendidik menjadi/memberi contoh keteladanan dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, merinisiatif, berani mengambil tanggung jawab, dll. '*Ing madyo mangun karso*' yang berarti di tengah-tengah anak didiknya pamong/guru membangun semangat/memotivasi, menumbuhkan minat-minat anak didik untuk berkreasi, mengembangkan potensi dirinya, pemberdayaan anak didik, dll dalam pembelajaran. '*tut wuri handayani*' mengandung pengertian pamong/pendidik memberikan kemerdekaan/ kebebasan bagi anak didik untuk berkembang sesuai dengan keinginannya, memilih ilmu-ilmu yang diinginkannya, mencari bahan-bahan yang ingin dikuasainya, dan berkembang sesuai dengan kemampuannya/kecepatan belajarnya, tanpa

dipaksa untuk mengikuti ritme belajar anak-anak didik yang lain, ataupun kecepatan belajar yang diinginkan oleh gurunya.

Radhar Panca Dahana menyatakan bahwa kerja kebudayaan sesungguhnya telah dioperasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai bidang dan dimensinya. Dalam proses berbudaya yang terjadi sesungguhnya adalah transmisi dari acuan-acuan fundamental yang mencakup nilai, norma-norma, moralitas, etika dan estetika, dari yang lebih tahu, lebih kuasa, lebih tua dan lebih dipercaya kepada mereka yang 'tidak lebih' atau kurang. Ini menunjukkan bahwa dalam kata 'kebudayaan' telah terintegrasi sebuah kerja dan pemahaman tentang 'pendidikan', dalam pengertian lapangan pengajaran, tempat transisi nilai (juga pengetahuan) berlangsung.

Insan yang berbudaya adalah insan yang mendidik langsung maupun tidak langsung, lewat modul, sistem kelas, sorogan, atau sekedar contoh perbuatan (cara hidup). Maka yang disebut pendidikan adalah proses membudayakan atau melakukan transmisi kultural antara seorang pendidik/pamong kepada anak didik/siswanya. Dengan penalaran sederhana ini maka pendidikan dalam arti formal atau pengajaran dalam makna yang luas adalah sebuah kerja yang tak akan pernah selesai, juga tidak memiliki yurisdiksi material atau fisikawi. Siapapun yang berada dalam tanggung jawab 'pembudayaan' (pendidikan dan pengajaran) adalah seseorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, bukan mereka yang masih membutuhkan pemolesan.

Pendidikan Nasional, menurut paham Tamansiswa adalah 'pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*culturil- nationaal)* dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya. Pendidikan nasional bagi suatu angsa diarahkan agar bangsa dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Tujuan akhir pendidikan bagi rakyat secara universal dinyatakan dalam paham

Tamansiswa ini adalah untuk kemuliaan manusia, yang dalam Pancasila terakomodasi dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu pendidikan budipekerti dipandang sangat penting, dan harus diselenggarakan dengan menggunakan syarat-syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan, bangsa Indonesia. Penggunaan syarat yang selaras dengan jiwa kebangsaan adalah untuk menuju kesucian, ketertiban lahir dan batin, dan bukan hanya syarat-syarat yang sudah ada dan baik, tetapi juga dikembangkan syarat-syarat yang akan berguna untuk masa depan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pendidikan budipekerti ini diberikan arahan terutama memperhatikan perikehidupan rakyat dalam kesenian, peradaban, agama, dan ceritera-ceritera rakyat, dongeng, dll. Tujuannya adalah untuk memberikan pijakan jaman baru yang diupayakan agar berhasil karena diselaraskan dengan jaman yang lalu.

Berbeda dengan pernyataan dan konsepsi yang sering dimunculkan para praktisi pada jaman sekarang, di mana pendidikan yang baik diarahkan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat bersaing dalam tataran global, KHD sejak awal berdirinya Tamansiswa justru merumuskan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia adalah agar bangsa Indonesia dapat bekerja bersama-sama bangsa lain untuk membangun kemanusiaan. Oleh karena itu maka pengajaran pengetahuan (pembelajaran kognitif) diseyogyakan dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya, agar anak didik dapat mewujudkan perikehidupannya dengan sebaik-baiknya, sejajar dengan keluasan dan kedalaman penguasaan pengetahuan bangsa-bangsa lain.

Dalam pembelajaran ilmu pengetahun, dianjurkan agar pembelajaran ilmu pengetahuan diupayakan untuk mengarah pada kecerdasan anak didik, selalu bertambah pengetahuan dan ilmu yang berfaedah, membiasakan mencari pengetahuan sendiri, mempergunakan pengetahuannya untuk keperluan kemasyaratan.

Bangsa yang memiliki kebudayaan yang tinggi, selalu memiliki keinginan dan merumuskan/menentukan strategi untuk meneruskan nilai-nilai budaya yang tinggi tersebut kepada generasi penerusnya. Demikian juga Bangsa Indonesia yang dikenal memiliki kebudayaan yang tinggi, dikenal di dunia sebagai bangsa yang berbudaya, maka penting sekali menentukan strategi kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan/ memajukan budayanya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, bangsa yang ramah dan santun, bangsa yang pluralis, bangsa yang toleran, bangsa yang terdiri dari banyak sekali suku bangsa, terdiri dari berbagai latar belakang budaya, suku, ras, agama dan 17 ribuan pulau, tetapi dapat bersatu dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa harus tetap berusaha agar budaya bangsa yang begitu tinggi dapat dikemkangkan/dimajukan dan dilestarikan untuk generasi bangsa yang akan datang.

Satu cara atau strategi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah melalui proses pendidikan. Dengan pendidikan yang baik dan strategi yang memadai, maka kebudayaan yang luhur dapat diteruskan kepada generasi muda bangsa, dan dapat dikembangkan untuk memperoleh kemajuan kebudayaan yang semakin memudahkan hidup dan penghidupan manusia (bangsa Indonesia). Dengan kata lain, kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan melalui proses pendidikan, agar dapat lebih memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia dan untuk dapat bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk kemuliaan seluruh umat manusia di dunia (kemanusiaan).

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha kebudayaan. Ini selaras dengan pendapat Radhar Panca Dahana yang menyatakan bahwa dalam kata kebudayaan sesungguhnya telah terkandung suatu upaya pendidikan. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Dengan pendidikan dapat didikkan kepada anak-anak muda segala adat-

istiadat, nilai-nilai kebaikan, norma, etika dan estetika kepada anak-anak yang nantinya akan menjadi dewasa.

Bung Hatta menyatakan bahwa yang diajarkan dalam proses pendidikan adalah kebudayaan, dan pendidikan itu sendiri adalah proses pembudayaan. Haryadi Baskoro (Kompas, 8 Nopember, 2014: 7), menyatakan bahwa manusia menjadi makhluk yang berbudaya melalui proses belajar. Kebudayaan menjadi milik atau dimiliki manusia melalui proses belajar yang panjang. Kebiasaan tidak baik, masalah-masalah yang pada awalnya kecil/sepele, pada akhirnya akan menjadi kebiasaan tidak baik dalam waktu lama. Kebiasaan menyontek pada anak didik yang dilakukan di sekolah, jika dibiarkan akan menjadi perilaku yang tidak baik pada masa dewasanya, bisa menjadi koruptor, pengemplang pajak. Kebiasaan tidak peduli dengan sesama anak di dalam kelas atau di lingkungan permainan di masyarakat pada masa dewasa akan menjadi orang yang egois, tidak toleran, tidak peka terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam proses pembudayaan melalui pendidikan, anak didik dibiasakan sejak dini untuk saling menghormati, saling menghargai, dibiasakan untuk saling peduli, dan tidak menyakiti anak-anak yang lain. Anak didik dapat dibiasakan saling membantu dalam masalah-masalah kecil dalam kesehariannya, bukan saling menjatuhkan/menyerang, dan semua ini dapat dilakukan dengan baik dan sistematis melalui pendidikan yang baik, baik yang berlangsung dalam kelas maupun di arena-arena bermain bagi anak-anak. Penanaman nilai-nilai moral yang baik seperti kepedulian kepada sesama, kepekaan kepada perasaan orang lain, merupakan nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam pendidikan. Dalam tulisan tentang etika, Rorty menyatakan ‘jangan membuat makhluk lain menderita, dan jangan membuat orang lain merasa terhina’. Sikap ‘solider’, memahami perasaan orang lain, dapat muncul bukan karena percaya pada sebuah teori filsafat, melainkan karena manusia bersedia untuk bersikap peka terhadap orang lain. Ini semua dapat dilatihkan melalui proses

pembudayaan yang pelaksanaanya melalui proses belajar. (Franz Magnis-Suseno, 2006: 259)

Pendidikan merupakan proses pembudayaan pluralis bagi bangsa indonesia yang sangat majemuk menjadi bangsa yang ‘bhineka tunggal ika’. Krisis kebudayaan yang ditandai dengan hilangnya nilai-nilai budaya bagi para elit, yang tidak mau ‘berbagi makanan’, atau ‘berbagi kekuasaan’ diibaratkan sebagai sebuah ‘kebun binatang’ karena binatang memang tidak memiliki perasaan dan nilai-nilai budaya yang dapat mempersatukan, dan tidak memiliki tuntunan moral untuk berbagi sebagaimana yang dimiliki manusia. Krisis kebudayaan ditandai dengan adanya gelaja hilangnya rasa saling percaya diantara sesama, dan gejala yang demikian ditunjukkan oleh elit bangsa yang hanya mengejar kekuasaan.

Kebudayaan memiliki **asas kontinyuitas**, artinya kebudayaan selalu sinambung antara kebudayaan suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat generasi berikutnya. Asas ini merupakan pemenuhan tujuan untuk melestarikan kebudayaan, karena kebudayaan yang sekarang adalah merupakan warisan dari kebudayaan masa lalu, dan kebudayaan yang sekarang ada akan diteruskan untuk generasi masa yang akan datang. Asas pelestarian kebudayaan ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan, yaitu dengan mendidikkan nilai-nilai kebaikan, kepekaan sosial, toleransi, dan lain-lain kepada anak-anak didik.

Kebudayaan dalam pengembangannya menuntut adanya asas konvergensi. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bangsa ini hidup dalam interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa indonesia tidak dapat hidup menyendiri, menutup diri dari pergaulan atau interaksi dengan bangsa lain, dan terisolasi dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Semua persoalan yang dialami oleh bangsa-bangsa lain akan berpengaruh kepada kehidupan bangsa Indonesia. Akibat dari pergaulan antar bangsa-bangsa tersebut akan terjadi pula pertemuan budaya antara bangsa yang satu dengan budaya bangsa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menyeleksi nilai-nilai budaya bangsa lain yang masuk sebagai akibat

adanya interaksi antara bangsa tersebut, budaya yang dapat memperkaya/ memajukan budaya bangsa Indonesia diterima dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa harus ditolak/dibuang. Proses inilah yang dalam kebudayaan dikenal dengan alkulturasi. Asas kovergensi dapat tercapai dengan baik melalui proses pendidikan.

Asas yang ketiga dalam kebudayaan adalah asas konsentrisitas, yang artinya, setelah terjadi interaksi dengan budaya bangsa-bangsa lain di dunia, sebagai akibat dari terjalinnya hubungan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia adalah masyarakat merdeka yang memiliki adat istiadat dan kepribadian sendiri. Asas konsentrisitas dalam kebudayaan memberikan arti bahwa meskipun budaya-budaya semua bangsa beredar dalam lingkaran yang memiliki satu titik pusat yang sama, namun dalam lingkaran yang konsentris itu setiap budaya bangsa tetap memiliki lingkaran sendiri, yang tidak berbenturan dengan edaran dari bangsa-bangsa yang lain. Ini memberikan pengertian bahwa sekalipun semua budaya bangsa-bangsa berkembang dari satu titik pusat, tetapi masing-masing budaya tetap memiliki ciri khas, sebagai kepribadian bangsa masing-masing. Titik pusat yang hanya satu sebagai titik sumbu semua lingkaran budaya menunjukkan bahwa semua kebudayaan bangsa memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu untuk menuju kemuliaan seluruh umat manusia di dunia. Jadi tujuan utama perjalanan kebudayaan semua bangsa di dunia adalah sama, yaitu untuk membangun peradaban manusia/kemanusiaan. Dengan demikian maka perkembangan/kemajuan budaya bangsa Indonesia harus tetap memiliki kepribadian sendiri sebagai bangsa yang Pancasilais, berkembang bersama-sama budaya bangsa-bangsa lain, tetapi tetap memiliki ciri khas Indonesia, sebagai kodrat bangsa. Ini yang disebut ‘berkepribadian dalam kebudayaan’ yang menjadi salah satu sakti dari ‘tri sakti’ pemerintahan yang sekarang.

Pendidikan merupakan usaha kebudayaan. Sebagai usaha kebudayaan pendidikan berusaha menanamkan nilai-nilai luhur/yang baik

kepada anak didik untuk menjadi warga masyarakat yang berbudaya. Dalam pengertian ini, pendidikan sebagai usaha kebudayaan berusaha meningkatkan/memperbaiki hidup manusia Indonesia. Oleh karena itu pendidikan yang baik/berkualitas adalah pendidikan yang dapat meningkatkan/memperbaiki hidup manusia Indonesia, yang berkarakter Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki falsafah Pancasila, yang sekaligus sebagai dasar negara.

Karena budaya atau kebudayaan itu merupakan buah budi dari keadaban manusia, maka hasil keadaban itu sifatnya luhur budi, dan hasil atau buah-buah dari keluhuran budi itu dinamakan budaya. Walaupun kebudayaan itu bermacam-macam terbentang diantara kelompok-kelompok masyarakat, tetapi karena semua merupakan buah adab, maka semua kebudayaan selalu bersifat tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan seterusnya (KHD, buku 2: hal 23). Oleh karena itu adalah menjadi keharusan bagi masyarakat, yang melakukan usaha kebudayaan dalam bentuk pendidikan, bahwa usaha kebudayaannya/pendidikan harus didasarkan pada budaya setempat, yang telah berkembang dan menjadi dasar warga dalam menjalani kehidupan kelompok itu.

E. Hubungan Etika-pendidikan-kebudayaan

Norma-norma moral yang dimiliki oleh masyarakat dikandung dalam budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat-masyarakat bergabung membentuk suatu bangsa, maka norma-norma moral yang berlaku akan menjadi budaya bangsa. Budaya-budaya bangsa tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena tujuan kebudayaan adalah untuk kemuliaan manusia/atau untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kebudayaan bangsa/ kebangsaan merupakan kebudayaan/nilai-nilai kemanusiaan yang khusus untuk suatu bangsa, jadi tidak ada pertentangan antara kebangsaan dan kemanusiaan.

Kebudayaan sebagai kata benda adalah semua sistem nilai/norma yang dimiliki oleh suatu bangsa, sedangkan sebagai proses/kata kerja kebudayaan adalah strategi suatu bangsa untuk menghadapi masa depan bangsa tersebut. Kebudayaan suatu bangsa yang mengandung nilai-nilai moral untuk menuju kemuliaan manusia harus diwariskan/dilestarikan pada generasi mendatang, dikembangkan agar sebagai bangsa/ masyarakat menjadi lebih baik/beradab. Pewarisan dan pelestarian budaya pada suatu bangsa dilakukan dengan laku budaya yang disebut pendidikan. Materi pendidikan berwawasan budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam budaya bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu pendidikan yang beretika adalah pendidikan yang berusaha mewariskan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma moral bangsa yang terkandung dalam kebudayaan bangsa tersebut, dan mengmbangkannya untuk keperluan masa depan.

Nilai-nilai dan norma-norma moral bangsa Indonesia terkandung dalam budaya bangsa Indonesia, yang merupakan sari-sari dari kebudayaaan daerah yang harus diwariskan kepada generasi muda bangsa, dilestarikan, serta dikembangkan untuk kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Dengan asas Trikon, kontinyuitas, budaya bangsa dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus karena pada dasarnya nilai-nilai luhur yang dihayati bangsa sekarang ini tidak lain merupakan warisan dari nenek moyang bangsa di masa lalu. Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari warga dunia tidak boleh mengisolasi diri, secara bersama-sama harus ikut membangun peradaban dunia yang lebih maju, menuju masyarakat dunia yang modern. Dengan asas konvergensi Bangsa Indonesia akan mampu bertinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mewujudkan peradaban dunia yang damai, lebih maju dan modern. Dengan asas konsentrisitas, setiap budaya bangsa, termasuk budaya bangsa Indonesia, Dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, budaya-budaya bangsa lain di dunia, tentunya akan terjadi saling mempengaruhi antar budaya bangsa,

dapat terjadi asimilasi diantara budaya-budaya bangsa, terjadi alkulturasi, namun dengan menerapkan asas/strategi konsentrisitas, Bangsa Indonesia akan tetap mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka, luhur budi dan halus budi.

Penting sekali adanya usaha dari bangsa-bangsa di dunia untuk mengupayakan terciptanya etika global yang dapat menjadi acuan dari semua bangsa/ masyarakat dunia dalam mewujudkan dunia yang damai, maju dan nyaman bagi setiap umat manusia. Berikut kutipan dari bagian pengantar "*Declaration Toward a Global Ethic"* yang disarikan oleh Franz-Magnis Suseno(2006: 281-284).

BAB III MODEL PENDIDIKAN

A. Pengertian Model

Briggs (1977:23) menjelaskan bahwa model adalah seperangkat prosedur dan berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Soemarno (2003), dalam konteks terminologi penelitian operasional *(operation research),* secara umum model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abtraksi dari suatu obyek atau situasi aktual. Model melukiskan hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal-balik dalam terminologi sebab akibat. Oleh karena suatu model adalah abstraksi dari realita, maka pada wujudnya lebih sederhana dibandingkan dengan realita yang diwakilinya. Model dapat disebut lengkap apabila mewakili berbagai aspek dari realita yang sedang dikaji.

Simarmata (1983:9) mendefinisikan model sebagai abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya. Model merupakan suatu pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sementara itu Hawking (1993 dan Jones (1987) dalam Sitompul (2003) menyatakan bahwa model berperanan penting dalam pengembangan teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Oleh karena itu ada dua sasaran pokok modeling yaitu (1) untuk memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai hubungan sebab akibat *(cause-effect)* dalam suatu sistem, dan (2) untuk menyediakan interprestasi kualitatif dan kuantitatif yang lebih ba an sistem tersebut.

Menurut Ming-Yang Yang (2005) dalam Widiyanto(2010:91) model adalah suatu deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur atau langkah-langkah dalam mencapai suatu tujuan khusus, dan langkah-langkah tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh

Kelton(1991:5) dan Sudarman(1998:22) bahwa model adalah representasi suatu sistem yang dipandang dapat mewakili sistem yang sesungguhnya.

Pengertian model yang telah dijelaskan diatas dapat dimaknai bahwa suatu model merupakan suatu desain yang menggambarkan bekerjanya suatu sistem dalam bentuk deskripsi atau bagan yang menggambarkan tahapan atau langkah-langkah spesifik yang sekaligus dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan pengembangan keputusan yang valid. Oleh karena itu keabsahan suatu model dapat dipertanggungjawabkan baik secara teori maupun prosedur ilmiah.

Sementara itu Bell,Raiffa, and Tversky(1988) dalam Widiyanto (2010 :94) membagi model menjadi tiga yaitu : (1) *Normative Model*, mengkhususkan pada bagaimana secara rasional memberikan gambaran tujuan, dan hubungan antar fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan. Secara garis besar model normatif merupakan sejumlah jalan yang harus dilalui untuk memaksimalkan kemungkinan untuk mencapai tujuan khusus. Sehingga model normatif dalam pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan situasi, misalnya karena keterbatasan kognisi, waktu, maupun pendanaan; (2) *Descriptive Model,* melukiskan dan menggambarkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah yang lainnya secara aktual; (3) *Prescriptive Model,* yaitu model yang menggambarkan langkah-langkah dengan memberikan kerangka proses pencapaian tujuan. Sedangkan Gati and Asher (2001:203) mengembangkan pembagian model Bell,Raiffa and Tversky tersebut dengan menambahkan satu model lain yang disebut *Predictive Model* (model prediksi) yaitu model yang menarasikan langkah-langkah proses untuk mencapai tujuan, karena model ini masih merupakan konsep yang belum diaplikasikan dalam ujicoba. Namun demikian model ini tetap harus teruji keabsahannya untuk memenuhi standard teori dan ilmiah, yaitu dengan validasi ahli dari sejumlah pakar, pengambil kebijakan, orang yang

terlibat dengan aplikasi, dan bila memungkinkan diseminarkan dalam kalangan yang luas.

Dengan demikian model pendidikan yang beretika dan berbudaya adalah suatu sistem yang berisi berbagai komponen pendidikan yang bekerja secara terpisah tetapi terpadu serta langkah-langkah dalam melaksanakan pendidikan yang beretika dan berbudaya.

B. Struktur Model

Hasil penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2013, mengembukan model pendidikan yang beretika dan berbudaya ditunjukkan seperti gambar 2.1 berikut.

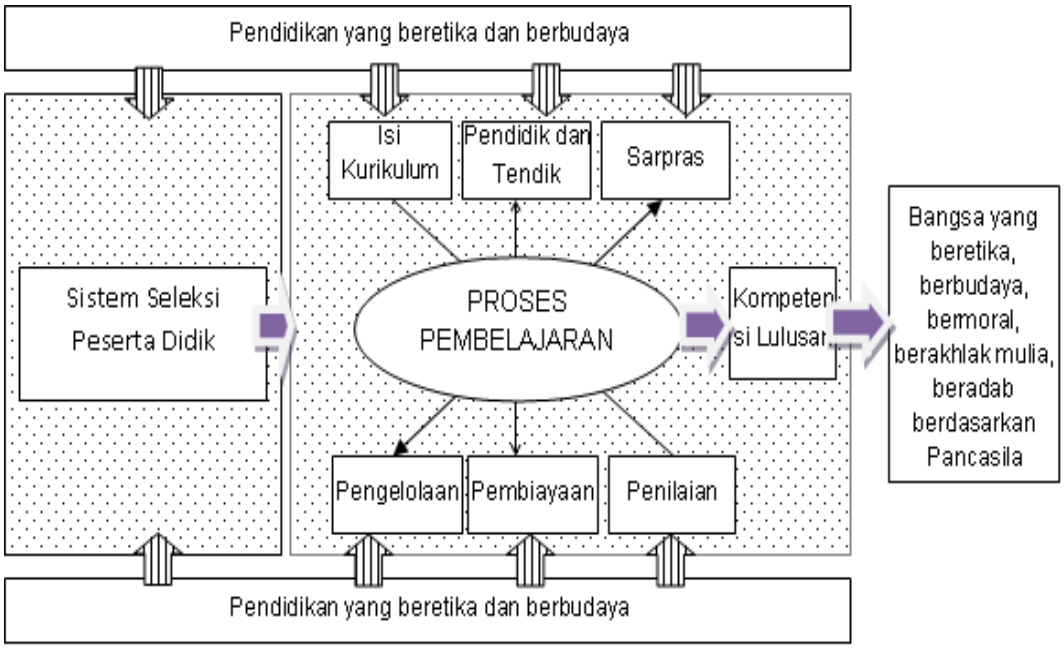

Gambar 3.1 Pendidikan yang beretika dan berbudaya

Model pendidikan beretika dan berbudaya tersebut merupakan model pendidikan yang sistemik dan komprehensif. Sistemik berarti model

pendidikan tersebut, dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah suatu sistem, yaitu adanya input, proses, output, outcome dan feedback yang saling berkaitan. Selanjutnya dalam proses pendidikan, terdapat berbagai komponen pendidikan yang bekerja secara terpisah tetapi terpadu, untuk mencapai tujuan pendidikan. Output pendidikan adalah lulusan yang telah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya outcome pendidikan dalam jangka panjang adalah bangsa yang beretika, berbudaya, bermoral, berakhlak mulia, berkarakter dan beradab berdasarkan Pancasila. Model pendidikan ini merupakan model pendidikan yang komprehensif, karena materi pendidikan yang beretika dan berbudaya diberikan dalam satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, dan terintegrasi pada setiap pelajaran. Selanjutnya secara rinci setiap komponen model tersebut dapat diberikan penje;asan sebagai berikut.

1. Model pendidikan yang beretika dan berbudaya, khusunya yang dilaksanakan dalam pendidikan formal diawali dengan seleksi terhadap murid baru. Seleksi murid baru untuk Sekolah Negeri lebih didasarkan pada pertimbangan etika, moral dan budaya Pancasila, dari pada hasil tes yang bersifat kognitif.

2. Pendidikan yang beretika dan berbudaya harus termuat dalam kurikulum pendidikan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Berbagai model pendidikan afektif, seperti pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter maupun life skill yang materi pembelajarannya terintegrasi dalam setiap pelajaran ternyata kurang efektif. Berdasarkan pengumpulan data disarankan agar materi pembelajaran pendidikan yang beretika, berbudaya dan berkarakter perlu disusun dalam materi pembelajaran yang berdiri sendiri dan terintergrasi dalam setiap pelajaran. Bila pendidikan tersebut berdiri sendiri, maka mata

pelajarannya dapat dinamakan pendidikan berbudaya, atau pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti.

3. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang beretika dan berbudaya, diperlukan pendidik (guru dan konseor), dan tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas yang profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik yang diperlukan dalam pendidikan yang beretika dan berbudaya adalah pendidik yang telah terbukti memiliki pengetahuan dan berperilaku sesuai dengan etika, dan budaya Pancasila, serta memiliki karakter yang menjunjung tinggi bangsa dan negara. Untuk itu maka dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang beretika dan berbudaya perlu ada seleksi, dan pelatihan guru, sehingga menjadi guru yang profesional untuk mengajar pendidikan yang beretika dan berbudaya. Demikian juga hal ini dilakukan untuk kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah dana pengawas perlu diberi pelatihan atau penataran, agar dapat menjadi kepala sekolah dan pengawas yang profesional dalam mengelola pendidikan yang beretika dan berbdaya.

   Untuk meningkatkan efektivitas model pendidikan ini, maka tugas guru mengajar yang 24 jam per minggu tersebut, dikurang 2 jam per minggu, dipergunakan untuk memberikan pendidikan, bimbingan dan pelayanan yang terkait dengan pembentukan karakter, etika dan budaya Pancasila kepada murid yang diwaleni. Kegiatan ini dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus agar tujuan pendidikan yang beretika, berkarakter dan berbudaya dapat tercapai pada gradasi yang tinggi. Untuk kegiatan ini setiap guru diharuskan membuat rencana kerja untuk setiap tahun, yang berisi tujuan, rencana kegiatan, materi kegiatan, metode, dan cara mengevaluasinya.
4. Pendidikan yang beretika dan berbudaya akan terlaksana secara efektif melalui pembiasaan baik di sekolah maupun di rumah. Untuk

itu diperlukan sarana dan prasarana dalam rangka pembetukan etika, budi pekerti dan budaya yang baik. Sarana dan prsarana yang diperlukan adalah, tempat ibadah, kantin kejujuran, ruang belajar dan perpustakaan yang memadai, simbul-simbul etika dan berbudaya yang perlu dipasang di ruang kelas atau lingkungan sekolah, dan CCTV untuk pengawasan terhadap perilaku siswa atau warga sekolah secara umum

5. Pengeloaan pendidikan atau sekolah merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan pendidikan yang beretika dan berbudaya, karena tanpa ada pengelolaan yang baik, pendidikan yang bertika dan berbudaya tidak akan dapat direncanakan, dan dievaluasi. Pendidikan yang beretika dan berbudaya perlu direncanakan secara matang baik materi, sumber-sumber daya pendukung dan proses pembelajarannya. Setelah perencanaan ditetapkan, maka selanjutnya ditetapkan strategi manajemen agar pelaksanaan rencana dapat terlaksana dengan baik. Agar perencanaan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan faktor-faktor pendorong yang kuat, baik melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, guru-guru yang memiliki power ataupu komite sekolah dan masyarakat. Agar pelaksanaan pendidikan yang bertika dan berbudaya tidak menyimpang dari rencana, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang baik dan terus menerus.

6. Dengan adanya pendidikan yang beretika dan berbudaya, maka diperlukan berbagai sumber daya pendukung, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Untuk itu pada tahap awal, diperlukan berbagai tambahan dana untuk pembiayaan dalam pembeliaan sarana dan prasarana, pelatihan guru dan kepala sekolah, serta untuk pemberiaan hadiah dalam perlombaah beretika dan berbudaya baik untuk guru maupun peserta didiknya

7. Perlu dikembangkan sistem penilaian dalam pendidikan yang beretika dan berbudaya yang terpadu dengan pendidikan yang bersifat kognitif. Keputusan untuk naik kelas, dan lulus ujian sekolah atau ujian nasional sebaiknya didasarkan pada nilai sikap, watak, perilaku dan karakter siswa. Sehingga penilaian dalam pendidikan karakter sebagai prasyarat untuk menentukan seseorang siswa itu naik kelas atau lulusan ujian. Artinya walaupun nilai pelajarannya baik, tetapi bila perilaku dan karakter siswa tidak baik, maka tidak akan lulus. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu panduan penilaian dan selanjutnya disosialisasikan agar sistem ini diketahui oleh seluruh guru dan murid. Penelitian terhadap sikap, watak dan perilaku secara dilakukan secara kualitatif dan bersifat individual.

8. Proses pembelajaran dalam pendidikan yang beretika dan berbudaya merupakan inti dari pelaksanaan pendidikan. Dalam proses ini hampir semua komponen standar nasional berinteraksi dan secara langsung maupun tidak langsung meeperti telah dikemukakan proses pembelajaran yang beretika dan berbudaya dapat dilakukan dengan pelajaran tersendiri atau terintgrasi pada setiap pelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan model "PAIKEM" dan bersifat discovery atau inquiry agar peserta didik mampu menemukan dan membentuk jatidirinya sesuai dengan tujuan dari pendidikan karakter, beretika dan berbudaya Pancaisila

9. Dengan pendidikan yang beretika dan berbudaya, diharapkan kompetensi lulusan menjadi utuh, selain kompetensi kognitif dan psikhomotorik, juga kompetensi afektif yang berupa tertatamnnya nilai-nilai karakter, etika dan budaya. Perlu dikembangkan alat-alat ukur yang efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk mengukur tertanamnya nilai-nilai akarakter, etika dan budaya Pancasila pada peserta didik.

Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya, jalan hidup dan keindonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan tercermin dalam sikap pluralisme, kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk menjaga ini semua.

Pesan presiden pertama RI Bung Karno yang menggelorakan tema besar "*nation and character building*" pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (.H. Soemarno Soedarsono, 2009: sampul).

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010) disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai "kemudi" dan kekuatan, sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam proses pembangunan karakter bangsa ini harus difokuskan pada tiga tataran besar: (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan NKRI, dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Udin S. Winataputra, 2010: 1)

BAB IV PENJENJANGAN PENDIDIKAN

Pendidikan karater/ pendidikan watak/ pendidikan budi pekerti/ pendidikan moral harus dilaksanakan sejak anak berada dalam lingkungan keluarga sampai perguruan tinggi, bahkan mengacu pada pendidikan sepanjang hayat, pendidikan karakter masih harus dilajutkan bagi orang dewasa dalam kancah kehidupan masyarakat selama menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif perkembangan dan pelestariannya, kebudayaan adalah merupakan hasil perjuangan manusia, yaitu perjuangan terhadap segala kekuatan alam yang mengelilinginya, dan segala pengaruh 'zaman' atau masyarakatnya, dan pada dasarnya keduanya tidak pernah berhenti untuk saling mempengaruhi yang menyebabkan selalu mengalami perubahan bentuk dan isi kebudayaan di dalam kehidupan manusia. Perkembangan kebudayaan merupakan situasi saling mempengaruhi antara hidup manusia yang berbudi dengan segala pengaruh alam dan jaman, maka kebudayaan seharusnya selalu mengandung sifat-sifat keluhuran dan kehalusan budi, dan seharusnya juga mengandung sifat kemajuan dan menyenangkan, mensejahterakan, dan memudahkan penghidupan manusia.

Porsi bidang pendidikan karakter/budi pekerti sangat dominan pada jenjang pendidikan rendah, dan meningkat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi porsi pendidikan budi pekerti semakin berkurang.

1. Taman Kanak-Kanak harus mengajarkan
   a. Permainan/bermain, olah raga, nyanyian anak-anak, dan seni tari lokal
   b. Nyanyian rakyat, menggambar corak dan warna, ketrampilan lokal seperti menganyam

c. Ceritera-ceritera (dongeng-dongeng) hikayat dari daerah dengan dihubungkan dengan bahasa daerah dan lagu-lagu daerah
d. Pelajaran untuk mengenal lingkungan sekeliling anak, peninjauan ke tempat-tempat musium, taman-taman, tempat-tempat yang unik di sekitar sekolah, yang ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran ilmu alam (IPA), ilmu bumi (giografi), dan ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan.

2. Sekolah Dasar harus mengajarkan:
   a. Olah raga, seni bela diri lokal, seni tari daerah
   b. Nyanyian/lagu-lagu daerah disertai instrumennya, menggambar bakat, mulai diajarkan kesenian nasional, seperti band, tari kontemporer,
   c. Bahasa dan ceritera, kesusasteraan, pengenalan alam daerah, alam Indonesia, dan meluas ke alam asia.
   d. Pengetahuan tentang keadaan bumi (geografi), pengenalan tentang kekayaan alam, sosial.
3. Sekolah menengah harus mengajarkan:
   a. olah raga dan tari merupakan kelanjutan dari pendidikan di sekolah dasar.
   b. Nyanyian/ lagu daerah, menggambar dan seni-seni yang lain ditingkatkan, dan mulai diperkenalkan dengan seni-seni dari luar
   c. Bahasa dan sastra daerah, bahasa dan sastra indonesia, bahasa asing yang menjadi bahasa internasional dalam ilmu pengetahuan dan komunikasi, ceritera-ceritera sastra/dongeng dari negara lain yang memperkaya kekayaan sastra nasional,
   d. Ilmu-ilmu sosiologi, ekonomi, dll.

Pada jenjang pendidikan paling rendah, pendidikan anak usia dini, TK, dan pendidikan dasar anak didik diperkenalkan dan ditanamkan budaya-budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi ciri dalam masyarakat setempat. Materi pelajaran meliputi permainan-

permainan, seni tari, seni suara, seni drama, baca puisi, dll., olah raga, dan ceritera-ceritera kepahlawanan atau dongeng-dongeng yang ada di dalam masyarakat. Cerita-cerita rakyat dan dongeng memang tidak semuanya dapat menjadi bahan untuk membentuk karakter dan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak didik, oleh karena itu pendidik perlu menyeleksinya.

Perkembangan selanjutnya, setelah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak didik diperkenalkan dengan budaya-budaya lain, budaya dari suku bangsa lain, agar mengenal dan memahami persamaan dan perbedaan-perbedaannya. Pengenalan dimaksudkan untuk memperluas wawasan anak didik, memberikan wawasan mengenai ragam budaya yang ada, memahami dan memberikan apresiasi terhadap budaya suku bangsa lain, dan menghargai dan menghayati untuk hidup dalam perbedaan dan keragaman budaya bangsa. Dengan demikian diharapakan dapat menumbuhkan rasa toleran dan dapat menerima keragaman sebagai suatu kenyataan, sehingga dapat menumbuhkan rasa emphati, toleran dan tenggang rasa antar anak didik.

Pembelajaran budi pekerti dan pembentukan karakter dilakukan dalam lingkup kelas sebagai kelanjutan atau perluasan lingkup keluarga dan lingkungan remaja, meningkat pada lingkup sekolah. Pada jenjang pendidikan tinggi anak didik diperkenalkan dengan budaya-budaya asing, budaya dari bangsa negara-negara lain, dengan tujuan untuk memahami secara kritis berbagai budaya yang ada dan yang dihidupi oleh bangsa-bangsa lain di dunia, sebagai bekal mereka berinteraksi dengan masyarakat/bangsa lain manakala mereka dihadapkan pada situasi yang mengharuskan demikian. Mereka juga akan banyak memperoleh informasi mengenai budaya-budaya bangsa lain atau budaya dari negara-negara lain melalui berbagai media, dan kesempatan dalam berinteraksi dengan dunia nyata dalam pergaulan. Dalam keadaan yang telah dewasa, sebagai mahasiswa, anak didik diharapkan telah memiliki ketahanan dan kemampuan untuk menyaring berbagai pengaruh budaya yang

diterimanya, dan memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan menentukan budaya mana saja yang bermanfaat untuk memperkaya wawasan budayanya, dan menolak atau menyingkirkan budaya yang dianggap tidak ada manfaanya atau bahkan akan merusak budayanya sendiri.

A. Peran Keluarga

Sekalipun demikian perlu ditekankan pula bahwa pendidikan yang berwawasan budaya dan etika, pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti tidak akan berhasil baik jika pelaksanannya hanya dilakukan oleh sekolah/pemerintah. Pendidikan budi pekerti harus dimulai dari sejak anak berada dalam lingkungan keluarga, sehingga peran keluarga dalam pendidikan berbudaya dan beretika ini adalah sangat penting. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama dalam mendidik budipekerti bagi anak-anak bangsa. Tanpa peran aktif keluarga, pendidikan yang berwawasan budaya dan etika, pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan karakter pada anak tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan. Keluarga menjadi penanggung jawab pertama dan utama dalam memberikan pendidikan budi pekerti bagi anak, terutama sejak anak berada dalam lingkungan keluarga, mengingat waktu yang dimiliki anak didik banyak dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Pembangunan pendidikan di Indonesia harus berwawasan budaya Indonesia dan beretika. Kebudayaan nasional Indonesia merupakan konsep yang secara terus-menerus berproses mencari bentuk, artinya belum ada bentuk final mengenai apa itu kebudayaan Indonesia. Dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia adalah merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah, yang merupakan sari-sari kebudayaan daerah. Jika kebudayaan daerah berkembang, maka kebudayaan nasional juga akan mengalami perkembangan menuju kondisi yang lebih baik. Sebagai konsekuensi

interaksi dengan kebudayaan-kebudayaan dunia, serta interaksi yang terjadi antar bangsa-bangsa di dunia, maka kebudayaan nasional (Indonesia) akan berproses secara terus-menerus.

Budaya, adat istiadaat, kebiasaan dan praktik-praktik kehidupan bermasyarakat yang baik yang dianut oleh sekelompok warga masyarakat harus dilestarikan dan bahkan dikembangkan dalam pendidikan. Penghayatan terhadap budaya yang baik menjadi wilayah tugas dan kewajiban masyarakat, sekolah dan keluarga untuk melestarikan dan mengembangkannya sebagai kekayaan budaya nasional yang dapat memberikan pembelajaran bagi anak didik di masa yang akan datang.

Tujuan pendidikan berwawasan budaya yang dimaksud adalah pendidikan yang diarahkan untuk menghasilakan lulusan yang berbudaya, yang merupakan manusia yang mampu menguasai diri. Penguasaan diri merupakan tujuan pendidikan budi pekerti, yang disebut keadaban, jadi manusia beradab adalah manusia yang mampu menguasai diri.

B. Peran Pemerintah

Hal yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain di dunia adalah budaya, jalan hidup dan keindonesiaan kita. Ada identitas dan kepribadian yang membuat bangsa Indonesia khas, unggul, dan tidak mudah goyah. Keindonesiaan tercermin dalam sikap pluralisme, kebhinekaan, kekeluargaan, kesatuan, toleransi, sikap moderat, keterbukaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk menjaga ini semua.

Pesan presiden pertama RI Bung Karno yang menggelorakan tema besar "*nation and character building*" pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (.H. Soemarno Soedarsono, 2009: sampul).

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010) disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai ”kemudi” dan kekuatan, sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dalam proses pembangunan karakter bangsa ini harus difokuskan pada tiga tataran besar: (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan NKRI, dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat (Udin S. Winataputra, 2010: 1)

C. Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum)

Setiap kurikulum sekolah selalu memiliki komponen yang tidak dirumuskan dengan jelas dalam bentuk materi pembelajaran, namun mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada anak didik, yang disebut kurikulum tersembunyi *(hidden curriculum*). Bahkan telah sejak lama para pendidik moral (etika) meyakini bahwa kurikulum tersembunyi berpengaruh terhadap perkembangan moral anak didik (Watson, 2014: 289). Kurikulum tersembunyi mewujud dalam sikap dan kedisiplinan pendidik dan komponen lembaga pendidikan yang lain, serta dalam sistem pengelolaan kelas bagi perkembangan moral anak didik. Dalam perspektif ini, pendidik memandang anak didik sebagai mitra dalam pembelajaran dan sosialisasi anak didik itu sendiri.

Dengan berorientasi pada perkembangan anak didik ini, maka semua pembelajaran yang juga mencakup pembelajaran moral harus melibatkan konstruksi suatu makna oleh anak didik yang dibantu oleh interaksi sosial. Semua pembelajaran yang mencakup pembelajaran moral, yang paling baik seharusnya berlangsung dalam suatu komunitas, yang digambarkan sebagai komunitas moral yang peduli dan demokratis (290).

Sosialisasi dan interaksi sosial dalam pengelolaan kelas yang didasarkan pada pemaksaan, sebagaimana yang terjadi dalam kelas-kelas tradisional, lebih mungkin merusak bukannya meningkatkan perkembangan moral anak didik. Interaksi sosial dalam kelas yang dikelola oleh pendidik difokuskan pada membangun kemampuan empati dan motivasi intrinsik untuk belajar kooperatif dengan mengandalkan bimbingan, penjelasan, arahan dan perbaikan sikap mana kala anak didik melakukan perbuatan tidak terpuji, dan bukan memberikan hukuman.

Kohlberg berpendapat bahwa di setiap sekolah ada 'kurikulum tersembunyi' (*hidden curriculum*), yang merupakan sistem norma dan nilai yang mengatur perilaku dan disiplin di sekolah (518). Kohlberg menghendaki bisa mengubah kurikulum tersembunyi ini menjadi kurikulum yang didasarkan pada keadilan dan pemerataan. Agar anak didik mampu memahami dan merasakan keadilan, maka anak didik harus diperlakukan secara adil dan didorong untuk bertindak adil. Pelaksaan konsep inipun dapat dikelompokkan ke dalam wilayah manajemen kelas, yang pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab manajer kelas, yaitu guru. Dengan demikian diharapkan dalam pendidikan yang berwawasan budaya dan beretika, pendidik mampu melaksanakan/mengorganisasikan kelas yang dapat mempromosikan perlakuan adil bagi semua anak didik, dan pendidik harus mampu menjadi teladan dalam memperlakukan secara adil semua anak didik dalam kelas, agar masing-masing anak didik dapat berlaku adil kepada sesama anak didik yang lain.

Model-model interaksi antara warga sekolah, antara pendidik dengan anak didik, antar sesama pendidik, antara pendidik dengan pimpinan sekolah, dan interaksi antara komponen-komponen sekolah yang lain dapat diamati secara langsung oleh anak didik. Anak didik mengobservasi semua kejadian yang disaksikan dalam interaksi komponen-komponen di latar sekolah, kemudian meniru. Oleh karena itu para orang dewasa di dalam lingkungan sekolah harus dapat menjadi teladan bagi anak didik dalam berperilaku, sehingga hasil observasi anak

didik yang akan ditiru merupakan nilai-nilai kebaikan yang sengaja akan ditanamkan kepada mereka. Nilai-nilai ttg disiplin, keadilan, membangun empati, motivasi intrinsik untuk melakukan kebaikan, menekankan kerja sama saling membutuhkan dan saling menghormati, melalui keteladanan dalam memperlakukan anak didk secara adil, disiplin dalam setiap kegiatan, santun dalam bertutur kata, menyukai keindahan keteraturan, ketertiban, dlsb. semuanya yang dilakukan oleh semua komponen sekolah menjadi kurukulum tersembunyi yang dapat mendidik anak mengikuti dan melaksanakannya.

D. Materi Kurikulum Bidang Kognitif

Pendidikan adalah merupakan kegiatan kebudayaan yang bertujuan untuk menyiapkan anak didik untuk menjadi individu yang baik, menjadi warga bangsa/masyarakat yang baik, dan menjadi marga dunia yang baik. Untuk dapat menjadi warga dunia yang baik, maka anak didik harus dipersiapkan dengan materi ajar yang memberikan bekal penguasaan pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan harus memberikan bekal kepada anak didik pengetahuan kognitif yang dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Pengetahuan kognitif anak didik dikembangkan sejak pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, agar setiap individu anak didik dapat menikmati hasil pendidikan intelektualnya secara optimal. Kemampuan intelektual anak didik akan menjadi bekal untuk menjadi warga negara yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan atau kemajuan warga bangsa dan warga dunia. Kemampuan kognitif anak didik harus dikembangakan dalam upaya memberikan bekal penguasaan ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat melalui pengkajian dan penerapan dalam kehidupan manusia. Pengetahuan sain, pengetahuan alam yang menyangkut ilmu-ilmu dasar dan ilmu sosial menjadi muatan kurikulum

yang akan memberikan bekal kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk menguasai dan menerapkannya.

Penguasaan teknologi menjadi sangat penting untuk kesejahteraan manusia terutama ditujukan untuk mempermudah dalam menjalani tugas dan kewajiban kehidupan umat manusia. Teknologi pada dasarnya juga merupakan hasil kebudayaan, sehingga keberadaannya harus bermanfaat dan mempertinggi peradaban manusia. Penguasaan teknologi canggih tidak dibenarkan untuk keperluan-keperluan selain untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, untuk mempertinggi derajad kemanuaiaan. Teknologi diupayakan dikembangkan sedemikian cangggih, tetapi diperlukan pengendalian yang memadai agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merusak alam dan bahkan menghapus peradaban, pembunuhan, untuk merusak lingkungan, kepentingan kriminal, dlsb.

Dengan demikian kurikulum pendidikan berwawasan budaya dan beretika harus memuat mata pelajaran yang mengarah kepada penemuan-penemuan ilmu, pengembangan ilmu dan teknologi, pemanfaatannya dan beserta pengawasannya. Hasil pengembangan ilmu dan teknologi harus disertai etika pemanfataanya, sehingga kurikulum harus memuat kaidah-kaidah benar-salah, etis dan tidak etis, estetis dan tidak estetis. Penguasaan teknologi hendaknya diarahkan untuk penguasaan teknologi yang bermanfaat untuk membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan dan mengatasi masalah-masalah sehari-hari. Penguasaan teknologi modern diajarkan setelah anak didik menguasai teknologi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari, yang sifatnya adalah untuk meningkatkan dari apa yang telah dapat dicapai dengan teknologi sendiri. Jadi pengajaran atau penguasaan teknologi tinggi harus dilakukan setelah anak didik menguasai keterampilan-keterampilan dari teknologi yang digunakan dalam kehidupan keseharian.

BAB V KURIKULUM PENDIDIKAN

Pendidikan berwawasan budaya (berbudaya) dan etika (beretika) memberi arahan bahwa bahan pelajaran (bahan ajar) dan metode atau model pembelajaran yang terangkum dalam kurikulum menuntut lingkungan belajar yang sesuai dengan keadaan diri anak didik, yaitu sesuai dengan perkembangan jiwa dan intelektualitasnya. Sebagai suatu kegiatan kebudayaan, pendidikan harus mampu menuntun anak didik menjadi orang-orang dewasa yang memiliki, menghayati dan menjiwai nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan yang berwawasan budaya dan beretika harus dapat menghasilkan lulusan/manusia yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berjiwa kasih sayang, mencintai sesama dan alam sekitar, serta mencintai keindahan (estetika).

Keadaan anak didik yang dimaksud dalam naskah akademik ini adalah anak Indonesia yang berbudaya dan berkarakter Indonesia, yang mempunyai pola pikir, ucapan dan tingkah laku atau tindakannya dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, berjiwa gotong royong, toleran, menyenangi keindahan dan empati terhadap kehidupan bersama. Adalah tidak dibenarkan jika pendidikan akan menjadikan anak didik terpisah (teraleniasi) dari lingkungan masyarakatnya, dari budayanya, dan dari adat istiadatnya, yaitu budaya Indonesia. Pengajaran harus bersifat kebangsaan, kalau pengajaran bagi anak-anak (Indonesia) tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa (Bangsa Indonesia) dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian menjadi tidak bangga menjadi warga negara Bangsa Indonesia.

Kemajuan ilmu dan teknologi mengakibatkan produk dan budaya manca negara dengan mudah memasuki negara lain. Jika masyarakat, terutama generasi muda tidak dibekali dengan ketahanan budaya yang

memadai, maka mereka akan dengan mudah terpengaruh atau kerasukan budaya asing yang kenyataannya tidak semuanya baik. Budaya asing yang masuk dan diterima hendaknya yang dapat memperkaya budaya bangsa, bukan sebaliknya yang dapat merusak budaya sendiri. Arahan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantata (KHD) kepada bangsa dalam berinteraksi dan menghadapi masuknya budaya asing adalah dengan menerapkan asas *tri kon* (kontinyuitas, konvergen dan konsentris). Pada dasarnya budaya sekarang adalah kelanjutan dari budaya yang dimiliki oleh nenek moyang pada jaman sebelumnya, sehingga dengan asas kontinyu generasi muda berkewajiban untuk meneruskan dan mengembangkan budaya yang telah diterimanya dari para pendahulunya.

Dengan asas konvergen memberikan panduan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat menutup diri dari pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terjadinya interaksi dengan bangsa lain akan menyebabkan pertemuan budaya dengan budaya dari bangsa lain tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari pengarus budaya bangsa lain terutara nilai-nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa sendiri, maka harus dilakukan pemilahan dan pemilihan, nilai-nilai budaya yang sesuai dapat memperkembangkan dan memajukan budaya bangsa Indonesia dapat diterima, sedangkan nilai-nilai budaya yang tidak seduai dan merusak atau merugikan budaya sendiri harus dihilangkan atau ditolak.

Sebagai contoh budaya Pop Jepang *'Anime*' yang pentas di Jakarta pada Festival Anime Festival Asia Indonesia, pada pementasan pertama yang oleh penyelenggara disebut masih tataran 'coba-coba', tetapi pengunjungnya, yang hampir seluruhnya anak-anak muda, mencapai 40.000 orang, sedangkan pada festival ke dua jumlah pengunjung mencapai 53.000 orang hanya dalam tiga hari. Seorang anak perempuan muda sebagai pengunjung mengaku datang menggunakan kostum tokoh karakter Christa (karakter di *manga* atau komik berjudul *Shingeki no Kyojin* atau *Attack on Titan*), sedangkan adiknya memilih memakai kostum karakter Asuna Tanaka, tokoh dalam serial *manga* berjudul *Sword Art On*

Line (Kompas, 16 Agustus 2014: hal 12). Anak-anak muda ini justru tertarik dan menyukai tokoh-tokoh karakter dari cerita yang berasal dari budaya asing, dan dapat dipastikan belum mengenal tokoh-tokoh karakter dari cerita-cerita yang bersumber dari karya-karya budaya bangsa sendiri, baik lokal maupun nasional.

Kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak-puncak dari kebudayaan daerah, yaitu kebudayaan yang mengandung nilai-nilai, norma, etika dan estetika yang terbaik dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Dicontohkan, anak yang tidak menghormati orang tuanya adalah merupakan contoh hasil pendidikan yang salah, yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya *(cultureel-nationaal)* dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk)* yang dapat mengangkat derajad negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.

Pendidikan Nasional Indonesia harus berlandaskan garis hidup Bangsa Indonesia dan Budaya Bangsa Indonesia, dan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah untuk mengangkat derajad Negara dan Rakyat Indonesia agar sederajad dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan posisi yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain, maka Negara dan Rakyat Indonesia dapat bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, bukan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain, untuk membangun peradaban dunia demi kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Berbeda dengan ungkapan yang sering diucapkan oleh para pemimpin, pembangunan bangsa biasanya ditujukan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, tetapi KHD memberikan penekanan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memajukan bangsa agar dapat bekerja sama dengan bangsa lain dalam posisi yang sederajat.

A. Arti Pentingnya/Fungsi Kurikulum

Pembangunan bidang pendidikan menuntut para penentu kebijakan memahami dengan baik kondisi bangsa, potensi-potensi yang tersedia, berbagai kendala atau keterbatasan, potensi gangguan yang ada dan yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang, serta seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dan yang sedang diupayakan untuk menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Berbagai faktor mempengaruhi proses pembangunan pendidikan, baik faktor internal yang berada dalam diri bangsa itu maupun faktor-faktor eksternal lain yang berada di luar, yang terjadi pada bangsa-bangsa lain, yang secara nyata dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang direncanakan. Oleh karena itu penting sekali bagi penentu kebijakan dan penyelenggara pendidikan untuk memahami kondisi aktualnya, dan mengenali berbagai faktor yang memengaruhinya, sehingga dengan demikian akan dapat memilih dan menentukan arah serta tujuan pembangunan pendidikan dan strategi pelaksanaan/pencapaiannya.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembangunan dalam bidang pendidikan adalah tantangan untuk menghadapi globalisasi yang mengalami perubahan yang sangat pesat. Bangsa Indonesia tidak mungkin menutup diri dari pergaulan internasional, dan tidak akan mungkin mampu menangkal berbagai pengaruh perubahan yang terjadi di negara-negara lain sebagai warga dunia. Tujuan pembangunan pendidikan dalam kaitan dengan globalisasi adalah agar bangsa dapat berperan aktif dan dapat bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam memajukan bangsa-bangsa di dunia, membangun peradaban manusia yang menghargai dan meluhurkan harkat dan martabat kemanusiaan (memayu hayuning buwono/manungso), sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara teknis pembangunan pendidikan untuk bangsa juga agar bangsa ini tidak ditinggalkan oleh kemajuan yang dapat berakibat negara ini kebanjiran produk dan bahkan tenaga kerja dari bangsa-bangsa lain.

Dengan demikian maka pembangunan pendidikan harus memiliki sarana berupa kurikulum yang dapat membawa anak didik maju sederajad dengan anak-anak didik di negara-negara lain yang akan mengambil tanggung jawab kepemimpinan pada masa yang akan datang. Dalam perspektif inilah maka kurikulum haruslah mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diberikan kepada anak didik, agar anak didik kelak dapat berinteraksi dengan warga dunia dalam ikut serta membangun peradaban manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Sebagaimana pembangunan bidang-bidang lain, pembangunan bidang pendidikan juga memerlukan perencanaan yang baik agar pelaksanaannya dapat berlangsung efektif dan efisien, dan diperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu perumusan kebijakan mengenai arah dan tujuan yang hendak dicapai secara jelas, yang sangat diperlukan dalam menentukan materi pembelajaran, kompetensi dan jumlah tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran, sarana-prasarana dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kurikulum merupakan salah satu bagian/alat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan mengenai kurikulum dapat memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan pendidikan, bahan-bahan apa saja yang akan disajikan kepada anak didik dalam proses pendidikan, pengalaman belajar apa saja yang akan diperoleh anak didik, strategi pembelajaran apa yang akan dilaksanakan oleh para pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, dan dengan cara apa dan bagaimana anak didik akan diperlakukan dalam proses pembelajarannya.

Kurikulum merupakan peta jalan *(road map)* penyelenggaraan pendidikan untuk merealisasikan keadaan/kondisi yang diinginkan pada diri anak didik. Sebagai peta jalan, kurikulum memuat arah/tujuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar apa saja yang akan diterima atau dialami oleh anak didik selama mengikuti proses pendidikan, bahan yang harus

disajikan dan dikuasai oleh anak didik untuk merealisasikan suatu keadaan yang diinginkan, serta cara bagaimana bahan ajar akan disampaikan atau diajarkan kepada anak didik.

Dengan mengingati dinamika lingkungan dan kondisi aktual bangsa, maka perubahan/pembaharuan kurikulum merupakan kegiatan yang biasa terjadi, bahkan seharusnya dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan yang sedang dan yang akan terjadi dalam lingkungan masyarakat lokal, regional maupun global. Perubahan atau kemajuan suatu masyarakat/bangsa menentukan arah dan tujuan pembangunan bidang pendidikan masyarakat tersebut, dan perubahan tujuan pendidikan merupakan kondisi awal diperlukannya perubahan/pembaharuan kurikulum.

B. Pengertian Kurikulum

Banyak pakar mendefinisikan kurikulum dengan berbagai pandangan masing-masing. Dengan mencermati berbagai pandangan dan pendefinisian yang diperoleh dari para pakan akan diperoleh pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain dari sudut pandang yang para pakar ingin kemukakan.

Gagne memberikan definisi tentang kurikulum sebagai berikut: ‘curriculum is a sequence content units arranged in such a way that the learning of each unit may be accomplished as a single act provided the capabilities described by specific prior units (in the sequence) have already been learned by the learner. (Oliver, 1977). Menurut pandangan Gagne, kurikulum merupakan serangkaian materi pembelajaran yang disusun sedemikain rupa sehingga mempelajari setiap unit sebagai suatu kegiatan yang dapat memberikan kemampuan yang dispesifikasikan oleh unit sebelumnya yang telah dipelajari oleh anak didik.

Stenhousen menyatakan pendapatnya tentang kurikulum sebagai berikut: ‘basically the curriculum is what happens to children in school as a result of what teachers do. It includes all of the experiences of children for

which the school should accept responsibility (Stenhousen, 1984: 2). Menurut Stenhousen, kurikulum mencakup pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada anak didik sebagai tanggung jawab yang diterima sekolah. Kurikulum pada dasarnya adalah apa yang terjadi pada diri anak didik sebagai akibat dari kerja yang dilakukan oleh guru dalam organisasi yang dinamakan sekolah.

Orstein dan Hunkins (2004) menyatakan bahwa 'curriculum is defined as a plan for action or a written document that includes strategies for achieving desired goals or ends. '. . . as a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated'. Selanjutnya dinyatakan bahwa 'curriculum can be defined broadly as dealing with the experiences of the learner'. Jadi yang dimaksud kurikulum, menurut Orstein dan Hunkins, adalah rencana kerja atau dokumen tertulis yang mencakup strategi-strategi untuk mencapai tujan akhir yang diinginkan. Kurikulum merupakan perencanaan untuk memberikan kesempatan pembelajaran bagi mereka yang dididik. Secara luas dinyatakan bahwa kurikulum adalah mengenai atau berkenaan dengan pengalaman-pengalaman untuk anak didik. Dengan cakupannnya yang luas ini maka sesungguhnya kurikulum juga meliputi komponen-komponen yang ada di luar lingkup sekolah, tetapi dirancang sebagai pengalaman belajar bagi anak didik (Orstein dan Hunkins, 2004: 10).

Stepherd dan Ragan memberikan definisi mengenai kurikulum sebagai berikut: 'the curriculum consists of the ongoing experiences of children under the guidance of the school. It represents a special environment … for helping children achieve self-realization through active participation within the school. Dalam definisi ini kurikulum dikaitkan dengan lingkungan tertentu yang berupa pengalaman-pengalaman bagi anak didik di bawah bimbingan sekolah. Pengalaman-pengalaman tersebut mewakili lingkungan tertentu untuk menolong anak didik merealisasikan diri melalui partisipasi aktif dalam sekolah.

Dikatakan oleh Orstein dan Hunkins, perencanaan kurikulum (curriculum design) adalah 'the way we conceptualize the curriculum and arrange its major components (subject matter or content, instructional methods and materials, learner experiences or activities) to provide direction and guidance as we develop the curriculum. (p.18)

Sementara itu dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Thaun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua unsur pokok dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah mengenai rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan unsur kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pengertian tentang kurikulum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Orstein dan Hunkins, yaitu yang mencakup dua unsur pokok sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Pembaharuan/Penggantian Kurikulum

Perubahan kurikulum merupakan kebijakan dalam bidang pendidikan yang harus dilakukan mana kala diyakini ada ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dari kurikulum yang sedang dilaksanakan dengan yang sesunggguhnya diharapkan dari kurikulum tersebut. Tidak ada kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk berbagai latar belakang permasalahan yang dihadapi dan tingkat kemajuan pembangunan suatu bangsa/masyarakat, frilsafat yang dianut, serta tujuan pembangunan yang sedang diperjuangkan. Oleh karena itu diperlukan panduan/pedoman untuk mengambil keputusan/menentukan kebijakan dalam melakukan perubahan atau pembaharuan kurikulum sekolah/lembaga pendidikan. Faktor-faktor yang

menjadi arahan perlunya dilakukan perubahan/pergantian atau pembaharuan kurikulum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan/Keberhasilan Lulusan

Tujuan pendidikkan secara umum adalah untuk menyiapkan anak didik untuk menjalani /memperoleh kehidupan yang bahagia lahir dan batin di dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menentukan atau mencari petunjuk atau indikasi apakah kurikulum yang sedang dilaksanakan telah dapat memberikan hasil sebagaimana diisyaratkan dalam tujuan pendidikan yang telah ditetapkan adalah dengan melakukan kajian secara cermat sejauh mana para lulusan dapat berhasil masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau berhasil dalam jabatan/pekerjaan yang dijalani setelah lulus, atau berhasil dalam kehidupan yang dijalaninya dalam bermasyarakat.

Kajian itu perlu dilakukan oleh sekolah atau pemerintah terhadap para lulusan, dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai (1) pengalaman-pengalaman apa saja yang peroleh/terima dari sekolah yang sangat bermanfaat dalam keberhasilan dalam kehidupan nyata, (2) pengalaman-pengalaman apa saja yang diperoleh di sekolah yang paling tidak bermanfaat dalam kelanjutan studi, kehidupan/profesi, atau kehidupan dalam masyarakat yang dialami oleh para lulusan, dan (3) jika diminta memberikan masukan, tambahan pengalaman atau pengurangan pengalaman/pelajaran apa yang dapat disarankan untuk melakukan perbaikan/perubahan kurikulum agar dapat memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi para anak didik untuk kehidupan setelah lulus atau untuk masa yang akan datang. Pada dasarnya kajian ini merupakan usaha untuk mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan antara apa yang seharusnya diajarkan oleh sekolah kepada anak didik dengan apa yang sesungguhnya terjadi.

2. Disiplin

Dinyatakan oleh Charles Merril (Oliver, 1977: 26): . . . *a class in which the academic content bears no relationship to the needs or the realm of the learners is a breading place for behavior disturbances'.* Sekolah (kelas) yang materi akademiknya tidak menunjang atau tidak ada hubungan dengan kebutuhan atau kenyataan pebelajarnya (anak didik) adalah merupakan tempat penyemaian perilaku '**disturbances'**. Oleh karena itu diperlukan pencermatan secara intensif untuk mengetahui apakah materi pembelajaran yang diperoleh anak didik sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Nilai Standar atau Nilai Acuan

Faktor yang juga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan/pembaharuan kurikulum adalah adanya indikasi bahwa para lulusan tidak dapat mencapai target penguasaan skor/nilai atau kompetensi yang telah ditentukan. Dalam beberapa tahun terakhir ini para pengambil kebijakan dan masyarakat sering membandingkan prestasi anak didik Indonesia dengan siswa-siswa negara-negara lain dalam *Trend in International Mathemathics and Science Study (TIMSS), Program for International Student assesment (PISA), atau Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)*, yang menyajikan hasil pengujian dalam bidang/mata pelajaran matematika, fisika, kimia, atau kemampuan membaca, menulis dan lain sebagainya. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa jika kriteria tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan, maka sejak awal semestinya dicanangkan sebagai bahan acuan untuk menentukan keberhasilan pendidikan melalui penerapan suatu kurikulum. Dengan demikian maka kurikulum perlu didesain sedemikian sehingga mengakomodasi materi-materi yang selaras dengan bahan-bahan untuk menyertakan anak didik dalam program-program pengujian yang setaraf dengan anak didik di negara-negara lain tersebut.

Namun demikian jika sejak awal tidak ada maksud untuk mengikutsertakan anak didik dalam program pengujian melalui TIMSS, PISA, PIRLS ataupun program-program lainnya, maka jika anak didik kurang berhasil dalam mencapai target tertentu dalam model pengujian tersebut adalah sangat mungkin. Apabila nilai standar tertentu akan digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kurikulum, maka seharusnya ditetapkan sejak awal, sehingga kegagalan dan/atau keberhasilannya dapat menjadi acuan dalam melakukan perubahan/perbaikan kurikulum yang sedang dilaksanakan.

4. Tuntutan Masyarakat

Keluhan yang sering muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan pada akhir-akhir ini adalah terjadinya gejala dekadensi moral, dan oleh karena itu diperlukan adanya perbaikan moralitas masyarakat. Ada kesepahaman bahwa perbaikan moral itu harus dilakukan dan dimulai di sekolah yang fungsi utamanya adalah menghasilkan para calon penyelenggara negara di masa datang. Para pengamat pendidikan berpendapat bahwa fenomena yang sedang terjadi dan dirasakan masyarakat sekarang ini adalah merupakan produk atau hasil pendidikan di masa lalu. Tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda dan remaja yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa pendidikan/sekolah tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sebagaimana mestinya.

Kenakalan remaja yang terjadi di tempat-tempat umum, geng motor, perkelaian antar sekelompok pelajar sekolah, penyerangan oleh sekelompok siswa suatu sekolah terhadap siswa sekolah lain, bahkan penyerangan antar kelompok mahasiswa antar perguruan tinggi atau antar fakultas dalam satu perguruan tinggi, pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dan bahkan oleh pendidik adalah fenomena yang sungguh memberikan gambaran nyata mengenai kemerosotan moral anak muda. Korupsi yang terjadi di mana-mana yang

dilakukan oleh para pejabat publik, baik pejabat ekskutif, legislatif maupun yudikatif bukannya berkurang dari tahun ke tahun, tetapi malahan terus bertambah. Para penyelenggara negara yang pada umumnya adalah orang-orang yang memperoleh pendidikan tinggi bergengsi, yang seharusnya dapat menjadi teladan dalam berperilaku baik, justru memberikan contoh perilaku menyimpang dari kebaikan. Terorisme yang menunjukkan kehidupan masyarakat yang tidak toleran dan tidak harmonis, banyak pembunuhan sadis yang tidak dapat diterima dengan nalar, eksploitasi kekayaan alam secara masif yang sesungguhnya telah dijaga dan dipelihara dengan susah payah oleh para nenek moyang bangsa namun sekarang mengalami kerusakan secara besar-besaran. Ketidakdisiplinan masyarakat dalam bernegara, melandanya budaya asing yang masuk secara masif dan tidak sesuai dengan budaya bangsa/masyarakat, dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang dapat menjadi alasan untuk mempertanyakan apa sesungguhnya yang dilakukan sekolah selama ini?

Ini semua yang mengindikasikan perlunya perubahan arah dalam tujuan pembangunan bidang pendidikan, untuk dikembalikan pada akar budaya bangsa yang santun, toleran, berjiwa gotong royong, saling menghormati, menyenangi keindahan, hidup harmonis dengan sesama anak bangsa dan dengan alam, dan sebagai puncaknya tujuan pendidikan adalah untuk memuliakan manusia. Perubahan kurikulum yang dimaksud kemungkinan hanya masalah strategi pelaksanaan proses pembelajaran/pendidikan, tetapi kemungkinan juga harus dilakukan perubahan kurikulumnya secara total.

D. Falsafah Pancasila sebagai Rujukan dalam Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Berbudaya dan Beretika

Kurikulum bukanlah suatu produk sebagai alat pendidikan yang sudah memperoleh bentuk final dan selamanya akan tetap demikian

adanya. Sebagai alat dalam pendidikan, kurikulum akan selalu mengalami perubahan atau peninjauan kembali. Kurikulum menjadi sangat penting untuk selalu dilakukan peninjauan untuk disesuaikan dengan tuntutan jaman (lingkungan) baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal suatu bangsa. Tidak dapat dihindari bahwa pendidikan juga harus memenuhi fungsinya sebagai penyedia manusia-manusia yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan bangsa, melalui penguasaan ilmu dan teknologi yang sangat diperlukan untuk pembangunan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dapat menyebabkan ketertinggalan dalam penguasaannya, sehingga bangsa ini hanya akan menjadi pasar dari ilmu dan teknologi produk dari negara asing. Penggunaan teknologi dari negara asing akan menyebabkan negara ini juga akan dibanjiri oleh tenaga asing.

Dalam pendidikan yang berwawasan budaya dan beretika, materi kurikulum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berbudipekerti luhur, yaitu yang memiliki keluhuran budi dan kehalusan budi. Budi pekerti merupakan buah budinya masyarakat Indonesia, yang merupakan buah dari budi yang matang yang semua baik adanya. Budi dalam budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah jiwa, yang meliputi kekuatan-kekuatan ‘trisakti” yaitu kekuatan pikiran (cipta), kekuatan rasa (perasaan) dan kekuatan karsa (kehendak). Penguasaan ilmu dan teknologi yang tinggi harus didasari oleh penguasaan budi pekerti yang luhur agar pemanfaatan teknologi dapat menjamin untuk kepentingan kemuliaan manusia.

Jiwa manusia memiliki dua sifat, yaitu sifat ‘etik’ dan sifat ‘estetik’ yang berarti ‘baik’ dan ‘indah’. Ki Hajar Dewantara lebih sering dalam tulisan-tulisannya menggunakan kata ‘luhur’ untuk mengganti kata ‘baik’, dan kata ‘halus’ untuk mengganti kata ‘indah’. Penggunaan kata ‘luhur’ sebagai pengganti kata ‘baik’, dan kata ‘halus’ sebagai pengganti kata ‘indah’ untuk menunjukkan pengertian khusus dalam jiwa manusia jika

dibandingkan dengan jiwa makhluk yang lain. Kata ‘etik’ atau etika dapat juga diartikan sebagai ‘ilmu pengetahuan’ tentang kebaikan dalam kehidupan manusia pada umumnya terutama yang berkaitan dengan pikiran, sedangkan estetika diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang kajiannnya berhubungan dengan masalah-masalah keindahan.

Dengan mengutip pendapat Baumgarten (2013: 61) estetika diartikan sebagai ilmu tentang kesempurnaan pandangan panca indera, sedangkan etika disebut sebagai ilmu tentang pemakaian pikiran sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketertibanlah yang menjadi dasar dua sifat tersebut, yaitu etik merupakan ketertiban lahir yang berhubungan dengan masalah etika yang tinjauannya dipandang secara logika, sedangkan ketertiban dari pandangan pancaindera menghasilkan suatu keindahan.

Pembangunan bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh falsafah yang dianut suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Masyarakat terjajah menganut falsafah yang berbeda dengan masyarakat merdeka, masyarakat yang masih terbelakang memiliki pandangan hidup ke depan berbeda dengan masyarakat yang telah maju, negara industri memiliki falsafah yang berbeda pula dengan bangsa yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat agraris, demikian seterusnya.

Falsafah adalah suatu tata nilai suatu masyarakat, atau nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Nasution (1982) menyatakan bahwa filsafat merupakan suatu sistem nilai, pandangan hidup suatu bangsa/masyarakat. Filsafat adalah pendapat yang sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya tentang arti hidup seseorang, dan filsafat inilah yang menentukan kelakuan dan arah hidupnya serta yang menggambarkan apa yang dijunjung tinggi dalam hidup seseorang atau suatu masyarakat itu. Pendidikan yang diberikan berlatar belakang suatu filsafat tidak merupakan serangkaian perbuatan mekanistis yang terlepas-lepas, melainkan suatu usaha yang utuh (holistik) menuju ke arah tertentu. Pendidik dalam lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur

yang dihayati akan selalu bertanya apa yang harus diajarkan, mengapa itu harus diajarkan, untuk tujuan apa diajarkan kepada anak didik yang ditinjau dari sudut filsafat yang dianutnya (Nasution, 1982: 30).

Oleh karena itu langkah pertama dalam pembaharuan/perubahan atau perbaikan kurikulum adalah merumuskan atau menentukan filsafat bangsa atau falsafah yang dianut masyarakat. Nilai-nilai apa saja yang dijunjung tinggi pada masa sekarang dan masa yang akan datang yang tercermin dalam pandangan para pemimpin bangsa atau masyarakat, yang akan ditanamkan pada anak didik sebagai generasi penerus bangsanya. Arah dan tujuan pendidikan, bahan ajar yang harus diberikan, pengalaman-pengalaman belajar yang akan dialami anak didik, dan cara-cara menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik banyak ditentukan oleh filsafat masyarakat itu sendiri. Kurikulum selalu kerkaitan erat dengan filsafat, dan filsafat menentukan tujuan yang akan dicapai dengan alat pendidikan yang disebut kurikulum (Nasution, 1982: 22).

Telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia bahwa falsafah Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara, sekaligus sebagai falsafah dan pandangan hidup (*way of life*) Bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ke lima sila Pancasila merupakan tatanan nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, dan dapat menjadi pedoman dan arahan semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pedoman dan tuntunan bagi Bangsa Indonesia dalam berinteraksi dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam membangun peradaban dunia/kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila telah ada dan dihayati serta dilaksanakan sejak berabad-abad lamanya oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai landasan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pembangunan bangsa Indonesia yang antara lain dilaksanakan melalui pembangunan bidang pendidikan, adalah merupakan suatu usaha kebudayaan untuk membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais, yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berKemanusiaan yang adil dan beradab, demi Persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial. Namun diabaikannya dasar pandangan hidup bangsa Pancasila dalam perubahan sosial yang mengabaikan etika politik telah mengakibatkan kebudayaan turut hancur. Menurut Margaretha Kushendrawati (Kompas, 11 Agustus 2014: hal 12) kehancuran kebudayaan merupakan dampak dari diabaikannya dasar pandangan hidup bangsa Pancasila, dan ini dianggap sebagai kesalahan yang membuat degradasi moralitas bangsa. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila perlu dikembalikan menjadi dasar pandangan hidup berbangsa, kini dianggap sudah saatnya kaum intelektual turut bertanggung jawab menegakkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus menjiwai semua warga negara sebagai hasil pendidikan yang berbudaya dan beretika Indonesia. Oleh karena itu sistem nilai dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus menjadi pedoman, arah dan tujuan pembangunan bangsa melalui pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian maka kurikulum pendidikan untuk pembangunan pendidikan yang berbudaya dan beretika harus mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, dan merupakan kritalisasi dari budaya Indonesia. Pancasila telah terbukti dapat menjadi landasan Negara yang efektif untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk, sehingga bangsa ini tetap utuh sebagai satu bangsa, yang pada jaman dulu menjadi salah satu bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia, yaitu Bangsa Indonesia yang memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945.

E. Materi Kurikulum Pendidikan Berwawasan Budaya Etika

1. Permainan/Bermain

Bermain merupakan kegiatan yang ditujukan untuk rekreasi bagi orang dewasa, sedangkan bagi anak-anak bermain merupakan kegiatan

utama yang menyenangkan. Bahan ajar untuk anak didik taman kanak-kanak dan kelompok bermain yang utama adalah bermain, menggambar bebas, bernyanyi, berolah raga ringan, berbaris dan mendongeng. Permainan dan lagu/nyanyian diambil dan dikembangkan dari kekayaan daerah setempat, lagu-lagu daerah ditambah lagu-lagu nasional terutama lagu-lagu kebangsaan yang dapat mengenalkan kepada anak didik lagu-lagu tersebut, untuk sejak dini menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air.

Dengan menggambar bebas yang dimaksud adalah kegiatan menggambar dengan obyek yang sesuai dengan kesukaan anak didik, terutama obyek-obyek benda atau pemandangan alam yang ada di sekitar lokasi pendidikan. Anak juga diberikan kebebasan untuk berimajinasi mengenai obyek-obyek yang disukai yang merupakan hasil mengabstraksi benda-benda yang diinginkan dan disenangi masing-masing anak.

Permainan anak diambil dan dikembangkanl dari permainan yang terdapat di daerah lokal, baik yang telah ada maupun yang dapat dikembangkan oleh para pendidik. Bahan ajar juga berupa cerita-cerita daerah, dongeng, tambo hikayat dan lain-lain yang dapat ditularkan/disampaikan kepada anak didik yang mengandung pendidikan moral/budi pekerti luhur, sedangkan yang tidak memberikan pendidikan moral yang baik harus dibuang atau disingkirkan.

Menurut Fransiskus Simon (2006: 70), konsep tentang permainan *(play)* sesungguhnya merupakan elemen dasar kebudayaan. Dengan mengutip pendapat Huizinga, Simon menyatakan bahwa permainan telah ada sejak sebelum manusia ada, jadi permainan lebih tua usianya dibandingkan dengan manusia karena sebelum manusia muncul di bumi dalam proses evolusi, binatang dan alam semesta telah selalu hidup dalam irama dan pola bermain. Melalui analisis yang dilakukan kemudian Huizinga menyebut manusia sebagai '*homo ludens*' atau manusia yang bermain.

Permainan adalah merupakan aktivitas manusia yang bersifat bebas, tanpa ada tekanan, mengalir begitu saja, tanpa instruksi. Jika dalam

permainan ada aturan-aturan, aturan-aturan itu tidak menghilangkan kebebasannya, sebab subyek yang bermain memilih sendiri masuk dalam aturan, dan subyek bermain dalam aturan. Dikatakan bahwa permainan merupakan realitas yang melampaui realitas subyek dan mendispensasi jarak antara realitas sesungguhnya dan realitas permainan, antara '*being*, dan '*playing*'. Dalam konteks kebudayaan, permainan menyeret subyek yang bermain dari realitas 'alamiah' ke realitas 'kultural'.

Pieper menganalisis permainan dan mengaitkan permainan dengan pekerjaan intelektual, kontemplasi, kreativitas, inventivitas dan inovasi, dan ciri-ciri inilah yang sangat diharapkan dimiliki oleh anak didik sebagai hasil pendidikan. Pieper berpendapat bahwa permainan dan tindakan kontemplasi dianggap senapas dan serupa. Pada sisi lain menurut Gadamer, permainan merupakan cara mengada atau *'mode of being'*. Bermain, menurut Gadamer, bukan merupakan perilaku tertentu, tanpa hasrat dan tujuan, di mana dalam permainan pemain merasa rileks dan santai, karena pada umumnya melakukan permainan untuk kepentingan rekreasi. Pemain sungguh serius dalam bermain, namun keseriusan ini hanya demi permainan itu sendiri dan mengalir secara alami.

Dalam suatu permainan seorang pemain dapat mengekspresikan, mewujudkan, dan memainkan dirinya dalam keautentikannya. Ketika sedang bermain, semua kedudukan, status, kategori dan segala kepentingan luluh. Permainan dapat mematahkan konseptualisasi, kategorisasi, distingsisasi antara subyek-obyek, primer-sekunder, barat dan timur, dan lain-lain. Maka dengan demikian jika permainan digunakan sebagai paradigma dalam interaksi sosial/kultural, akan diperoleh cara pandang yang menegaskan tentang kesetaraan, sifat mutualistis, dan saling mengakui keberadaan yang lain. (Simon, 2006: 71). Sifat-sifat yang demikian yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak didik untuk menjadi sikap hidup dalam menjalani kehidupan nyata dalam masyarakat, dalam berinteraksi dengan sesama, dan dalam mengakui dan menghargai eksistensi individu lain selain dirinya.

Dinyatakan oleh Simon mengenai paradigma ‘bermain’ dalam korelasinya dengan konsep kebudayaan, bahwa yang pertama, permainan merupakan dasar dan ‘cara berada’ *(mode of being*) kebudayaan, dan kebudayaan dengan segala struktur vertikal-horisontal, konstruksi, interelasi, korelasi dan evolusinya dapat dipahami dari sisi permainan.

2. Pendidikan Budi Pekerti/Karakter/Watak

Pembaharuan pendidikan menuju pendidikan berwawasan budaya dan beretika yang tertuang dalam pembaharuan kurikulum, harus memuat pendidikan karakter/pendidikan budi pekerti/pendidikan moral bagi anak Indonesia, dimulai sejak anak masih kanak-kanak yang kancah pendidikannnya masih berada dalam lingkungan keluarga, dan dilanjutkan dalam pendidikan anak usia dini, serta kemudian dilanjutkan dalam lingkungan sekolah formal mulai dari taman kanak-kanak, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Pendidikan dalam lingkungan keluarga yang menjadi basis (dasar) pendidikan anak usia dini, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan berwawasan budaya dan beretika.

Keluarga merupakan komponen utama dan pertama dalam pendidikan budipekerti bagi anak-anak dalam masing-masing keluarga. Anak-anak dalam pendidikan keluarga merupakan anak yang sedang mengalami masa peka dalam melihat/menyaksikan/ mengobservasi, mencerna, meniru untuk kemudian meneladani perilaku/ucapan/ tindakan yang diterima dari orang-orang di sekitarnya dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat terdekat. Kebiasaan-kebiasaan baik, tutur kata/ucapan-ucapan yang sopan, perilaku/tindakan yang baik, kemandirian dalam melakukan sesuatu yang sangat sederhana, dan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, kebenaran serta tanggung jawab dalam masalah-masalah yang kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat diajarkan/dididikkan/ dibiasakan dalam lingkungan pendidikan dalam keluarga ini. Dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat

terdekat inilah anak didik memulai mengobservasi segala sesuatu yang dijumpainya, kemudian menirunya dalam berperilaku sehari-hari.

Menurut John Dewey (Nels Noddings, 2014: 243) terdapat 2 (dua) makna mengenai pendidikan moral, yaitu makna pertama menekankan pada pendidikan yang secara moral dibenarkan, sehingga dengan acuan makna ini dibutuhkan iklim moral dalam pendidikan. Makna yang kedua menekankan pada penciptaan atau menghasilkan siswa atau lulusan dan warga negara yang bermoral melalui pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan atau warga negara yang bermoral sebagaimana menjadi penekanan pada makna kedua, dapat dilakukan dengan melalui proses pendidikan yang secara moral dibenarkan, sebagaimana yang menjadi penekanan pada makna pertama. Akan sulit dipahami bahwa pendidikan yang tidak dapat dibenarkan secara moral dapat menghasilkan lulusan/orang-orang yang bermoral.

Pendidikan moral yang merupakan bagian dari pendidikan karakter/budi pekerti, fokusnya bukan pada kebaikan dan keburukan anak didik, melainkan diutamakan pada penciptaan atau membangun iklim moral/lingkungan moral untuk memfasilitasi terlaksananya proses terbentuknya moral yang baik bagi anak didik. Membangun iklim atau lingkungan moral bagi anak harus dilaksanakan oleh para pendidik moral, baik orang tua sebagai pendidik utama dan pertama dalam pendidikan informal yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, warga masyarakat/terutama tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan (teladan) warga masyarakat sekitar sebagai pendidik non-formal, dan para pendidik dalam pendidikan formal sebagai agen pendidikan moral dalam wilayah lembaga-lembaga pendidikan formal. Para pendidik moral ini, baik dalam pendidikan informal, formal maupun non-formal memiliki peran yang sangat dominan untuk menghasilkan anak-anak didik atau warga masyarakat yang bermoral.

Tugas penting yang harus ditunaikan oleh seorang pendidik moral yang menekankan pada makna yang pertama, yaitu pendidikan yang

secara moral dibenarkan, adalah menghargai berbagai bakat yang dimiliki atau yang ada dalam diri anak didik dengan mengenalinya ketika bakat-bakat ini muncul. Pendidik yang tidak mengenali bakat-bakat anak didiknya, dan memaksakan kehendaknya kepada anak didik agar anak didik menjadi baik, justru tidak termasuk dalam wilayah penciptaan iklim/lingkungan moral yang baik. Pendidik tidak seharusnya menciptakan suasana atau lingkungan di mana anak didik tidak mungkin melaksanakan kebajikan-kebajikan atau untuk memahami apa sebenarnya kebajikan.

Pengembangan atau penciptaan iklim/suasana atau lingkungan moral dilakukan dalam setiap lingkungan pendidikan, mulai dari lingkungan pendidikan dalam keluarga sebagai lingkungan pendidikan informal, lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan formal maupun lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan nonformal. Lingkungan pendidikan non-formal kancahnya sangat luas dan bervariasi, sejak lingkungan bermain bagi anak-anak, lingkungan organisasi kepemudaan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dalam tingkatan rukun tetangga, rukum warga dan seterusnya sampai tingkat pemerintahan. Dalam semua lingkungan belajar ini perlu diciptakannya lingkungan moral untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran moral bagi anak didik maupun orang dewasa yang dengan pengalaman-pengalaman dalam lingkungan moral ini dapat meningkatkan kebaikan moralitasnya.

Dengan menjalani kehidupan dalam lingkungan moral dalam masyarakat melalui pengalaman hidup sehari-hari, maka sesungguhnya telah terlaksana pula pendidikan sepanjang hayat bagi setiap individu. Sebagaimana dinyatakan oleh Panca Dahana bahwa yang disebut pendidikan adalah proses membudayakan atau melakukan transmisi kultural antara seorang yang lebih, yang lebih tahu, lebih kuasa, lebih tua dan lebih dipercaya kepada mereka yang ‘tidak lebih’ atau kurang, dalam latar pendidikan adalah antara pengajar kepada siswa ajar. Dengan penalaran sederhana ini maka pendidikan dalam arti formal atau pengajaran dalam makna yang luas adalah sebuah kerja yang tak akan

pernah selesai, juga tidak memiliki yurisdiksi material atau fisikawi. Siapapun yang berada dalam tanggung jawab ‘pembudayaan’ (pendidikan dan pengajaran) adalah seseorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri.

Pendidikan untuk meningkatkan moralitas dalam lingkungan moral dalam masyarakat dapat dialami oleh semua orang, sehingga siapa saja dapat memperoleh pengalaman-pengalaman moral melalui pengalaman hidup sehari-hari dalam lingkungan moral yang tercipta dalam masyarakat. Iklim atau lingkungan dalam keluarga, iklim sekolah dan iklim dalam lingkungan masyarkat yang bermoral dapat mengurangi persaingan yang tidak sehat. Anak didik tidak dilarang untuk bersaing atau berkompetisi, karena larangan ini tidak realistik dan bahkan kompetisi dapat meningkatkan usaha/kerja keras/motivasi untuk berkembang /maju secara cepat, tetapi kompetisi haruslah tetap menjadi kegiatan yang menyenangkan, baik bagi yang menang maupun bagi yang belum beruntung.

Dalam kompetisi tidak boleh menghilangkan aspek yang menyenangkan. Jika anak didik melihat temannya sukses harus tetap senang, sedangkan yang kurang beruntung tidak boleh menganggap kesuksesan pemenangnya sebagai kegagalan bagi dirinya. Jika keberhasilan seorang anak didik dalam memenangkan kompetisi dimaknai sebagai kegagalan anak didik yang lain, maka kompetisi ini menjadi kompetisi yang tidak sehat. Situasi demikian inilah yang menyebabkan suasana persaingan yang sesungguhnya hanya boleh terjadi dalam suatu latar tertentu, akan terbawa ke dalam latar yang lain, dari dalam kelas dibawa sampai di luar kelas, dari arena olah raga dibawa sampai ke dalam lingkungan pergaulan di luar arena, dan seterusnya.

Demikian juga jika kompetisi dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas ternyata mendorong anak didik untuk melakukan perbuatan curang, melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar norma yang berlaku, dan lainnya maka ini termasuk kompetisi yang tidak

sehat, dan oleh karena itu harus dihindari. Pendidik tidak harus menekankan kompetisi untuk mencapai atau meraih nilai hasil ujian yang setinggi-tingginya, tetapi menghilangkan/mengabaikan kesenangan dalam belajar, atau mendorong anak-anak didik atau orang tuanya, atau bahkan para pendidiknya melakukan kecurangan.

Ada gejala di sekolah-sekolah yang menuntut anak didiknya mencapai nilai yang tingi menyebabkan anak didik, orang tuanya bahkan para pendidik dan kepala sekolah atau manajemen sekolah melakukan tindakan yang tidak bermoral dengan melakukan kecurangan. Dengan berbagai cara para orang tua yang ingin anak-anak mereka berhasil memperoleh nilai tinggi lalu berupaya mempengaruhi proses pembelajaran dengan membeli soal-soal ujian, para guru yang takut dianggap gagal mencapai target nilai bagi para anak didiknya lalu melakukan kecurangan dengan membantu anak didik mereka dalam mengerjakan soal-soal ujian, dan kepala sekolah yang takut dikatakan gagal mencapai target kelulusan juga melakukan kecurangan dengan mencari soal-soal ujian dengan cara yang tidak dibenarkan secara moral dalam upaya mencapai target kepemimpinannnya. Perilaku yang tidak bermoral ini harus dihindari dengan penciptaan lingkungan dan suasana moral yang baik bagi anak didik, baik dalam lingkungan keluarga, lengkungan bermain/ masyarakat, lingkungan dalam kelas, dan lingkungan sekolah yang lebih luas.

Kepala sekolah, para guru/pendidik dan orang tua yang seharusnya mencipta lingkungan moral yang baik agar anak didik menjadi warga negara atau warga masyarakat yang bermoral malah mensponsori mencipta lingkungan yang tidak bermoral. Dalam lingkungan yang demikian maka tidak dapat diharapkan akan dihasilkan lulusan atau warga negara yang bermoral, karena lingkungan pendidikannnya secara moral tidak dibenarkan. Anak didik yang dapat mencapai prestasi akademik tinggi dengan berbagai bantuan yang tidak bermoral ini pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang menghalalkan cara-cara yang tidak bermoral dalam memperjuangkan kepentingannya ketika mereka telah memasuki

kehidupan dalam masyarakat. Kenyataan ini akan sangat merugikan masyarakat jika mereka menduduki jabatan-jabatan tinggi, jabatan penting dan posisi-posisi strategis lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Menghadapi situasi yang sulit dapat mengakibatkan anak Muncul pula gejala di mana sekelompok anak didik melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji secara bersama-sama, yang sering disebut sebagai heroisme moral. Kebersamaan diantara sesama anak didik kadang kala menjadikan mereka melakukan kesalahan secara bersama, namun mereka menyebutnya sebagai heroisme moral. Hal ini tercermin dalam kejadian-kejadian perkelaian antara kelompok pelajar, pengeroyokan, dan penyerangan secara bersama-sama terhadap kelompok pelajar yang lain. Mereka merasakan bahwa situasi saat mereka melakukan tindakan tidak bermoral seperti perkelaian, pengeroyokan atau penyerangan, menurut mereka karena mereka harus solider dengan sesama teman yang lain karena takut disingkirkan, takut dikatakan tidak kerja sama, takut dijauhi teman-teman yang lain, bahkan takut karena mereka sendiri akan menjadi korban, takut dikatakan anak yang lemah atau bodoh, dan lain sebagainya. Anak-anak sesungguhnya takut menjadi pelaku sebagaimana mereka juga takut menjadi kurban, mereka ingin menjadi baik tetapi mereka menghadapi atau berada pada situasi yang sulit.

Lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) dalam tingkatan apapun harus selalu mengupayakan penciptaan lingkungan moral yang baik. Lingkunan moral yang dapat diciptakan dalam lingkup sekolah, dan lebih sempit dalam lingkungan kelas, adalah dengan cara guru menghargai semua potensi yang dimiliki oleh anak didik dalam kelas, memfasilitasi berkembangnya setiap potensi yang diidentifikasi dimiliki oleh masing-masing anak didik, dan mengembangkan atau membangun hubungan yang harmonis bagi semua anak didik dalam kelas untuk menghargai potensi anak didik lain, seraya membangun kerja sama diantara anak didik untuk

menghilangkan sikap-sikap dan perilaku individualistis yang mengimplikasikan persaingan/kompetisi yang tidak sehat.

Membangun lingkungan moral dalam kelas/sekolah menuntut guru dan staf sekolah yang lain menguasai kemampuan di luar penguasaan materi pengajaran yang harus diajarkan kepada anak didik. Guru harus mampu menghargai bakat-bakat yang dimiliki oleh anak didik dengan mengenalinya pada saat bakat itu muncul dan mengingatkan/meminta anak didik untuk melakukan hal yang sama. Guru harus peduli terhadap bakat-bakat yang muncul pada anak didik tersebut, selanjutnya berupaya memfasilitasi berkembangnya bakat-bakat tersebut, yang menuntut guru untuk mengembangkan kompetensinya di luar kopetensi dasar yang berkaitan dengan bidang pelajaran yang dikuasainya. Guru perlu menjadi pebelajar sepanjang hayat dengan mengejar kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk peduli pada bakat-bakat yang mungcul pada anak didik.

3. Materi Pendidikan Karakter

Karakter sering juga dipersamakan dengan watak yang dimiliki oleh seseorang, dan jika dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian digeneralisasikan pada masyarakatnya, kemudian dikatakan atau disebut sebagai karakter bangsa (Zamroni, 2011: 160). Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran guna mengembangkan kepribadian yang mengaitkan antara moralitas pendidikan dengan berbagai aspek pribadi dan sosial anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka pendidikan karakter berkaitan dengan pedoman hidup sehari-hari bagi anak didik yang diperlukan dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapi dalam bermasyarakat.

Karena cakupan pendidikan karakter demikian luas, UNESCO telah menetapkan enam dimensi karakter yang bersifat universal, yang berarti keenam dimensi ini diakui sebagai dimensi pokok yang ada dalam karakter bangsa apapun di dunia. Keenam dimensi karakter tersebut adalah

trustworthiness, *respect, responsibility, fairness, caring dan citizenship.* Yang dimaksud dengan dimensi *trustworthiness* adalah dimensi sejauh mana seseorang dapat dipercaya, yang menyangkut watak seseorang dalam kejujuran, integritas, loyalitas, dan reliabilitas. Dimensi kedua, yaitu *respect*, menunjukkan watak seseorang yang dapat menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang yang disandangnya, latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan yang lain, toleran terhadap orang lain, keyakinan lain, pendapat yang berbeda dan lain sebagainya, dan mudah menerima orang lain secara tulus.

Dimensi ketiga dari karakter adalah *responsibility*, yaitu watak yang dimiliki seseorang yang menunjukkan keberaniannya untuk mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan, tidak melempar atau membebankan tanggung jawab atas perbuatannya kepada orang lain, atau bawahan, jika dalam posisi sebagai pemimpin. Dimensi keempat, yaitu *fairness* adalah watak yang dimiliki oleh seseorang yang menunjukkan sifat adil terhadap sesama/orang lain, memperlakukan orang lain secara adil tidak dipengaruhi oleh sikap dan perasaan yang sedang dirasakan atau yang sedang berkecamuk dalam dirinya.

Dimensi kelima yaitu *caring,* yang dimaksud adalah sifat atau watak yang dapat menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Orang yang '*care'* adalah orang yang menunjukkan kehalusan budi dan perasaan jika mengetahui atau menghadapi situasi di mana orang lain mengalami masalah ataupun penderitaan. Ia ikut merasakan dan berempati terhadap penderitaan orang lain dan dapat menggerakkan hatinya untuk secara ikhlas mau membantu mengatasi masalah yang sedang diderita orang lain tersebut. Sedangkan dimensi keenam dalam karakter adalah *citizenship*, yaitu watak yang dimiliki seseorang yang dapat menunjukkan ciri sebagai warga negara yang baik. Indikasi yang dapat menunjukkan watak sebagai warga negara yang baik adalah kepatuhan dan ketaatan seseorang kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam masyarakat atau negara. Kepatuhan dan ketaatan ini dihayati dan selanjutnya melakukan

segala upaya untuk memenuhi tuntutan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara sadar dan ikhlas hati.

Pemerintah Indonesia (Zamroni, 2011: 168) telah merumuskan materi pendidikan karakter mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Religiussitas: yaitu sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
b. Kejujuran: yaitu perilaku yang menunjukkan diri seseorang dapat dipercaya dalam ucapan dan tindakan.
c. Toleransi: yaitu sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan yang berbeda dari dirinya.
d. kedisiplinan: yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
e. Kerja keras: yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, misalnya belajar, kerja, tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
f. Kreatifitas: yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan cara dalam menangani pekerjaan atau mengatasi masalah.
g. Kemandirian: yaitu sikap dan perilaku yang tidak (mudah) tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah.
h. Demokratis: yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan ciri memberikan persamaan hak dan kewajiban antara dirinya dengan orang lain.
i. Rasa Ingin Tahu: yaitu sikap dan perilaku yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih luas dan lebih dalam dari apa yang telah diketahui, dilihat, dipelajari atau didengar.
j. Semangat Kebangsaan: yaitu cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

k. Rasa Cinta Tanah Air: yaitu cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan phisik, social, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.
l. Menghargai Prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
m. Bersahabat dan Komunikatif: yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa senang bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.
n. Rasa Cinta Damai: yaitu sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
o. Gemar Membaca: yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan baginya.
p. Kepedulian Lingkungan: yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar nya, dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi.
q. Kepedulian Sosial: yaitu sikap dan tindakan yang selalau ingin memberi bangtuan orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
r. Tanggung Jawab: yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan pelaksanaan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingklungan (alam, social dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

4. Pendidikan Etika Sebagai Bagian Pendidikan Karakter

Kenneth A. Strike mengemukakan pandangannya bahwa jika anak-anak ingin menjadi warga negara yang baik, dan jika mereka ingin memperoleh konsepsi yang terpuji tentang kebaikan, mereka harus diperkenalkan ke dalam komunitas yang berfungsi sebagai penjaga dan

pemancar norma yang mempromosikan keadilan dan konsepsi yang terpuji tentang kebaikan. Jika komunitas ingin berhasil dalam tugas mengkomunikasikan norma-norma tersebut, mereka harus cukup kuat untuk memberikan dukungan otoritatif pada norma-norma ini.

Dikatakan oleh Strike bahwa pendidikan moral melibatkan dukungan otoritatif pada norma. Norma diidentikan dengan ‘aturan, atau ‘standar penilaian’. Norma mengatur praktek dan penilaian sehubungan dengan beberapa wilayah perilaku dan tindakan manusia. Dicontohkan pengendara yang berhenti pada saat lampu pengatur lalu lintas merah menyala adalah norma. Apa yang menjadikan norma adalah ketentuan. Norma adalah apa yang memungkinkan masyarakat dapat mengenali keunggulan atau kebodohan, membedakan benar atau salah, dan membedakan kecantikan dari kejelekan. Penerapan norma bisa sangat tergantung pada konteks, tetapi mungkin juga tidak.

Norma adalah yang paling penting bagi etika (Strike, 2014: 181). Norma sering tertanam dalam diri seseorang atau masyarakat tanpa disadari, yang dapat membentuk kepekaan dan perasaan moral. Pelanggaran norma biasanya akan menimbulkan perasaan tertentu, mungkin merasa bersalah bagi orang yang melanggar norma tersebut, atau merasa malu sehingga merasa perlu untuk meminta maaf, mungkin merasa terhina bagi orang yang diperlakukan kasar oleh orang lain yang melanggar norma, atau orang mungkin bisa marah jika ada orang lain yang melanggar norma, atau jika orang berpakaian tidak pantas atau melanggar norma tertentu mungkin orang tersebut akan merasa buruk, tidak pantas, dan lain sebagainya.

Orang-orang yang memahami dan menghayati serta menjunjung tinggi norma-norma kebaikan, kejujuran, kebenaran, akan merasa malu, merasa bersalah, merasa tidak pantas bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat jika melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar norma. Orang menjadi merasa malu atau merasa bersalah jika melakukan ketidakjujuran, ketidakbenaran, atau ketidakbaikan menurut standar norma

yang berlaku dalam masyarakat. Bahkan orang bisa menjadi merasa berdosa jika berkata-kata, melakukan perbuatan, memikirkan sesuatu yang melanggar norma/aturan agama (misalnya). Dengan demikian standar etika yang tercermin dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu sesungguhnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti korupsi, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan seterusnya.

Oleh karena itu dalam pembelajaran yang beretika diperlukan adanya normasi (penormaan), yaitu pemahaman dan penghayatan, serta internalisasi norma yang berlaku dalam masyarakat. Normasi (*normation)* membentuk persepsi, menghasilkan perasaan, dan mengubah karakter. Normasi (internalisasi peraturan) dan pembiasaan berperilaku baik sangat penting untuk pembentukan karakter. Jika peraturan yang telah disepakati dihayati bersama, dinternalisasi oleh setiap warga masyarakat, dan kemudian ditaati secara ikhlas hati, maka akan dapat membentuk orang-orang sebagai warga masyarakat yang memiliki karakter baik.

Normasi (*normation*) mengandung sifat/pengertian transformatif, artinya; ketika seseorang menyerap norma-norma yang diterima, orang tersebut akan melihat dunia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya, orang tersebut memiliki perasaan yang berbeda, akibatnya orang tersebut cenderung akan berperilaku berbeda, dan akan menjadi orang yang berbeda. Oleh karena itu normasi dan pembiasaan merupakan aspek yang sangat penting untuk pembentukan karakter seseorang ataau sekelompok orang. Orang jujur adalah orang yang tidak hanya kejujurannnya telah menjadi kebiasaan, tetapi orang yang jujur adalah juga orang yang menjalani kehidupannya dengan cara tertentu dan memiliki berbagai perasaan mengenai perilaku tidak jujur.

Dalam pendidikan, pendidikan akademik, bidang seni, olah raga, kerajinan, dan pekerjaan merupakan kegiatan praktik. Praktik selalu melibatkan norma, dan oleh karena itu melibatkan normasi atau memahami dan menghayati norma-norma yang ada dalam bidang-bidang tersebut.

Dalam pekerjaan juga melibatkan normasi, yaitu pemahanan dan penghayatan norma-norma yang berlaku dalam kinerja. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan harus memahami dan menghayati apa standar kinerja yang unggul, kinerja yang baik. Dengan memahami dan menghayati norma kinerja yang baik, maka seorang pekerja akan bekerja mengikuti norma yang dihayatinya. Jika melanggar norma, misalnya bekerja tidak serius, atau melakukan kecurangan dalam pekerjaan, maka orang tersebut akan merasa bersalah, merasa malu, dan jika kemudian diberi sangsi maka akan dapat menerima sanksi itu dengan kesadaran dan rasa iklhas.

Jika seorang anak didik belajar tidak serius, mengerjakan tugas dengan tidak jujur, misalnya meminta bantuan orang lain, atau menyontek, mereka akan merasa bersalah, merasa telah menipu sehingga merasa malu, dan mungkin bisa merasa tidak puas atas hasil yang diperoleh karena bukan dari usahanya sendiri. Jika kemampuan ini dapat ditanamkan pada diri anak didik secara baik, maka akan dapat dihasilkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi etika yang berlaku dalam sekolah dan masyarakat, malu berperilaku menyimpang, malu melanggar perauran, dan lain sebagainya. Setelah dari selesai sekolah dan memasuki dunia nyata dalam kehidupan masyarakat, bekerja dalam instansi, maka anak-anak ini akan menjadi agen-agen moral yang menjadi teladan bagi warga dan masyarakat dalam lingkungannya.

Dalam bidang pendidikan mata pelajaraan dapat menjadi sumber-sumber potensial norma yang harus dikuasai dan dihayati oleh para pendidik dan anak didik, serta komponen lain dalam suatu lembaga pendidikan/sekolah. Dalam berbagai bidang akademik, norma (mata pelajaran) praktik mencakup standar etika, estetika, dan argumentasi yang benar. Seorang peneliti yang telah menguasai metodologi penelitian yang baik akan selalu konsisten dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Jika kemudian peneliti itu mau mengubah atau mendistorsi data yang diperoleh dari penelitiannya, kemudian mengambil kesimpulan lain yang tidak sejalan dengan data demi kepentingan lain, maka dikatakan

bahwa peneliti tersebut telah gagal menginternalisasi norma-norma atau gagal menormasi norma-norma yang berlaku dalam bidang penelitian ilmiah yang dilakukannya, dan ini dapat dikatakan telah melanggar etika. Internalisasi norma ilmiah yang baik akan dapat mencegah perilaku untuk berbuat menyimpang dari kaidah ilmiah yang seharusnya ditaati, sehingga ketika ada bujukan/godaan untuk menyimpangkan karya ilmiahnya, peneliti dapat segera mencegah dirinya. Atau ketika kemudian benar-benar telah dilakukan penyimpangan, dan pada akhirnya memperoleh sanksi, maka akan menjadi sadar akan pelanggaran etika yang telah dilakukan.

Praktik memerlukan pengajaran otentik, yaitu pengajaran yang bertujuan untuk normasi, dengan demikian pengajaran otentik harus mencakup pendidikan moral. Dicontohkan oleh McIntyre (hal: 185) siswa yang belajar biologi harus tahu lebih banyak dari apa yang dipercaya ahli biologi tentang dunia kehidupan. Siswa yang belajar biologi harus mulai melihat, memahami, dan menginternalisasi keunggulan yang membentuk biologi, kemudian harus mengetahui fakta-fakta dan teori-teori dan menguasai teknik/metode penelitian biologi, selanjutnya siswa harus menginternalisasi kepedulian pada tujuan ilmu biologi dan membuat standar argumen yang baik sesuai dengan standar ilmu biologi. Pendidikan moral yang tercakup dalam praktik harus melibatkan internalisasi tujuan yang terpuji dan keluhuran, melibatkan internalisasi komitmen pada kebenaran, kejujuran, dan integritas, yang kemudian membentuk karakter.

5. Materi Kurikulum Bidang Seni/Budaya

Bidang seni lebih banyak mencakup norma-norma keindahan, yang nampak pada sebutan seperti seni yang unggul, seni yang baik, seni yang *adhi-luhung* (indah), seni yang indah, dan sebutan-sebutan lainnya. Bahkan olah raga bela diri yang mengesankan dan menonjolkan kekuatan phisik dan menampilkan kekerasanpun mengandung seni dalam gerakan-gerakan yang ditampilkan oleh pelaku seni bela diri itu. Siapapun yang terlibat dalam melakukan kegiatan seni harus memahami dan menghayati

norma-norma yang berlaku dan melekat pada seni-seni itu, sehingga mereka dapat memberikan penilaian mana seni yang baik, yang indah, yang *adhi-luhung*, supaya mereka dapat berkesenian dengan menampilkan seni suara, seni panggung, seni sastra, seni bela diri, dan seni-seni yang lain, yang menunjukkan ciri keindahan (estetika) yang tinggi. Norma-norma estetika ini dapat ditemukan dalam seni-seni itu sendiri yang dapat menjadi dalam memberikan penilaian mengenai indah dan tidaknya dalam berkesenian.

Kesenian merupakan sebagian dari kebudayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat dan sangat berhubungan dengan jiwa dan perasaan manusia, oleh karena itu seni dapat tertanam lebih dalam dalam jiwa manusia. Banyak kesenian-kesenian daerah yang merupakan kekayaan budaya dari suku-suku bangsa Indonesia yang memiliki sifat indah, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan. Dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, jika sekarang kebudayaan daerah tidak boleh dipelajari, niscayalah tak akan ada kebudayaan, maka putuslah garis kebudayaan kebangsaan, boleh jadi rakyat kita akan tertarik oleh kebudayaan asing. Ini artinya asas kontinyuitas dalam kebudayaan tidak terjadi atau terlaksana dengan baik.

Kesenian merupakan sebagian dari kebudayaan (KHD, 2013: 189) yang muncul dan berkembang menurut perkembangan jiwa dan perasaan manusia. Seni tertanam lebih dalam merasuk ke dalam jiwa manusia dibandingkan kebudayaan lainnya. Oleh karena itu membentuk watak/karakter manusia/anak didik akan sangat penting melibatkan/memasukkan bidang seni/kesenian sebagai materi pembelajaran. Seni musik dapat membantu mengasah jiwa, menghaluskan perasaan, dan membantu manusia untuk menghayati suatu peristiwa-peristiwa kehidupan yang dialaminya. Peristiwa sedih dapat dihayati dengan bantuan mendengarkan musik-musik yang bernada sedih, dan

demikian juga sebaliknya dalam menghayati peristiwa perayaan keberhasilan atau kegembiraan.

Tamansiswa pernah menganjurkan pentingnya bagi para ahli kebudayaan untuk mengajarkan seni musik lokal (daerah) (Gending Jawa bagi masyarakat Jawa) bagi para pemuda, dan musik-musik lokal/daerah yang lain kepada pemuda-pemuda daerah masing-masing. Seni musik lokal selain dapat memberikan pengaruh untuk membuka rasa kebatinan, yang disebutnya sebagai rasa keagamaan, juga dapat mengasah atau mempertajam budi (membentuk watak), yang berdasarkan tajamnya cipta (pikiran), halusnya rasa (perasaan) dan kuatnya karsa (kemauan/motivasi) para anak muda. Seni, khususnya seni musik (musik daerah/lokal) yang indah dapat menjadi kekayaan budaya bangsa dan menjadi kebanggaan dan kemurnian rasa kebangsaan (KHD, 2013: 174).

Menurut Ki Hajar Dewantara musik lokal Jawa (gendhing) dapat menumbuhkan rasa kebatinan (mempertajam rasa batin) karena selalu dapat menuntun ke arah rasa (perasaan mistis) seperti harmonis, patut, tetap tegar, bersungguh-sungguh, setia, dsb, dan menghidupkan rasa keindahan (estetika) seperti “edi, peni, resik, endah, alus, luhur.

Pendidikan bagi anak bangsa atau generasi muda bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budaya bangsanya. Oleh karena itu sangat penting sejak awal anak-anak didik bangsa ini diperkenalkan dengan budaya daerahnya masing-masing. Budaya daerah merupakan modal dan pangkal atau titik awal atau landasan dalam mendidik anak, dalam mengembangkan jiwa dan raga, intelektualitas, dan budi pekerti anak didik. Nasution (hal: 125) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tidak boleh lepas dari masyarakat. Pengajaran nasional itulah pengajaraan yang selaras dengan penghidupan *(maatschappelijk)* dan kehidupan bangsa *(cultureel)*. Jika anak-anak tidak dididik didasarkan pada kenasionalan Indonesia, anak-anak tidak mengenal dengan baik bangsa dan budayanya, tidak mungkin anak-anak memiliki rasa cinta bangsanya, dan makin lama akan makin terpisah dari bangsanya. Anak yang sejak kecil dibiasakan

dengan menggunakan bahasa asing dan dijauhkan dari bahasanya sendiri, anak ini akan kehilangan hubungan batin dengan orang tuanya dan orang-orang disekitarnya, dan kelak perasaan terhadap bangsanya juga akan menjadi terasing (KHD, 2011: 11)

Karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai wilayah yang mempunyai latar belakang suku, budaya dan agama yang berbeda-beda, maka sekolah-sekolah setempat hendaknya diberikan kebebasan sampai batas-batas tertentu untuk menentukan kurikulum sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakatnya. Banyak budaya-budaya daerah yang sangat baik dan dengan demikian sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk kepentingan anak didik agar tidak kehilangan jati diri bangsanya, yang dapat dijadikan sebagai dasar membentuk manusia yang beradab, berketuhanan, berperikemanusiaan, yang membina persatuan antar suku bangsa menjadi sebangsa dan setanah air, memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama anak bangsa.

Kebudayaan (*culture)* sering hanya diberikan makna atau diartikan secara sempit sesuatu tyang berhubungan dengan seni, tetapi dalam pendidikan yang berwawasan budaya dan etika yang dimaksud kebudayaan mencakup bukan hanya seni, tetapi juga adat-istiadat dan berbagai macam kearifan lokal *(local wisdom)* yang telah mengakar sejak lama dan telah terbukti menjadi tuntunan/wahana dan instrumen setiap suku bangsa dalam menjalani kehidupan, menjadi rujukan dalam mengambil keputusan, dan memecahkan masalah-masalah lokal kemasyarakatan.

Sebagai contoh bagaimana masyarakat suku Dayak di Kalimantan menghayati dan mempraktikan kehidupan bersama dalam suatu rumah besar yang dinamakan Rumah Betang, sebuah Rumah Adat Dayak yang berupa bangunan rumah adat panggung yang besar yang dihuni oleh beberapa keluarga di dalamnya. Dalam Rumah Betang biasa tinggal dan hidup bersama beberapa keluarga yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak mereka, tetapi keluarga-keluarga ini dapat hidup harmonis, rukun,

damai, saling menghormati antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dalam budaya suku ini ada nilai-nilai filosofis yang mengikat bersama diantara mereka, yang secara tidak tertulis mengatur tata cara berperilaku dan dalam mengambil keputusan dalam suatu rumah besar yang dihuni oleh beberapa kelompok keluarga ini, namun mereka tetap dapat hidup harmonis.

Nilai-nilai luhur yang dikandung dalam budaya Rumah Betang ini sejak jaman nenek moyang telah menjadi tuntunan dan pedoman untuk hidup bersama yang harmonis dengan saling menghormati, tidak saling mengggganggu, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan mengatasi masalah/konflik yang timbul diantara warga dalam kehidupan sehari-hari. Pada suku bangsa yang lain juga ada adat-istiadat, budaya-budaya yang bernilai luhur untuk dilestarikan dan diajarkan kepada anak didik/generasi mudanya agar tidak kehilangan atau terpisah/terlepas dari budaya masyarakatnya.

Demikian juga kesenian daerah yang mengandung nilai-nilai luhur yang menunjukkan ciri-ciri kearifan lokal, yang banyak terdapat/dihayati oleh berbagai suku bangsa di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia merupakan bahan kurikulum yang semestinya diajarkan kepada anak didik. Kesenian/seni telah lama diyakini dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendidik/mengasah budi (membentuk watak) manusia/anak didik yang berdasarkan pada tajamnya cipta, halusnya rasa, serta kuatnya karsa. Menurut KHD, Sultan Agung raja Kerajaan Mataram yang termashur itu pernah mengatakan tidak akan mengakui keturunan Mataram sebagai keluarganya jika tidak memperhatikan *'sastra gendhing'*. Yang dimaksud '*sastra'* adalah pengetahuan umum, sedangkan '*gendhing*' adalah seni suara dan seni musik Jawa yang bertujuan untuk menghaluskan budi (jiwa) masyarakat Jawa/Mataram.

Alat untuk menghaluskan budi (jiwa) itu adalah pendengaran, karena panca indera, termasuk indera pendengaran, adalah yang menghubungkan antara jiwa manusia dengan dunia luar. Ilmu pengetahuan selalu

menghasilkan keragu-raguan, sehingga menguasai pengetahuan selalu berusaha mencari bukti-bukti yang dapat menguatkan pengetahuan, sedangkan kesusatraan dan kesenian dapat memberikan kepuasan perasaan. Karena pelajaran kesusastraan maka pikiran menjadi tajam, dan akibat pelajaran seni dan musik maka perasaan dan perangai menjadi halus, dan memberikan ketenangan, sehingga mengurangi keserakahan, yang pada akhirnnya membentuk watak yang halus dan sifat tidak serakah. dan membentuk manusia yang memiliki jiwa yang halus, yang luhur budi dan halus budi.

Budaya daerah yang baik, yang berisi tradisi, kebiasaan, etika kesopanan, harus dikuasai anak didik sebelum mereka diperkenalkan dengan budaya lain, baik budaya suku bangsa lain maupun budaya yang bersasal dari bangsa/negara lain. Pendidik perlu mengenali dan memahami budaya-budaya setempat yang merupakan nilai-nilai luhur budaya daerah, yang merupakan puncak-puncak budaya suatu masyarakat, melakukan kajian-kajian untuk memperkembangkannya, sebagai bahan pengajaran kepada anak didik. Setelah anak didik dibekali dengan nilai-nilai budaya daerah yang kuat, baru kemudian dilengkapi dan diperkenalkan dengan nilai-nilai budaya lain dengan menganut asas konvergensi, dimana budaya lain dapat masuk dan diseleksi, yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan anak didik diintegrasikan ke dalam budaya setempat/sendiri, sedangkan yang tidak baik lebih-lebih yang bertentangan dengan budaya sendiri harus ditinggalkan. Dengan demikian anak didik akan tetap memiliki identitas dan memegang budaya sendiri tanpa harus terisolasi dari pergaulan dengan budaya-budaya lain/dunia luar.

6. Materi Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Olah Raga/Seni Tari/Olah Raga Daerah/Pencak Silat

Hasil pendidikan yang berwawasan budaya dan beretika yang diharapkan adalah manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani,

sehat jiwa dan raganya, yang pandai berolah pikir (cipta), berolah rasa (tajam perasaannya), bermotivasi tinggi (karsa/kehendak), dan berolah raga (olah raga). Oleh karena itu selain membangun pikiran/atau otaknya/ kemampuan intelektualnya, dan karakternya/budi pekertinya/perasaannya, raganya/badannya/ juga harus dibina sejak dini. Dengan demikian kurikulum pendidikan berwawasan budaya dan beretika harus mencakup juga materi pelajaran untuk pengembangan jasmani. Adalah benar '*adagium*' yang menyatakan bahwa 'di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat', dan ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan pembelajaran olah raga/pendidikan jasmani sebagai bagian dari materi pembelajaran bagi anak didik dalam pendidikan berwawasan budaya dan beretika.

Menurut Shields dan Bredemeier (2014: 726) bahwa pada masa Plato, olah raga dipandang sebagai uji kekuatan moral seorang pesaing. Pada tahun 1890 Pierre de Courbertin dengan diilhami oleh bangsa Yunani, memiliki keyakinan bahwa melalui olah raga akan tercipta manusia yang lebih baik, maka dia menghidupkan kembali ajang pertandingan oleh raga Olimpiade yang sampai sekarang masih diikuti oleh para olah ragawan atau atlit-atlit terbaik dunia. Ajang olah raga olimpiade dapat menjadi sarana untuk meraih prestasi yang prestisius bagi para atlit, tetapi juga dapat menjadi wahana untuk membangun jiwa kebersamaan antar bangsa dan mempromosikan sifat-sifat sportif, sifat yang baik bagi olah ragawan untuk mengakui kalah jika kalah, dan menghormati lawan sebagai pemenang yang dapat memenangkan pertandingan dengan jujur.

Ki Hajar Dewantara mengupas seni Tari Bedoyo (tari Jawa) dari sudut/sisi irama (*wiromo*) menyatakan bahwa irama dalam Tari Bedoyo berfaedah untuk memperbaiki/menanamkan (*culteveeren*) tumbuhnya bagian-bagian raga jasmaniah seperti bernafas, jalannya darah, fungsi dari syaraf-syaraf dan sebagainya, dan berfaedah juga untuk menghidupkan irama (*wiromo*) di dalam jiwa. Tujuan pendidikan jasmani dan keolahragaan

adalah untuk menjadikan anak didik orang-orang yang sehat secara jasmani yang melengkapi sebagai orang-orang yang sehat secara rohani.

Pendidikan jasmani/keolahragaan tidak hanya dapat mengembangkan kesegaran/kebugaran jasmani, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk menanamkan sifat-sifat/nilai-nilai kebaikan, seperti keberanian, kejujuran, kerja sama, kerja keras, dan sifat-sifat lain tentang kebaikan. Banyak peraturan-peraturan formal dalam cabang-cabang olah raga yang mengandung nilai-nilai moral kejujuran, bahkan di sekolah-sekolah asrama di Inggris pada abad 19, olah raga digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai esensial bagi pemimpin-pemimpin sebuah kekaisaran seperti kepemimpinan, kesetiaan pada pemimpin, dan keberanian. Nilai-nilai kepatuhan, pengabdian, dan kehandalan yang terkandung dalam peraturan-peraturan dalam olah raga diyakini dapat membentuk para imigran Amerika yang datang dari Eropa pada waktu itu, khususnya imigran Inggris, untuk siap bekerja di Amerika. Para emigran dari eropa datang ke benua baru bagi mereka, yang belum pernah dikenalnya, sehingga hanya dengan bekerja keras para emigran akan dapat memperoleh penghidupan yang baik.

Ketika masyarakat berpikir tentang moral, sering pemikiran ini dikaitkan juga dengan masalah sportifitas, suatu terminologi yang digunakan dalam bidang olah raga (*sport*). Sportifitas adalah merupakan sekumpulan sikap atau nilai maupun sebagai perilaku yang mengekspresikan sikap atau nilai tersebut. Sering pula masalah sportifitas digunakan dalam kompetisi bidang lain selain olah raga yang mengimplikasikan keputusan menang-kalah, sebagaimana yang terjadi dalam kontestasi politik seperti misalnya dalam memilih pemimpin. Kontestan yang kalah dalam proses kontestasi yang prosesnya telah berjalan dengan baik, dan kemudian mengakui kekalahan secara suka rela, masyarakat akan menganggap sebagai kontestan atau orang/organisasi yang sportif, dalam pengertian orang/organisasi tersebut menunjukkan sikap sportif, demikian sebaliknya kontestan yang kalah dalam kontestasi

yang prosesnya baik namun tidak mau menerima kekalahan, masyarakat akan menyebutnya sebagai sikap/perilaku yang tidak sportif.

Penelitian yang dilakukan untuk mengungkap fakta empiris yang berkaitan dengan norma-norma moral yang dianut oleh suatu tim dalam bidang olah raga menunjukkan bahwa sekalipun dapat dijamin akan menghasilkan kemenangan bagi suatu tim olah raga dengan melakukan kecurangan dalam berkontestasi, namun jika dalam tim tersebut memiliki norma kolektif yang kuat yang menentang kecurangan, maka dapat dipastikan sebagian besar anggota tim tidak akan melakukan kecurangan untuk memperoleh kemenangan, atau hanya sebagian kecil anggota tim itu yang akan melakukan kecurangan demi memperoleh kemenangan. Namun demikain dinyatakan bahwa penelitian-penelitian mengenai suasana moral dalam kelompok/tim olah raga ini tidak dapat menentukan efek kausalnya.

Banyak jenis seni tari dan seni bela diri (misalnya pencak silat) yang menjadi kekayaan budaya daerah-daerah di seluruh nusantara yang dipraktikkan dan dihayati oleh warga masyarakat menunjukkan ciri bukan saja memiliki filsafat yang tinggi sesuai dengan kekayaan budaya daerah, tetapi juga sebagai wahana untuk mengekspresikan karya seni yang menunjukkan keluhuran dan kehalusan budaya daerah. Sebagai contoh Silat Betawi, merupakan kekayaan lokal daerah Jakarta yang telah dihayati oleh sebagian warga masyarakat asli Betawi (Jakarta) sebagai seni yang selain mengandung unsur mendidik keberanian dan kebugaran, juga memiliki filsafat yang diyakini telah ikut mewarnai sejarah masyarakatnya setelah revolusi kemerdekaan. Seni bela diri itupun diyakini merupakan hasil alkulturasi dari bertemunya berbagai etnis, suku, ras dan agama, yang dapat dianggap sebagai kejeniusan atau kecerdasan lokal (Kompas, 16 Agustus, 2014).

Seni tari dan seni bela diri yang dihayati oleh masyarakat tertentu juga banyak diantaranya yang mengandung unsur-unsur gerak dinamis yang dapat menjadi wahana mengembangkan kebugaran pisik dari para pelaku dan penghayatnya. Gerakan-gerakan dalam seni tari dan seni bela

diri menuntut pelakunya mengeluarkan energi untuk melakukan gerakan tari/bela diri, menggerakkan berbagai komponen tubuh untuk mengekskusi gerakan tari/bela diri, sehingga pelaku/penghayatnya juga sering mengalami kelelahan pisik sebagai indikasi hilangnya sebagian energi yang dikeluarkan selama kegiatan menari/ bela diri. Dengan demikian sesungguhnya materi pendidikan jasmani dan olah raga dapat memanfaatkan jenis-jenis tari dan seni bela diri ataupun jenis olah raga yang ada di daerah sebagai materi pembelajaraan bidang seni, pendidikan jasmani dan olah raga, sekaligus sebagai upaya melestarikan kekayaan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional Indonesia.

Materi pendidikan jasmani dan olah raga yang memanfaatkan kekayaan budaya daerah sebagai materi pembelajaran dapat dimasukkan dalam materi kurikulum muatan lokal, karena setiap wilayah/daerah memiliki jenis-jenis kekayaan budaya berupa seni tari dan/atau seni bela diri yang berbeda. Dengan pendidikan yang menggunakan pendekatan tematif-integratif, materi pembelajaran yang berasal dari seni tari dan/atau seni bela diri yang merupakan budaya daerah dapat dimanfaatkan sebagai tema untuk materi pembelajaran pendidikan jasmani dan olah raga, dan dapat juga diangkat menjadi tema dalam pembelajaran bagi mata pelajaran yang lain, seperti misalnya materi untuk pendidikan budaya, pendidikan seni, atau pendidikan budi pekerti/karakter.

7. Pendidikan Kepanduan/Kepramukaan/Bela Negara

Dalam kerangka pendidikan karakter/budi pekerti/pendidikan moral, pendidikan kepramukaan atau kepanduan menjadi salah satu wahana yang sangat penting untuk memupuk jiwa kesetiakawanan, kerja sama, sifat keberanian, pantang menyerah, kepedulian, kejujuran, dan ciri-ciri kebaikan yang lain yang sangat diperlukan untuk dimiliki dan dijiwai serta diaktualisasikan oleh semua warga masyarakat/negara. Menanamkan sifat-sifat yang demikain luhur dapat dilakukan dengan kegiatan atau pendidikan kepanduan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh sekolah-

sekolah dengan pembinaannya dapat dilakukan secara langsung oleh para pendidik/guru dan komponen sekolah lainnya, dan juga dapat memanfaatkan komponen masyarakat. Oleh karena itu penting bagi setiap sekolah, mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah memiliki gugus kepramukaan sebagai bagian dalam pendidikan watak/karakter.

Jiwa kebersamaan, kerja sama dan kesetiakawanan sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang peduli terhadap sesama warga masyarakat, dan peduli terhadap alam sekitar. Dalam era yang penuh kompetisi dan persaingan dalam memperebutkan kesempatan atau peluang, memperoleh akses terhadap sumber-sumber, dan pada akhirnya akan mengiplikasikan menang atau kalah, mendapatkan semuanya atau tidak sama sekali, pendidikan kepramukaan dapat membangun jiwa kesetiakawanan, kerja sama dan saling tolong menolong diantara anak didik. Mendidik jiwa gotong royong dan tolong menolong serta saling membantu dan kerja sama lebih bermanfaat dalam menjalani kehidupan bagi anak didik kelak dibandingkan mengobarkan semangat bersaing dan kompetisi mengingat pada akhirnya yang diperlukan dalam kehidupan adalah kerjasama, tolong-menolong, saling membantu, saling memberi perhatian diantara sesama, dan saling menghargai perbedaan diantara sesama, karena pada dasarnya tidak ada seorang individupun yang dapat hidup sendiri dalam dunia yang semakin kompleks ini.

Kegiatan kepramukaan dapat mencegah atau mengurangi sifat eksklusif anak didik di sekolah-sekolah yang sering terjadi saling serang antara satu sekolah terhadap sekolah yang lain. Akibat saling serang ini tidak jarang juga mengakibatkan korban jiwa diantara anak didik itu sendiri. Dengan mengadakan kegiatan kepramukaan secara bersama-sama, atau kegiatan-kegiatan lain yang dikemas dalam bentuk kegiatan bersama, anak didik dari sekolah-sekolah yang berdekatan difasilitasi untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan menganut prinsip kesetaraan, rasa saling membutuhkan, saling memahami dan mengembangkan rasa saling menghargai dan saling menghormati pihak lain sebagai sesama.

Kegiatan pertandingan olah raga dan seni yang mengimplikasikan persaingan atau kompetisi, sering membuat anak didik mengembangkan rasa eksklusif, menganggap kelompok lain merupakan lawan yang harus dikalahkan, termasuk di luar arena pertandingan. Ketika sekelompok anak didik dari suatu sekolah dikalahkan oleh kelompok dari sekolah lain dalam suatu kompetisi, maka yang terjadi adalah tidak mau menerima kekalahan, dan selanjutnya dengan cara apapun berusaha untuk mengalahkan atau menghancurkan kelompok lain, sekalipun situasinya berada di luar arena pertandingan. Oleh karena itu kegiatan yang diadakan secara bersama antara satu sekolah dengan sekolah lain dalam kegiatan kepramukaan sangat baik untuk mengurangi/meredam kekerasan diantara kelompok anak didik yang diakibatkan oleh persaingan atau kompetisi dalam olah raga dan seni, kegiatan ilmiah, atau kegiatan lainnya. Penekanan pada kegiatan yang diadakan secara bersama diantara sekolah-sekolah yang berdekatan adalah mempromosikan sikap dan perilaku kerja sama, saling menghargai, saling menghomati dan saling membutuhkan, bukan persaingan atau kompetisi yang mengimplikasikan menang kalah, dan keinginan untuk saling menghancurkan pihak lain.

Kepanduan juga dapat menjadi wahana untuk menanamkan jiwa patriotisme, jiwa kebangsaan, berani bela Negara, cinta tanah air, dan dapat untuk menangkal sifat-sifat radikalisme yang dapat merasuk pada generasi muda bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, pada satu sisi sangat diharapkan untuk kemajuan ilmu dan teknologi sendiri sebagai hasil kebudayaan atau sebagai hasil oleh pikir umat manusia yang dapat meringankan pekerjaan/beban tugas warga masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pada sisi lain kemajuan iptek dapat mengancam keutuhan bangsa dengan masuknya pengaruh budaya negara-negara lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, dan jika tidak diseleksi akan sangat mengganngu keutuhan bangsa. Oleh karena itu diperlukan upaya yang efektif agar setiap warga negara dapat menyeleksi dan memilih serta memanfaatkan kemajuan iptek sebagai

sarana untuk memajukan penghidupannya dan untuk mendukung terciptanya peradaban dunia yang menghargai martabat manusia. Cara menanamkan jiwa cinta tanah air, berani bela Negara, patriotisme salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan kepramukaan sebagai bagian integral dari usaha pendidikan berwawasan budaya dan etika.

Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka yang menjadi jiwa dan pedoman berorganisasi dan berperilaku anggota pramuka harus ditanamkan pada anak didik agar dapat menjiwai dan menuntun pola pikir dan perilaku anggota pramuka menjalani kehidupan di masyarakat setelah lulus dari pendidikan formalnya. Banyak nilai-nilai kebaikan yang dapat ditanamkan dari gerakan kepramukaan/kepanduan, yang sangat bermanfaat untuk pembinaan karakter anak didik.

Pelaksanaan pendidikan kepanduan atau kepramukaan dapat dilakukan dengan memasukkan program pendidikan kepramukaan atau kepanduan ini dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Pendidikan kepramukaan atau kepanduan diberikan bagi pada anak didik tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, sedangkan untuk pendidikan tinggi program kepramukaan/kepanduan dijadikan sebagai unit kegiatan peminatan bagi mahasiswa seperti kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan pencinta alam, dll.

F. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan

Sebagai bangsa yang besar, penting sekali bagi Bangsa Indonesia memiliki strategi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang diterima dari para nenek moyang kepada generasi penerus. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam budaya-budaya masyarakat Indonesia telah mampu menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, ras, agama, dan golongan, yang mendiami ribuan pulau terbentang dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, telah sejak jaman nenek moyang menjadi satu, dan secara tegas dideklarasikan dalam sumpah pemuda 28 oktober 1928. Nilai-nilai kebangsaan yang merupakan bagian

dari budaya bangsa, seperti sifat-sifat nasionalisme, kegotongroyongan, sifat santun dan ramah, musyawarah dalam mengatasi masalah, harus dilestarikan dan dikembangkan demi kelangsungan dan kejayaan bangsa. Jika bangsa Indonesia tidak mampu mempertahankan dan mendidikkan sifat-sifat nasionalisme, perstuan, kegotongroyongan dan yang lain-lain, maka dikhawatirkan bangsa ini akan menjadi terpecah, tercerai berai, dan muncul kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam adat-istiadat dari budaya-budaya lokal, dan menjadi puncak-puncak kebudayaan nasional dapat ditanamkan/didikkan kepada anak didik melalui atau lewat budaya sekolah. Kedisiplinan, integritas, suka menolong, santun dalam pergaulan, keberanian mengambil tanggung jawab bagi dirinya sendiri maupun kelompok, dan sifst-sifa yang lain dapat ditanamkan lewat budaya yang ada disekolah. Penanaman jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, jiwa persatuan, cinta tanah air, dan yang sejenisnya dapat dilakukan di sekolah-sekolah melalui penciptaan budaya-budaya sekolah dengan mengajarkan nilai-nilai sejarah perjuangan kepahlawanan, lagu-lagu kebangsaan, pemahaman dan penghayatan dasar negara dan undang-undang dasar 1945, dan lain sebagainya.

Budaya sekolah adalah ‘how we do things around here’, merupakan gambaran tentang sekolah-sekolah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sekolah, yaitu tentang cara mendidik anak, mengajar anak, mengatasi perselisihan diantara warga sekolah, membangun kebersamaan diantara warga sekolah, dll.

BAB VI MODEL PEMBELAJARAN

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan atau pembaharuan pendidikan adalah adanya perubahan dalam filsafat atau filosofi sebagai acuan dalam pembelajaran. Kelemahan pendekatan dalam pembelajaran yang berpusat pada guru *(teacher centre*) yang selama ini dianut/dilaksanakan di sekolah-sekolah tradisional tidak dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang mandiri, kreatif, dan inovatif, serta berani mengambil tanggung jawab.

Proses pembelajaran yang berpusat pada guru hanya menghasilkan lulusan yang memiliki sifat-sifat pasif, reseptif dan tidak berani mengambil tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Model pembelajaran ini juga sering disebut pendidikan tradisional, yang dalam pelaksanaannya mengutamakan pendekatan otoriter, kursif, dan menerapkan strategi hukuman (*reward & punishment*) dalam praktik di lapangan. Model pendidikan yang demikian akan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap pembalasan, melanggar peraturan ketika tidak ada pengawasan, dan tidak toleran terhadap perbedaan dan keberagaman. Adanya penganiayaan oleh senior kepada para yunior dalam kegiatan-kegiatan orientasi pengenalan kampus di beberapa perguruan tinggi mengkonfirmasi bahwa para senior telah mengalami perlakuan kekerasan juga sebelumnya oleh para senior mereka ketika menjalani kegiatan yang sama, sehingga mereka berganti melakukan pembalasan kepada para yunior mereka. Jika tidak dilakukan pencegahan untuk memutus siklus tersebut, maka tindakan kekerasan oleh kelompok senior kepada kelompok yunior akan terus berulang, tidak akan ada putusnya karena yang mengalami tindakan kekerasan hanya akan dapat melakukan pembalasan kepada adik-adik angkatannya.

Menurut John Dewey model pendidikan tradisional sebagai model pembelajaran 'pemaksaan dari atas dan dari luar'. Guru memaksakan standar, materi subyek, dan metode orang dewasa pada anak didik yang baru berkembang secara perlahan menuju tingkat kedewasaan. Dalam pandangan Dewey, kesenjangan ini terlalu besar sehingga materi subyek, metode pembelajaran dan perilaku yang dituntut menjadi asing bagi kemampuan yang ada pada diri anak didik, berada di luar jangkauan pengalaman yang dimilikinya, sehingga akibatnya semua itu harus dipaksakan meskipun guru menggunakan berbagai cara untuk menutupi sifat pemaksaan yang dilakukan. Meskipun sekolah-sekolah progresif pada masa lampau masih mengandung kelemahan-kelemahan seperti tidak terstruktur dan berimprovisasi, namun sekolah-sekolah progresif masih lebih manusiawi dibandingkan sekolah-sekolah tradisional.

A. Model Pembelajaran Konstruktivistik

Tujuan pendidikan yang berwawasan budaya dan etika adalah untuk menghasilkan manusia Indonesia yang Pancasilais, demokratis, berbudi luhur, dan cinta kasih terhadap semua/sesama dan alam sekitar. Menurut Yudi Latif (Kompas, 17 Juni 2014) pendidikan Indonesia harus membentuk generasi yang toleran, berbudi pekerti baik (luhur) dan cinta kasih. Menurut Yudi Latif sekarang ini Indonesia belum memiliki strategi kebudayaan yang khas Indonesia, yang sangat diperlukan untuk menjadi dasar sistem dan kebijakan pendidikan. Strategi kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan strategi pendidikan, yang menghargai keberagaman kearifan lokal sehingga dapat melahirkan generasi yang toleran, menghargai keberagaman, memiliki budi pekerti baik (luhur) dan mengedepankan cinta kasih.

Oleh karena itu model pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah-sekolah harus diubah dari penerapan pendekatan *'teacher center',* yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, beralih pada pendekatan yang berpusat pada siswa (*student centre*). Anak didik

harus aktif, kreatif dan inovatif, serta berani berinisiatif untuk mencari dan mengembangkan segala sesuatu yang ingin dipelajari dan ingin dikuasai sebagai hasil proses belajarnya, yang kelak akan sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Sekolah dan pendidik berperan memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang bermakna. Pendidik harus selalu ada di sana, dan siap setiap saat untuk memberi bantuan kepada anak didik dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, namun tetaplah anak didik sendiri yang aktif melakukan. Anak didik difasilitasi untuk berusaha mencari sendiri segala sesuatu yang diinginkan, mengembangkan kreativitasnya, berinisiatif dan berani melakukan tindakan secara bertanggung jawab, dan jika terjadi penyimpangan atau sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan etika/kaidah/prosedur/peraturan, maka pendidik baru memberikan bimbingan dan mengarahkan kembali agar tindakan/kegiatan anak didik dapat kembali berjalan sebagaimana diharapkan.

Model pembelajaran yang sesuai untuk pendekatan *student center* adalah model pembelajaran konstruktivistik. Ki Hajar Dewantara pernah mencita-citakan bahwa pendidikan di Indonesia dimaksudkan untuk membentuk manusia merdeka, merdeka lahir maupun batin, salam dan bahagia. Yang dimaksud merdeka adalah menunjukkan tiga sifat, yaitu berdiri sendiri (*zelfstandig*), tidak tergantung pada orang lain (*onafhankelijk)*, dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking)*. Merdeka yang dimaksud bukanlah sekedar lepas dari penjajah, karena pada saat itu masyarakat Indonesia dalam penguasaan penjajah, tetapi selain tidak dalam kekuasaan penjajah, juga harus mampu mandiri dan dapat mengatur dirinya sendiri. Kemampuan untuk mandiri dan mengatur dirinya sendiri sebagai hasil pendidikan juga mencakup kemampuan untuk dapat mengatur tertibnya hubungan dengan kemerdekaan orang lain. Manusia merdeka sebagai hasil pendidikan yang dicita-citakan adalah juga manusia yang mampu menghargai kemerdekaan orang lain, dan menyadari bahwa kemerdekaannya dibatasi oleh

kemerdekaan orang lain. Manusia merdeka sebagai hasil kegiatan kebudayaan yang disebut pendidikan adalah manusia yang mampu dalam olah pikir (cipta), olah rasa (afektif), olah karsa (kehendak) dan olah raga (sehat jasmani).

Menghasilkan lulusan yang merdeka, kreatif dan berani bertanggung jawab tidak akan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan kursif, otoriter, dan menekankan pada penerapan hukuman. Lulusan yang memiliki jiwa merdeka, memiliki kreativitas dan keberanian mengambil tanggung jawab hanya dapat dihasilkan dari situasi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat berlatih bertanggung jawab, diberi kebebasan untuk berkreasi, dan berinisiatif dalam proses pembelajaran.

Manusia merdeka lahir dan batin, dan salam dan bahagia sebagaimana dicita-citakan oleh KHD adalah manusia yang dapat mengatur dan mengendalikan atau mengontrol perilakunya sendiri, serta dapat menghargai kemerdekaan orang atau kelompok lain. Menghasilkan atau menciptakan manusia-manusia merdeka melalui pendidikan tidak dapat dilakukan dengan model pembelajaran yang kursif, pemaksaan yang menekankan pada penerapan hukuman (Nicci dan Narvaez, 2014: 516).

Mendidik untuk menghasilkan lulusan/anak didik yang merdeka lahir dan batin tidak dapat dengan menempatkan anak didik dalam kelas yang otoriter dan indoktrinatif. Kelas-kelas yang indoktrinatif akan menghasilkan anak didik yang memiliki kecenderungan ketergantungan heteronomi, yaitu ketergantungan pada peraturan-peraturan yang harus ditaaati, yang pada umumnya merupakan otoritas dari luar, sedangkan kelas-kelas yang otoriter atau menggunakan pendekatan paksaan akan menghasilkan kecenderungan pemberontakan bagi anak didik, ketaatan buta, atau ketaatan mengikuti peraturan hanya di mana ada pengawasan. Oleh karena itu untuk menghasilkan anak didik yang merdeka lahir dan batin, pendidikan harus diarahkan pada pembentukan pribadi yang otonom, suatu gambaran yang menunjukkan anak didik sebagai individu yang mampu

mengatur perilakunya sendiri, tanpa pengawasan dan penerapan sanksi oleh otoritas dari luar/orang dewasa/pendidik.

Sebagai koreksi terhadap model-model pembelajaran yang terjadi dalam kelas-kelas tradisional yang ciri khasnya adalah berpusat kepada guru, para pakar kemudian beralih kepada model pendidikan progresif yang menekankan peran anak didik sebagai subyek dalam proses pembelajaran bagi dirinya sendiri. Pendidikan progresif mempunyai ciri pengelolaan kelas berpusat kepada anak didik dan perkembangan moral anak didik dipandang sebagai pembangunan dan penerapan secara bertahap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kasih sayang (513). Pendidik atau guru, atau orang dewasa dalam pendidikan progresif berupaya memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran bagi anak didiknya, menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran bagi anak didik. Pendidik melibatkan anak didik dalam menyelesaikan konflik diantara mereka, melibatkan anak didik dalam membuat keputusan yang menyangkut pada mereka, melibatkan anak didik dalam membahas isu-isu sosial dan moral yang relevan dengan keadaan mereka.

Jika anak didik dilibatkan dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi kelasnya, dilibatkan dalam mencari alternatif pemecahan masalah, dan pada akhirnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka anak didik akan merasa ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan yang telah dibuat di kelas yang melibatkan dirinya itu. Ini semua dapat dilakukan oleh pendidikan dalam tingkat kelas, kemudian meluas pada tingkat sekolah dalam menangani isu-isu yang lebih luas pula, misalnya untuk lingkup sekolah. Lebih lanjut anak didik diajak mencoba mengamati dan mencermati isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat sekitar, misalnya masalah lingkungan yang rusak, lingkungan yang tidak sehat, masalah kenakalan remaja/anak sekolah, masalah narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya, sebagai upaya untuk mengasah kepekaan anak didik terhadap isu-isu yang dibahas, dan memberikan

wawasan yang lebih memadai dalam mensikapi masalah-masalah sosial tersebut. Harapannya akan dihasilkan lulusan yang peduli kepada sesama, lingkungan dan memiliki kepekaan yang baik terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya kelak dalam menjalani kehidupan setelah lulus.

Sebagai bangsa yang besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, keberagaman suku dan latar belakang budaya yang sangat banyak, Indonesia perlu mengakomodasi segala perbedaan dan mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati diantara berbagai komponen yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hanya dengan latar belakang pemikiran yang demikian maka pendidikan akan menghasilkan generasi penerus yang mampu menjaga keutuhan bangsa, sebagaimana telah dirintis oleh para pendiri bangsa, yaitu bangsa yang satu Bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Model Pendekatan Konstruktivistik

Pendidikan progresif adalah model pendidikan yang berpusat pada anak didik *(student centre)* serta perkembangan moral dipandang sebagai penerapan dan pembangunan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kasih sayang. Pendidikan moral pada umumnya menggunakan pendekatan konstruktivistik, namun demikian pendekatan konstruktivistik tidak hanya sesuai untuk pembelajaran moral, tetapi juga untuk pembelajaran kecerdasan dan kepribadian. Pendekatan konstruktivistik tujuannya adalah untuk mengembangkan semua aspek dalam diri anak didik dalam semua bidang kurikulum yang mencakup sains, matematika, bahasa, ilmu social dan seni, serta mencakup semua domain perkembangan yang meliputi intelektual, fisik, social, emosi dan moral. Dalam kelas-kelas konstruktivistik isu-isu moral didasarkan pada pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari yang bahan bakunya merupakan interaksi social yang dialami anak didik dalam kehidupannya dalam masyarakat. Ruang kelas dalam kelas konstruktivistik dipandang sebagai masyarakat mini di mana anak

didik berinteraksi dengan teman sebaya mereka, mengembangkan perasaan, berwacana, berempati, dan semua ini akan dapat mengembangkan potensi sosialitas dan moralitas anak didik.

Istilah konstruktivistik diambil dari teori perkembangan Piaget, di mana dalam teori perkembangan ini anak-anak membangun *(construct)* pengetahuan dan kecerdasan melalui interaksi dengan dunia fisik dan social mereka. Prinsip pendidikan konstruktivistik adalah menciptakan suasana 'sosio moral' yang dapat membangun suatu hubungan saling menghormati yang terjadi dalam pembelajaran bagi anak didik. Implementasinya di dalam kelas adalah bahwa dalam kelas konstruktivistik akan terbangun jaringan hubungan interpersonal antara anak didik dengan anak didik yang lain, hubungan orang dewasa dengan anak didik, dan hubungan antara orang dewasa dengan orang dewasa yang diamati oleh anak-anak. Interaksi dalam kelas konstruktivistik menjadi laboratorium pengembangan social dan moral, karena anak didik dapat mengamati terjadinya interaksi diantara individu dalam kelas.

Tujuan pendidikan dengan menerapkan model/pendekatan konstruktivistaik adalah agar anak didik menjadi pebelajar otonom (Hildebrand & Zan, 512). Pebelajar yang otonom berusaha memperoleh pengetahuan dan kecerdasan bukan hanya ketika dalam kelas, dan bukan hanya ketika dalam sekolah sedang menjadi anak didik formal, akan tetapi pebelajar otonom akan tetap belajar secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari setelah lulus dari sekolah. Pebelajar yang otonom berpikir dan bertindak dengan dipandu oleh akal, keyakinan dan komitmen. Dinyatakan oleh Piaget: 'jika ia (anak-anak didik) secara intelektual pasif, ia tidak akan mengetahui bagaimana menjadi merdeka secara etis. Sebaliknya, jika etikanya hanya terdiri dari ketundukan pada otoritas orang dewasa, dan jika satu-satunya interaksi yang membentuk kehidupan kelas adalah interaksi yang mengikat setiap siswa secara individu pada guru yang memegang semua kekuasaan, ia tidak akan tahu bagaimana menjadi aktif secara intelektual'.

Pendekatan konstruktivistik banyak dipengaruhi oleh teori perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget, filsafat pendidikan moral dari John Dewey, dan teori perkembangan moral dari Lawrence Khohlberg. Menurut Piaget, kehidupan sosial merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan logika anak, dan perkembangan anak merupakan adaptasi dari pikirannya dengan lingkungan social dan lingkungan phisik. Perkembangan dapat terjadi melalui proses aksi dan refleksi, dan anak-anak membangun dan membangun kembali pengetahuan mereka tentang dunia untuk memahaminya, dan pada akhirnya anak dapat membentuk penalaran yang semakin lama menjadi semakin sempurna pengetahuan mereka serta kemampuan dalam memahami dunia.

Perkembangan moral anak merupakan dinamika progresif mengenai cara berpikir yang semakin kuat dan inklusif tentang keadilan, pemerataan, dan menghormati orang lain (toleran). Oleh karena itu dalam pendidikan moral sangat penting melibatkan hubungan antar anak didik dan antara anak didik dengan orang dewasa, serta difasilitasi untuk terjadinya interaksi social anak didik dengan teman sebaya. Implementasi dalam kelas dapat berbentuk pelibatan anak didik dalam pengambilan keputusan dan mendorong anak didik untuk membuat peraturan bersama dalam kelas, dengan penekanan pada kerja sama saling menghormati diantara anak didik.

Menurut John Dewey, anak harus dididik tentang kepemimpinan dan ketaatan, dan harus memiliki kekuatan mengarahkan dirinya sendiri dan kekuatan mengarahkan orang lain, serta kemampuan untuk mengambil posisi untuk mengambil tanggung jawab. Dewey menekankan pentingnya pengalaman, eksperimen, dan kebebasan dalam pendidikan. Pendidikan adalah metode ilmiah bagi individu untuk mempelajari dunia, membangun pengetahuan, makna, nilai, dan menggunakannya sebagai pembelajaran dan kehidupan yang cerdas. Pendidikan tradisional yang menghasilkan paksaan dari pendidik diberikan komentar bahwa para guru menekankan

upaya melestarikan penampilan luar perhatian, sopan santun, dan ketaatan, dan setiap orang yang paham dengan sekolah tradisional mengetahui bahwa pikiran, imajinasi, keinginan dan kegiatan yang tersembunyi berjalan sendiri di balik permukaan ini (hal 516).

Tuntutan otoriter dalam model pembelajaran tradisional yang menjadi ciri khas pendekatan/strategi kursif dan otoriter, intimidasi emosional, dan hukuman sewenang-wenang, tidak akan terjadi dalam kelas konstrutifvistik. Demikian juga sikap permisif pasif atau pembiaran oleh pendidik terhadap anak didik untuk bertindak semaunya sendiri, yaitu membiarkan dan tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran aturan, pelanggaran norma, dan ketika anak-anak terlibat dalam perilaku membahayakan orang lain, agresif atau menunjukkan perilaku menentang, tidak akan dibiarkan terjadi dalam kelas konstruktivistik.

Pendidik dalam kelas-kelas konstruktivistik berusaha menahan diri untuk tidak mendisiplinkan anak didik dengan cara menghukum, serta memberikan peluang kepada mereka untuk belajar dari konsekuensi-konsekuensi logis yang diterima dari tindakan atau perilaku yang yang tidak wajar, atau yang menyimpang dan tidak dapat diterima secara social. Dengan demikian anak didik akan terbantu dalam membangun rasa batin tentang pentingnya berperilaku dengan cara yang dapat diterima secara social. Jika seorang anak didik melakukan kesalahan guru tidak menghukum, tetapi memberikan pengertian kepada anak didik mengenai konsekuensi logis dari kesalahannya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak didik yang lain. Dengan cara demikian sesungguhnya guru juga telah membantu anak didik untuk mengambil perspektif sebagai orang lain yang menerima konsekuensi dari perilaku anak didik lain yang melakukan kesalahan.

Menurut Kohlberg perkembangan manusia dalam bidang moral mulai dari orientasi diri sendiri atau egosentris, dengan pertimbangan moralnya adalah menghindari hukuman dan mengejar hadiah (*reward & punishement)*, berkembang ke tingkatan selanjutnya, yaitu memasukkan

perspektif sebagai orang lain, dan pada tahap akhirnya pertimbangan moral akan mencakup seluruh sistem hubungan dalam kelompok, lembaga, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada enam tahapan perkembangan penalaran menurut Kohlberg, yaitu pada tahap paling rendah orientasinya ketaatan terhadap peraturan atau pimpinan dan menghindari hukuman dengan cara menghindari melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain dan properti. Melakukan tindakan yang benar adalah taat kepada peraturan atau hukum, dan mengakui kekuasaan atau otoritas yang ada.

Pada tahap berikutnya pertimbangan moral adalah adanya pengakuan bahwa mungkin orang lain memiliki kepentingan lain yang berbeda dengan kepentingan individu. Pembenaran tindakan moral adalah memenuhi kebutuhan sendiri dan mengakui orang lain memiliki kepentingannya sendiri. Dalam tahap ini ada pertukaran instrumental dengan prinsip: jika anda menolong saya, saya juga akan menolong anda. Sebagai lanjutan dari perkembangan egosentris, yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri, dalam tahap perkembangan ini orientasi seorang anak mulai memperhatikan kepentingan anak-anak lain dalam kelompok terdekatnya.

Pada tahapan selanjutnya pertimbangan moral individu adalah adanya keinginan untuk dilihat sebagai orang baik oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain. Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan oleh orang-orang yang dekat dengan individu, bahwa seseorang harus peduli kepada orang lain karena jika seorang individu menempati posisi sebagai orang lain, anda menginginkan perilaku yang baik dari orang lain. Tahapan selanjutnya memiliki cakupan yang lebih luas, di mana pertimbangan moral adalah untuk menjadi warga yang baik, menegakkan tatanan sosial, dan memelihara ketertiban masyarakat. Pada tahapan ini, keputusan yang adil harus mempertimbangkan sumbangannya terhadap masyarakat, yang kemudian dikenal dengan perspektif

pemeliharaan sosial, memenuhi kewajiban berperilaku menghindari terjadinya kerusakan sosial.

Pada tahap selanjutnya, tahap 5, prinsip keadilan berfokus pada hak asasi manusia atau kesejahteraan sosial, dan menggunakan sudut pandang membangun masyarakat, bukan hanya memelihara masyarakat, dan pada akhirnya, yang merupakan tahaap tertinggi dalam perkembangan moral, keputusan moral dipandu oleh prinsip-prinsip etika universal yang menghasilkan keputusan yang menjamin martabat manusia. Hukum dan perjanjian sosial tertentu biasanya berlaku karena didasarkan pada prinsip-prinsip etika tersebut, tetapi jika ternyata hukum melanggar prinsip maka orang akan bertindak sesuai prinsip. Tahapan ini disebut sebagai sudut pandang keadilan moral, sengaja menjalankan prinsip keadilan, yang berpusat kesetaraan hak asasi manusia dalam menghormati martabat semua manusia sebagai pribadi otonom yang merdeka dan setara. Pembenaran moral adalah keyakinan sebagai keyakinan pribadi rasional dalam keabsahan prinsip-prinsip universal yang harus diikuti semua orang karena orang telah dengan kesadaran diri pada prinsip-prinsip tersebut.

Prinsip utama dalam pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan adalah bahwa ruang kelas membentuk ‘suasana sosio moral yang kooperatif’ di mana guru berusaha membangun hubungan kerjasama egaliter dengan anak didik dan menghindari tindakan kursif yang tidak perlu (Nucci dan Narvaez, 2014: 399). Ruang kelas dalam pendekatan konstruktivistik merupakan entitas yang demokratis di mana guru dan anak didik bekerja sama memecahkan masalah dan konflik yang dihadapi. Anak didik diberi otonomi untuk mengambil keputusan mengenai struktur dan aturan-aturan kelas, didorong untuk berpartisipasi dalam permainan kooperatif satu sama lain diantara mereka, serta dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara mereka didorong dengan melalui negosiasi dan kerjasama. Ada bukti kuat bahwa dalam kelas konstruktivistik anak didik dapat mencapai perkembangan lebih besar dalam pemahaman interpersonal, lebih memungkinkan menggunakan negosiasi dalam

menyelesaikan konflik, dan lebih terlibat dalam interaksi kooperatif dibandingkan dengan anak didik dalam kelas nonkonstruktivistik.

Dalam konteks perkembangan bagi anak-anak muda, kelompok teman sebaya merupakan aspek penting. Kelompok teman sebaya dapat memiliki efek positifL terhadap perkembangan moral anak muda (remaja) sebagai anak didik dalam lembaga pendidikan formal (sekolah). Interaksi dan hubungan diantara sesama anak usia sebaya terutama sangat penting dalam perkembangan sosial anak remaja/muda. Anak didik belajar berbagi hal diantara mereka, belajar bersikap/perilaku inklusif, adil dan menghormati hak-hak dan kebebasan teman sebaya mereka/orang lain. Interaksi yang terjadi di tempat-tempat lain selain di dalam kelas, seperti di lapangan permainan, di kantin, di tempat istirahat, dan tempat-tempat lain dapat memiliki pengaruh negatif tanpa dorongan, diskusi, dialog dan umpan balik dari para guru sebagai pendidik moral. Dengan demikian hendaknya model pembelajaran berbudaya dan beretika memberikan ruang juga bagi pelibatan secara aktif teman sebaya.

C. Sistem Among dalam Pembelajaran

Istilah '*opvoeding'* tidak ada kata yang sepadan dengan Bahasa Indonesia, tetapi oleh KHD dipersamakan dengan kata yang paling dekat dalam Bahasa Jawa '*among', 'momong'* atau '*ngemong'* yang dalam Bahasa Indonesia adalah 'mengasuh'. Orang yang pekerjaannya mengasuh anak disebut 'pengasuh' yang dalam Bahasa Jawa disebut *'pamong'*. Jadi *'pamong'* adalah orang yang pekerjaannya 'mengasuh' anak yang dalam dunia pendidikan adalah guru. Jadi pamong adalah guru menurut yang berlaku di lingkungan Tamansiswa.

Pengasuh anak dalam melaksanakan pekerjaannya selalu memberikan kebebasan kepada anak yang diasuhnya untuk bermain apa yang disukai, menggunakan alat-alat/mainan yang dipilihnya, dan sesuai dengan seleranya. Anak diberikan kebebasan untuk memilih mainan, memainkan mainan yang dipilihnya, dan memainkan mainan sesuai

keinginannya. Hanya jika anak yang diasuh memasuki wilayah yang dianggap berbahaya, atau memilih mainan yang bernahaya bagi dirinya, pengasuh mengarahkan, memberikan arahan/penjelasan/ keterangan agar tidak melakukan/memainkan/memilih mainan yang dipilihnya, dan diarahkan untuk memilih yag lain. Model pengasuhan inilah yang diterapkan dalam pembelajaran bagi anak didik dalam pembelajaran di kelas.

Implementasi sistem '*among'* dalam pembelajaran adalah menerapkan semboyan 'trilogi', yaitu *'ing ngarso sung tulodho'*(di depan menjadi contoh), *'ing madyo mangun karso'* (di tengah membangun semangat, motivasi), *'tut wuri handayani'* (di belakang memberikan dorongan, dukungan) kepada anak didik. Tiga strategi ini menjadi strategi yang utuh untuk menuntun anak didik berkembang sesuai kodratnya, dan kodrat itu terletak dalam adat-istiadat/budaya setiap bangsa/suku bangsa/kelompok masyarakat.

Pamong/pendidik atau guru harus dapat menjadi contoh bagi anak didiknya, baik dalam berperilaku keseharian dalam lingkungan pendidikan maupun di luar/dalam masyarakat. Pendidik harus dapat menjadi *'panutan*', menjadi rujukan, menjadi 'teladan' bagi anak didik dalam berperilaku, dalam mengahadapi dan menyelesaikan maslaah-masalah keseharian. Untuk dapat memenuhi tuntutan sebagai contoh '*panutan'*, pamong/guru/pendidikan harus memiliki moral yang baik, dan moral yang baik adalah 'tidak ada tindakan yang dapat menyakiti orang', yang dlaam keseharian dalam lingkungan pendidikan adalah anak didik. (Etika, buku Frans Magnis, 2006). Praktik pembelajaran di kelas tidak ada pemaksaan, pengobanan (*victimization*), *vandalisme*, pelecehan dan kekerasan kepada anak didik.

Dalam menjalankan strategi '*ing madyo mangun karso'* guru/pamong/pendidik harus mampu membangun semngat/memotivasi setiap anak didik yang berada dalam tanggung jawabnya. Untuk ini pamong/guru harus memahami/menguasai ilmu tentang perilaku manusia/anak didik yang dirangkum dalam ilmu psikologi pendidikan, lebih

khsus psikologi perkembangan. Guru harus menguasai perkembangan kejiwaan, intelektual dan pisik anak didik untuk dapat memberikan motivasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing anak didik. Guru/pendidik harus efektif bagi setiap individu anak didik dalam membangun semangat yang tinggi untuk mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Seorang pamong/guru seyogyanya memperhitungkan potensi anak didik untuk berkembang secara maksimal *(to become what he/she is capable of being)*, (Conny Semiawan & Raka Joni, 1993: 62), baik untuk kepentingan diri sendiri anak didik, maupun untuk berperan serta bersama-sama individu lain dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, dan pada gilirannya untuk pembangunan kemanusiaan.

Menciptakan manusia merdeka lahir dan batin, jiwa dan raga hanya dapat direalisasikan dengan memberikan keleluasaan kepada individu untuk melakukan kegiatan yang diinginkan sesuai keinginan dan kemampuannya. Asas '*tut wuri handayani*' menjadi strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, di mana pamong/guru mengarahkan, memberikan dorongan/semangat kapada anak didik, atau sekedar mengawasi dengan waspada sesuai kebutuhan yang dipandu oleh pengupayaan pencapaian tujuan pendidikan secara utuh (Conny Semiawan & Raka Joni, 1993: 52). Sebagaimana dalam pengertian kata 'pamong' atau pengasuh, anak dibiarkan berkegiatan belajar sesuai keinginan, bakat, minat dan kecepatan belajarnya, dan jika anak menyimpang dari tujuan pembelajaran pamong mengarahkan untuk kembali kepada jalur yang benar.

D. Pembelajaran Tematik Dan Integratif

Demikian juga strategi pembelajaran yang mengajarkan materi pelajaran kepada anak didik secara partial atau terpisah-pisah, kemudian berubah menekankan pada model terpadu atau jaringan. Pembelajaran berbagai bahan pembelajaran yang terkait dikemas dalam satu tema yang

dapat dijadikan pembahasan untuk beberapa mata pelajaran secara bersama. Model pembelajaran yang demikian biasa disebut pembelajaran tematik-integratif, yang menjadi penting mengingat anak didik pada akhirnya harus memahami dan memecahkan persoalan kehidupan yang akan dihadapai dalam kehidupan nyata dalam masyarakat secara utuh, komprehensif, dan melibatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman, bukan hanya menekankan pada salah satu sudut pandang atau meninjau persoalan hanya dari satu aspek atau sisi pandang saja. Banyak masalah dalam kehidupan anak didik kelak dalam masyarakat yang harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan multi, antar dan inter disiplin, agar dalam penyelesaian masalah kehidupan yang dihadapi diperoleh hasil yang utuh, komprehensif dan final, dan tidak menimbulkan masalah-masalah baru.

Dalam model pembelajaran atau pendidikan berwawasan budaya dan etika menuntut penyampaiakan materi secara utuh (*integrative*) dari beberapa mata pelajaran serta bersifat kontekstual, yang menggambarkan hubungannya dengan lingkungan/keadaan sosial dan suasana kehidupan anak didik dalam keseharian. Menurut Dewey (516) khususnya untuk pendidikan anak usia dini haruslah bersikap akrab, langsung dan konkrit, bukan sintetis, buatan dan simbolis. Pendidikan moral harus terintegrasi dengan bidang kurikulum lain dan harus bersentuhan dengan isu-isu kehidupan nyata yang menarik dan penting bagi anak.

Model pembelajaran dalam pendidikan yang berbudaya dan beretika menggunakan strategi (sebagai padanan metode) yang mengacu pada materi pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor, untuk membangun dan mengembangkan aspek cipta (kemampuan pikir), rasa (kemampuan afektif) dan karya (kemampuan motorik, keterampilan) dan terbangunnya semangat yang tinggi (karsa). Pembelajaran afektif menekankan pada strategi pemahaman (memahami/mengerti), penghayatan, dan melaksanakan. Strategi pembelajarannya adalah dengan mengintegrasikan aspek-aspek kurikulum dengan kehidupan

sekolah. Tanggung jawab sekolah yang utama adalah memberikan bimbingan kepada anak didik untuk dapat hidup bahagia secara lahir dan batin. Semangat sekolah adalah semangat di mana pendidik harus selalau ada di sana untuk membantu saat anak didik menyelesaikan masalahnya sendiri saat sedang menghadapi masalah. Model-model pembelajarannya pun dilakukan sesui dengan lingkungan dan karakteristik materi pendidikannya, serta tingkat perkembangan jiwa dan phisik anak didik.

E. Beberapa model dalam pembelajaran

Model pembelajaran yang dilaksanakan memberikan keleluasaan kepada anak didik berkeyakinan bahwa anak didik merupakan individu yang harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri pilihannya segala sesuatu yang akan dipelajari sesuai kebutuhan dan minatnya, serta kecepatan dalam pembelajarannya. Anak didik diberikan keleluasaan/kemerdekaan untuk menentukan sendiri apa yang ingin dikuasai sesuai dengan minatnya yang tinggi, dengan demikian akan tercipta anak-anak yang merdeka, tidak dipaksakan untuk menguasai segala sesuatu yang tidak diingini dan tidak disukai. Tanpa model yang demikian mustahil akan diperoleh hasil pendidikan yang berupa anak-anak yang merdeka lahir dan batin.

Filsafat konstruktifistik dilandasi pandangan bahwa anak didik bukanlah gambaran kertas kosong, yang harus diisi dengan berbagai macam tulisan sesuai keinginan pendidik atau orang dewasa. Anak didik diyakini telah memiliki pengetahuan mengenai segala sesuatu yang ada di sekitarnya, baik yang diterima secara alamiah maupun yang diterima melalui proses pembelajaran secara tidak disengaja. Anak didik dapat digambarkan sebagai kerta putih yang sudah ada tulisannya, tetapi tulisan itu masih bersifat tidak kentara (lamat-lamat) namun sudah menunjukkan potensi adanya tulisan itu. Tugas atau pekerjaan pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan itu agar menjadi jelas dalam pengertian agar menjadi tulisan yang dapat dibaca. Adanya potensi yang tidak baik tidak

dikembangkan, atau tidak ditebalkan sehingga tidak menjadi sifat-sifat yang merugikan.

Pandangan ini menegaskan bahwa anak didik bukalah kertas putih bersih, kosong yang siap atau dapat diisi dengan tulisan apa saja oleh pendidik, tetapi anak didik dalam pandangan ini telah memiliki potensi bakat yang dibawa sejak lahir, serta pengetahuan-pengetahuan dasar yang telah diterima atau diperoleh sebagai proses belajar secara alami dengan pengamatan benda-benda di sekitarnya, dan menirukan perilaku/tindakan, ucapan dari para pendidik alam seperti orang tua atau orang dewasa selama berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Sekolah berusaha mengembangkan kebiasaan baik bagi anak didik dengan mengarahkan mereka untuk menerima tanggung jawab, bekerja sama dengan anak-anak yang lain, biasa terlibat dalam kerja kreatif dan praktis. Dewey percaya bahwa setiap upaya (metode) yang membantu perkembangan kemampuan anak dalam menyusun, memproduksi dan mencipta menjadi kesempatan untuk mengubah pusat gravitasi etika dari penyerapan egoism menjadi pengabdian social. Dewey tidak dapat memahami mengapa sekolah menerapkan metode otokratis tradisional yang menurutnya merusak otonomi dan kreativitas intelektual anak didik.

Keteladanan diberikan oleh para pendidik dan orang dewasa kepada anak didik dengan semoyan *'ing ngarso sung tulada*', yang berarti mengutamakan keteladanan, untuk dapat diikuti dan ditiru oleh anak didik. Model ini sangat sesuai untuk pembelajaran moral dan budi pekerti, yang mengutamakan keunggulan moralitas, integritas dan keteladanan pendidik bagi anak-anak yang menjadi asuhannya.

Budaya daerah yang baik, yang berisi tradisi, kebiasaan, etika kesopanan, harus dikuasai anak didik sebelum mereka diperkenalkan dengan budaya lain, baik budaya suku bangsa lain maupun budaya yang bersasal dari bangsa/negara lain. Pendidik harus mengenali dan memahami budaya-budaya setempat yang merupakan nilai-nilai luhur

budaya daerah, yang merupakan puncak-puncak budaya suatu masyarakat, melakukan kajian-kajian untuk memperkembangkannya, sebagai bahan pengajaran kepada anak didik. Setelah anak dibekali dengan nilai-nilai budaya daerah yang kuat, baru kemudian dilengkapi dan diperkenalkan dengan nilai-nilai budaya lain dengan menganut asas konvergensi, dimana budaya lain dapat masuk dan diseleksi, yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan anak didik diintegrasikan ke dalam budaya setempat/sendiri, sedangkan yang tidak baik lebih-lebih yang bertentangan dengan budaya sendiri harus ditinggalkan. Dengan demikian anak didik akan tetap memiliki identitas dan memegang budaya sendiri tanpa harus terisolasi dari pergaulan dengan budaya-budaya lain/dunia luar.

Model tindak tutur direktif kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kepada peserta didik dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yaitu perintah, permintaan dan saran. Model perintah (*command*) diaktualisasikan dalam tindakan: melarang, memperingatkan, memerintah, menegur, mendesak, dan mengharuskan. Model permintaan (*request*) diaktualisasikan dalam tindakan: memohon, mengharap, meminta, menghimbau, dan mengajak. Model saran (*suggest*) dilakukan dalam kegiatan menasehati, menganjurkan, menawarkan, mendorong, mempersilakan, dan menyarankan. Model perintah (*command*) diintegrasikan dengan model bermain peran, simulasi dan diskusi kelompok. Permintaan (*request*) diintegrasikan dalam tindakan keteladanan, simulasi dan bermain peran. Model saran (*suggest*) diintegrasikan dalam kegiatan bakti sosial, kunjungan lapangan dan *problem solving*.

Secara riil, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin sekolah seperti upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain)

setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.

2. Keteladanan perilaku guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai misalnya: berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, memberi perhatian kepada peserta didik, bersikap jujur, menjaga kebersihan dsb.
3. Pengkondisian lingkungan sekolah yang mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa misalnya, toilet yang selalu bersih, tersedia bak sampah di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

Sedangkan pada usia dewasa, belajar afektif sampai pada tahap internalisasi. Proses belajar ranah afektif yang dapat membentuk karakter kepribadian dapat terjadi melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Penerimaan (receiving phenomena), pada saat ini, anak-anak baru pertama kali menerima pesan/nasihat tentang nilai-nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia. Anak-anak akan berhasil menjadi manusia yang berkarakter positif jika dia mau mendengarkan pesan/nasihat tentang nilai-nilai dalam perilaku yang terkandung di dalamnya.
2. Pemberian respon/menanggapi (responding). Setelah anak mendengar pesan/nasihat tentang nilai-nilai baik dan buruk, kemudian memberi respon. Anak yang berpotensi memiliki karakter positifakan mematuhi nilai-nilai yang positif seperti apa yang telah diterima pada tahap receiving.

3. Penghargaan (valuing), setelah anak mematuhi nilai-nilai positif dalam perilakunya, anak sudah mulai menerapkan nilai-nilai baik tersebut dalam kehidupan sehari-harinya meskipun sudah tidak ada pihak lain yang menyuruhnya. Pada level ini anak sudah mampu membedakan dan menilai karakter yang baik dan kurang baik, positif dan negatif.
4. Pengorganisasian (organization) terjadi jika anak sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai positif, maka dia akan dapat memutuskan untuk memilih nilai yang baik-baik saja jika suatu saat dihadapkan pada beberapa pilihan nilai yang berbeda-beda. Sebaliknya, jika pada level ini, anak terjerumus untuk memilih nilai-nilai negatif, maka nilai-nilai negatif tersebut berpotensi untuk menetap dan tertanam dalam diri anak.
5. Internalisasi nilai (internalizing value) yaitu terjadi ketika nilai-nilai telah menjadi filsafat hidup sehingga orang tidak akan terpengaruh oleh faktor luar. Perilaku positif/negatif sudah merasuk ke dalam diri, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga sulit untuk diubah.

Menurut hasil penelitian Endang, mengenai trategi pendidikan karakter menurut jenjang usia dapat di jelaskan sebagai berikut:

Strategi Pendidikan Karakter menurut Jenjang Usia

No	Karakter	Strategi pendidikan karakter menurut usia		
		Anak-anak	**Remaja**	**Dewasa**
1	Trustwor thiness	Melatih anak untuk menyampaikan pesan atau titipan.	Memberi tugas memimpin kelompok	Mendelegasikan untuk mengikuti kompetisi/lomba
2	Respect	Mengucap salam, mencium tangan setiap ketemu teman atau saudara	Bersikap sopan terutama kepada orang yang lebih tua	Mematuhi kode etik pergaulan,
3	Responsi bility	Memberesi alat bekas mainannya sendiri	Memberi tugas piket kelas/ pekerjaan rumah	Memberi tugas dengan batas waktu tertentu
4	Fairness	Membagi makanan dengan jumlah yang sama kepada saudara/teman	Membagi tugas kelompok sesuai dengan kemampuan	Membagi tugas kelompok sesuai dengan kemampuan
5	Caring	Membolehkan alat permainannya dipinjam teman	Membantu panti asuhan, menolong teman	Menjadi relawan, korps sukarela
6	Citizen-ship	Tidak berebut, mengalah, sabar menunggu giliran,	Mengikuti upacara bendera atau pramuka	Mentaati peraturan, disiplin,
7	Honesty	Tidak boleh mengambil barang milik orang lain	Mengembalikan barang yang dipinjam/ditemu kan	Tidak nyontek, menyalin pekerjaan teman
8	Courage	Mencoba berbagai alat permainan yang menantang,	Mencoba berbagai olah raga/kegiatan yang menantang	Memimpin diskusi, memberi tugas yang menan tang
9	Diligence	Bermain, menari, membaca cerita bergambar dengan jadwal yang rutin,	Memperbanyak aktivitas positif, kegiatan ekstrakurikuler	Memberi banyak kegiatan positif, penyaluran bakat
10	Integrity	Menceritakan kembali apa yang telah dialami	Menjaga integritas diri sendiri	Menjaga integritas diri

Sedangkan menurut Ki Hajar dewantoro Isi/Materi Pengajaran/Pendidikan, sesuai tingkat perkembangan/umur anak adalah sebagai berikut:

1. Anak usia antara 5-8 tahun (oleh Ki Hajar disebut taman anak)

Disebut sebagai ‘periode syari’at. Segala pengajaran bersifat ‘pembiasaan’ bertingkah laku seerta menurut peraturan adau kebiasaan yang umum. Pamong (guru) memberi contoh, anjuran atau perintah hanay di mana perlu. Keterangan/penjelasan mengapa harus melakukan sesuatu, dll belumperlu diberikan karena anak belum bisa diajak berpikir. Jika ada yang bertanya cukup dijawab secara ringkas. Anak-anak diberi kebebasan sebesar-besarnya selama tidak mengganggu ketertiban atau kedamaian, lebih-lebih selama tidak merugikan anak-anak lain.

2. Anak usia 9-12 tahun (disebut taman muda)

Kelompok usia ini disebut ‘periode hakekat’, yaitu pada tataran yang berarti ‘kenyataan’ atau ‘kebenaran’, dan yang dimaksud kepada anak harus diberikan ‘pengertian’ agar anak menjadi ‘insyaf’ serta ‘sadar’ tentang segala kebaikan. Dalam masa ini anak dikembangkan kemmapuan ‘akal’ atau kekuatan ‘berfikir’ nya, maka anak di’insyafkan’ dan disadarkan tentang berbagai kebaikan dan kejahatan, namun selalu didasarkan pada pengetahuan, kenyataan dan kebenaran. Anak tidak cukup ‘membiasakan’ perilaku kebaikan tetapi tidak tahu ‘hakekat’nya apa, maksudnya atau tujuan berbuat baik itu apa. Dinyatakan oleh Ki Hajar ‘syari’at tanpa hakekat kosong, sedangkan ‘hakekat’ tanpa syari’at adalah batal.

3. Anak usia 13-16 tahun (dinamakan taman muda)

Periode ini disebut periode ‘tarikat’. Dalam periode ini waktunya anak-anak selain meneruskan mencari pengertian, mulai berlatih diriterhadap segala perbuatan (laku) yang sukar dan berat dengan ‘niat’ yang disengaja. Anak didik mulai dilibatkan dalam kegiatan yang berat dengan tujuan/maksud yang disadari dan diniatkan, misalnya membantu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, pengumpulan dana, membantu masyarakat terpencil, membantu petani mengembangkan pertaniannya. Untuk ini dianjurkan adanya gerakan ‘kepramukaan’ dan ‘kepanduan’ bagi

anak usia ini. Tindakan kebaikan yang lakukan secara disengaja, dengan kehendak yang kuat untuk berbuat kebaikan dapat dikategorikan pendidikan ‘budi pekerti’.

4. Anak usia 17-20 tahun (dinamakan taman – madya)

Periode ini dinamakan periode ‘makrifat’, yang berarti anak-anak sudah berada dalam tingkat ‘pemahaman’, yang berarti biasa melakukan kebaikan, menginsyafi serta menyadari, dan memahami akan maksud dan tujuannya melakukan kebaikan itu. Berbuat kebaikan ada kalanya sukar dan berat, namun dipahami, sehingga dengan motivasi (kekuatan kehendak) yang kuat kebaikan itu tetap dilakukan. Disinilah pendidikan budi pekerti tentang pendidikan ‘ethik’, tentang hukum kesusilaan. Melanggar aturan dianggap tidak ethis.

BAB VII SISTEM EVALUASI

A. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi merupakan salah satu sarana penting dalam meraih tujuan belajar mengajar. Guru sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan siswa dalam meraih tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi. Guru dapat mengambil keputusan secara tepat dengan informasi ini mengenai langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Informasi tersebut juga dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk berprestasi lebih baik.

Ujian *try out* pada hakikatnya merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sebelum menghadapi ujian nasional (UN). Hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi belajar, seperti: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip evaluasi, dan jenis evaluasi akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Ada bermacam-macam pengertian evaluasi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ratumanan (2003: 1), evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional. Ralp Tyler (dalam Arikunto, 2011: 3) mengatakan bahwa “Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya”. Masih di dalam buku yang sama, definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli, yakni Cronbach dan Stufflebeam. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar

mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.

Jika evaluasi dikaitkan dengan pendidikan maka evaluasi pendidikan memiliki dua konsep pengertian. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudijono (1996: 2) bahwa evaluasi pendidikan adalah: 1) Proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan; 2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (*feed back*) bagi penyempurnaan pendidikan.

Kesimpulan yang dapat diambil melalui beberapa konsep pengertian di atas, evaluasi pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mengukur, menelaah, menafsirkan, dan mempertimbangkan sekaligus memberikan umpan balik (*feed back*) untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta digunakan sebagai informasi untuk membuat keputusan.

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

a. Tujuan Evaluasi

Sudijono (1996: 16-17) menyatakan bahwa secara umum tujuan evaluasi belajar adalah untuk: (a) menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik, setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu; dan (b) mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.

Kegiatan evaluasi juga mempunyai tujuan khusus dalam bidang pendidikan, yaitu: (a) untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan, dan (b) untuk menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

b. Fungsi Evaluasi

Sudijono (1996: 7) menjelaskan bahwa secara umum ada tiga fungsi evaluasi, yaitu untuk: (a) mengukur kemajuan, (b) menunjang penyusunan rencana, dan (c) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Sudijono juga menambahkan, bahwa selain memiliki fungsi secara umum evaluasi juga memiliki fungsi secara khusus. Adapun fungsi evaluasi secara khusus dalam bidang pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu: (a) segi psikologi, (b) segi didaktik, dan (c) segi administratif. Lebih lanjut Sudijono menjelaskan tentang ketiga fungsi evaluasi tersebut, sebagai berikut.

Evaluasi pendidikan secara psikologi akan memberikan petunjuk untuk mengenal kemampuan dan status dirinya di antara kelompok atau kelasnya. Siswa akan mengetahui apakah dirinya termasuk berkemampuan tinggi, rata-rata, atau rendah. Apabila hal tersebut dapat dicapai maka diharapkan evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya.

Evaluasi pendidikan bagi pendidik secara didaktik, setidaknya memiliki lima macam fungsi, yaitu: (1) memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah dicapai oleh peserta didik, (2) memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing siswa di antara kelompoknya, (3) memberikan bahan penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik, (4) memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi siswa yang memerlukannya, dan (5) memberikan petunjuk sejauh mana tujuan program pengajaran yang telah ditentukan telah dicapai.

Evaluasi pendidikan secara administrasi setidaknya memiliki tiga macam fungsi yaitu: (1) memberikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan siswa yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu tertentu, (2) memberikan bahan-bahan

keterangan (data) untuk keperluan pengambilan keputusan, dan (3) memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran.

3. Prinsip-Prinsip Evaluasi

Mengingat pentingnya evaluasi dalam menentukan kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan evaluasi hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Menurut Daryanto (2005: 19-21), terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi, yaitu keterpaduan, keterampilan siswa, koherensi, pedagogis, dan akuntabilitas.

a. Keterpaduan

Tujuan instruksional, materi, metode, pengajaran, serta evaluasi merupakan tiga kesatuan terpadu yang tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, perencanaan evaluasi harus sudah ditetapkan pada waktu menyusun suatu pengajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan.

b. Keterlibatan Siswa

Untuk mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar mengajar yang dijalani secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya guru untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi mengenai kemajuannya dalam program belajar mengajar. Siswa akan merasa kecewa apabila usahanya tidak dievaluasi.

c. Koherensi

Prinsip evaluasi dimaksudkan evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak diukur.

d. Pedagogis

Evaluasi dan hasil hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan belajarnya.

e. Akuntabilitas

Evaluasi dan hasilnya dapat dipakai sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.

Dalam merencanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran, seorang guru hendaknya selalu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat bertindak dan berusaha seobjektif mungkin dalam mengadakan evaluasi.

4. Jenis Evaluasi

Menurut Daryanto (2005: 11-14) untuk masing-masing tindak lanjut yang dikehendaki dalam evaluasi diadakan tes yang disebut tes penempatan, tes formatif, tes diagnostik, dan tes sumatif.

Tes penempatan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru, sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dimiliki peserta didik. Dengan demikian, siswa dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai dengan tingkat pengetahuan yang telah dimilikinya. Tes ini mengacu pada acuan norma.

Tes formatif dilaksanakan di tengah program pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik, baik kepada siswa maupun kepada guru. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat diketahui materi pelajaran apa yang belum dikuasai siswa sehingga guru harus mengupayakan perbaikannya. Tes ini mengacu pada acuan kriteria.

Tes diagnostik digunakan untuk mendiagnosa kesalahan belajar siswa dan mengupayakan perbaikannya. Pada jenis ini, tes formatif terlebih dahulu disajikan untuk mengetahui ada tidaknya bagian mana yang belum

dikuasai siswa, sehingga dapat dibuat butir-butir soal yang tingkat kesukarannya relatif rendah untuk mendekteksi.

Tes sumatif diberikan pada akhir tahun ajaran untuk memberikan nilai sebagai dasar menentukan kelulusan atau pemberian sertifikat bagi siswa yang telah menyelesaikan pelajaran dengan baik. Ruang lingkup tes sumatif mencakup seluruh bahan yang telah disajikan sepanjang jenjang pendidikan.

B. Instrumen Evaluasi

Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata “alat” biasa juga disebut dengan istilah “instrumen”. Dengan demikian maka alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi (Arikunto, 2011: 25-26).

1. Bentuk Instrumen

Kegiatan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari suatu instrumen evaluasi yang digunakan untuk mendapatkan data evaluasi. Untuk mendapatkan data evaluasi, evaluator menggunakan cara atau teknik. Cara tersebut dikenal dengan teknik evaluasi. Teknik evaluasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik tes dan nontes. Kedua teknik tersebut digunakan untuk mencari data-data pengukuran tentang keberhasilan siswa dalam kegiata belajar mengajar. instrumen yang banyak digunakan dalam bidang pendidikan ialah tes.

Tes adalah cara yang digunakan untuk melakukan pengukuran dalam bentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa agar mendapatkan data tentang nilai prestasi siswa tersebut untuk dibandingkan dengan nilai standar yang ditetapkan (Nurkancana dan Sumartana, 1983: 25). Bentuk tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif.

Menurut Nurgiyantoro (2001: 11), tes subjektif digunakan agar siswa menunjukkan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan, menganalisis,

dan mengevaluasi informasi baru yang diharapkan kepadanya. Jawaban siswa terhadap tes subjektif menunjukkan kualitas cara berpikir siswa, aktifitas kognitif yang bukan semata-mata mengingat dan memahaminya saja.

Tes objektif adalah tes yang bersifat pasti, karena hanya ada satu kemungkinan jawaban yang benar. Sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, tes ini sering dipilih karena dapat dikerjakan dengan cepat dan mencakup materi ajar yang luas, hanya memiliki satu jawaban yang pasti sehingga memudahkan korektor untuk mengoreksi, serta dapat dikoreksi secara cepat dengan hasil yang dapat dipercaya.

Menurut Arikunto (2011: 26) yang tergolong teknik nontes adalah skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Teknik nontes merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tingkah laku kognitif. Nontes biasanya berisi pertanyaan atau pernyataan yang tidak memiliki jawaban benar atau salah secara mutlak.

2. Jenis Tagihan

Kegiatan evaluasi bentuk tes dan jenis tagihan yang digunakan hendaknya bervariasi tergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, jenis tagihan yang digunakan dalam ujian *try out* berupa soal tes pilihan ganda. Materi soal yang diujikan harus disusun sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah dirumuskan.

C. Acuan Norma dan Kriteria

Acuan norma dan acuan kriteria menggunakan asumsi yang berbeda tentang kemampuan seseorang. Penafsiran hasil tes antara dua acuan ini berbeda hingga menghasilkan informasi yang berbeda maknanya.

1. Acuan Norma

Tes acuan norma berasumsi bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi normal. Perbedaan ini harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran, misalnya setelah mengikuti tes peserta didik dibandingkan dengan kelompoknya.

Hal itu berarti standar yang diterapkan pada satu kelompok tidak dapat diterapkan pada kelompok lain. Standar yang dibuat berdasarkan hasil tes sebelumnya pun tidak dapat digunakan untuk hasil tes yang sekarang dan yang akan datang. Jadi, norma yang satu akan berbeda dengan norma yang lain. kesemuanya bergantung pada prestasi siswa pada kelompok yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2001: 404).

2. Acuan Kriteria

Berbeda dengan pendekatan acuan norma, pendekatan acuan kriteria berusaha menafsirkan hasil tes yang ditetapkan standar yang akan dipergunakan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan (Nurgiyantoro, 2001: 397).

Pada acuan kriteria seorang siswa dikatakan lulus apabila telah memenuhi tingkat penguasaan minimal pada bahan pelajaran. Konsekuensi dari acuan ini adalah adanya remidi dan pengayaan. Siswa yang belum memenuhi tingkat penguasaan minimal terhadap bahan pelajaran seperti yang diisyaratkan harus belajar lagi sampai kemampuannya mencapai standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, bagi siswa yang telah mencapai standar diberi pelajaran tambahan yang disebut program pengayaan.

Soal ujian *try out* bersama mata pelajaran bahasa Indonesia kelas XII SMAN se-Kota Bima tahun pelajaran 2011/2012 disusun berdasarkan kisi-kisi soal yang mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sistem penilaipun mengacu pada kurikulum (KTSP). Sistem penilaian hasil pembelajaran KTSP menggunakan acuan kriteria dalam menafsirkan tes.

D. Validitas dan Reliabilitas Soal

Manfaat penilaian adalah untuk menentukan apakah sebuah tes telah mengukur apa yang hendak diukur dan apakah sebuah tes telah tepat digunakan untuk membuat suatu keputusan tentang pengambilan tes. Pada saat pengujian suatu soal, untuk mengambil keputusan tentang belajar siswa, harus dipastikan bahwa soal tersebut valid dan reliabel. Validitas soal dapat dilihat dari kisi-kisi soal, sedang reliabilitas soal baru dapat diketahui setelah dilakukan uji coba terhadap soal tersebut. Uji coba ini dilakukan terhadap sejumlah subjek yang bersifat tipikal dengan populasi yang akan dites (Nurgiyantoro, 2001: 135).

1. Validitas Soal

Validitas atau (kesahihan) tes dapat diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu tes mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya tes tersebut. Sebaliknya, suatu tes yang menghasilkan data tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 1987: 146).

Menurut Arikunto (2011: 65-69) validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pengalaman. Validitas tes tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis meliputi validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*), sedangkan validitas empiris meliputi validitas "ada sekarang" atau konkruen (*concurrent validity*) dan validitas prediksi (*predictive validity*). 1) Validitas Isi (*content validity*)

Validitas isi didefinisikan sebagai kecocokan di antara isi alat ukur dengan sasaran ukur. Untuk keperluan pencocokan, biasanya isi sasaran ukur disusun dalam bentuk spesifikasi, yang meliputi bahan atau materi dan tujuan hasil belajar.

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut dengan validitas kurikuler. Validitas isi ini diusahakan tercapai sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. 2) Validitas Konstruksi (*construct validity)*

Arikunto mengatakan bahwa sebuah tes memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional. Konstruk dalam pengertian ini bukanlah susunan, tetapi merupakan rekaan psikologis, yaitu suatu rekaan yang dibuat oleh para ahli ilmu jiwa yang dengan suatu cara tertentu merinci isi jiwa atas beberapa aspek seperti: ingatan, pemahaman, aplikasi, dan seterusnya. 3) Validitas Konkruen (*concurrent validity*)

Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dalam membandingkan hasil sebuah tes maka diperlukan suatu alat pembanding, maka hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan. 4) Validitas Prediksi (*predictive validity*)

Menurut Arikunto sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang.

2. Reliabilitas Soal

Reliabilitas suatu tes adalah konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Pengertian itu disimpulkan dari pendapat dua ahli pengukuran berikut ini. Arikunto (2011: 86) menyatakan bahwa reliabilitas dalam pengukuran berhubungan dengan masalah kepercayaan. Menurut Suryabrata (2004: 29), reliabilitas

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel artinya harus memiliki tingkat konsistensi dan kemampuan.

Suatu alat tes dikatakan reliabel apabila alat tes tersebut dapat dipercaya, konsisten, atau tetap. Untuk membuktikan apakah suatu alat tes memiliki sifat tetap, perlu diadakan uji coba terhadap alat tes yang akan digunakan tersebut.

Apabila sebuah tes diujicobakan lebih dari satu kali pada subjek yang sama dapat menghasilkan data yang kurang lebih sama, tes tersebut dikatakan dapat mengukur secara tetap.

Untuk mengukur reliabilitas soal dapat digunakan beberapa metode antara lain metode stabilitas, metode ekuavalensi, dan metode konsistensi internal (Surapranata, 2004: 90). Metode yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah metode konsistensi internal. Metode konsistensi internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu kali pengumpulan data (Widoyoko, 2009:147). Nunnaly (dalam Surapranata, 2004: 113) menyatakan bahwa metode ini didasarkan pada korelasi antarskor jawaban pada setiap butir tes. Ia juga menyatakan bahwa metode ini khususnya digunakan pada setiap butir-butir yang dikotomi seperti pilihan ganda.

Daftar pustaka

Conny Semiawan & T. Raka Joni. 1993. *Pendekatan Pembelajaran:* Acuan Konseptual Pengelolaan Kegiatan Belajar-Mengajar di *Sekolah*. Jakarta: Konsursium Ilmu Pendidikan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Franz Magnis-Suseno. 2006. *Etika abad kedua puluh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Imam Barnadib. (1996). Dasar-dasar kependidikan: memahami makna dan perspektif beberapa teori pendidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia

Ki Hadjar Dewantara, 2013. Karya Ki Hadjar. Buku I. (Pendidikan). Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Cetakan Kelima. Yogyakarta: UST-Press.

Ki Hadjar Dewantara, 2013. Karya Ki Hadjar. Buku II. (Kebudayaan). Pemikir an, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Cetakan Kelima. Yogyakarta: UST-Press

McNeil, John. 1995. Curriculum. The Teacher's Initiative. Englewood Cliffs, N.J: Merril an Imprint of Prentice Hall.

Nasution. 1982. *Asas-Asas Kurikulum*. Bandung: Jemmars.

Nucci, Larry P. dan Narvaez, Darcia. (eds). (2014) *Handbook Pendidikan* Moral dan Karakter. Handbook of Moral and Character Education. Terjemahan. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Oliver, Albert I. 1977. Curriculum Improvement. A Guide to Problems, *Principles, and Process*. Second Edition.New York: Harper & Row, Publishers.

Ornstein, Allan C. and Hunkins, Francis. 2004. Curriculum. Foundations, Principles and Issues. 3rd. Ed. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Radar Panca Dhahana (Kompas) hari kamis 13 nopember 2014**.**Simon, F.

Ratna Megawangi. (2010). Pengembangan program pendidikan karakter di sekolah: Pengalaman sekolah karakter. Depok: Indonesia Heritage Foundation

Stenhouse, Lawrence. 1984. An Introduction to Curriculum Research and *Development*. London: Biddles Ltd.

Trilling, B. & Hood, P. (1999). Learning, Technology, and Education Reform in the Knowledge Age or “We’re Wired, Webbed, and Windowed, Now What”? Educational Technology May-June 1999. p. 5-18.

Wen, S. (2003). Future of education. Batam: Lucky Publishers

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014